



**AFIKSASI DALAM WACANA POLITIK KORAN *RIAU POS* DAN  
PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN AJAR  
BAHASA INDONESIA DI SMA KELAS X  
(KAJIAN FUNGSI DAN MAKNA)**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**OLEH:**

**MAIMUNAH**

**NIM. 11811123593**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



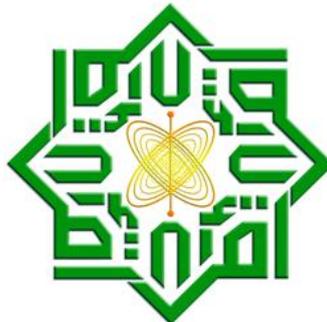
**AFIKSASI DALAM WACANA POLITIK KORAN *RIAU POS* DAN  
PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN AJAR**

**BAHASA INDONESIA DI SMA KELAS X  
(KAJIAN FUNGSI DAN MAKNA)**

Skripsi

Diajukan untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**MAIMUNAH**

**NIM. 11811123593**

**PRORAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul *Afiksasi dalam Wacana Politik pada Koran Riau Pos serta Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA Kelas X (Kajian Fungsi dan Makna)* yang ditulis oleh Maimunah NIM. 11811123593 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Syakban 1443 H

28 Maret 2022 M

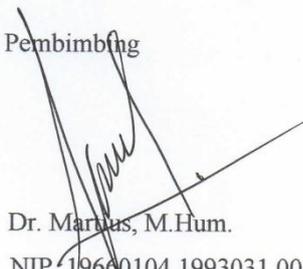
Menyetujui,

Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia

Pembimbing

  
Dr. Nursalim, M.Pd.

NIP. 19660410 1993031 055

  
Dr. Mardias, M.Hum.

NIP. 19660104 1993031 004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *Afiksasi dalam Wacana Politik Koran Riau Pos dan Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA Kelas X (Kajian Fungsi dan Makna)*, yang ditulis oleh Maimunah NIM. 11811123593 telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 11 Ramadhan 1443 H/ 13 April 2022 M. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia.

Pekanbaru, 11 Ramadhan 1443 H

13 April 2022 M

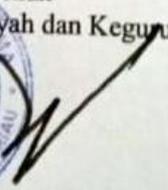
Mengesahkan  
Sidang Munaqasah

Penguji I  
  
Drs. Akmal M.Pd.

Penguji II  
  
Welli Marlisa, M.Pd.

Penguji III  
  
Dr. Herlinda, M.A.

Penguji IV  
  
Dr. Lusi Komala Sari, M.Pd.

Dekan  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
  
Dr. H. Kadar, M.Ag.  
NIP. 196505211994021001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maimunah  
NIM : 11811123593  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Tarab/ 29 Maret 1999  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan  
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Judul Skripsi :

**AFIKSASI DALAM WACANA POLITIK KORAN *RIAU POS* DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA DI SMA KELAS X (KAJIAN FUNGSI DAN MAKNA)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan



Maimunah  
NIM. 11811123593

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk diri peneliti sendiri. Terima kasih sudah tetap kuat berjuang dan bertahan sejauh ini.

Selanjutnya untuk ayah saya (Bapak Maiyustal) dan ibu saya (Ibu Meilan) skripsi ini adalah persembahan kecil saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Terima kasih karena selalu ada dan selalu berjuang untukku.

Kemudian untuk kakak-kakak saya, terima kasih untuk semangat yang selalu diberikan.

Serta untuk keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah mendukung penulis mewujudkan harapan menjadi kenyataan.

## MOTTO

*NOBODY IS PERFECT*

*BUT I CAN BE BETTER*



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Afiksasi dalam Wacana Politik Koran *Riau Pos* dan Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA Kelas X (Kajian Fungsi dan Makna)”. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah saw.

Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Terutama keluarga besar peneliti, khususnya Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan doa dan dukungan selama peneliti menempuh pendidikan di UIN Suska Riau. Peneliti juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. H. Kadar, M,Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Dr. Zarkasih, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Zubaidah Amir MZ., S.Pd., M.Pd., dan Wakil Dekan III Dr. Amirah Diniaty, M.Pd., Kons., serta staf dan karyawan yang telah mempermudah segala urusan peneliti selama studi di FTK.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Nursalim, M.Pd., selaku ketua Program Studi, Bapak Drs. Akmal, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi dan semua staf yang telah membantu peneliti selama studi di Pendidikan Bahasa Indonesia FTK UIN Suska Riau.
  4. Ibu Dr. Herlinda, M.A., selaku Penasehat Akademik yang telah mengajarkan dan memberikan motivasi agar peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan program S1.
  5. Bapak Dr. Martius, M.Hum., sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti selama peneliti duduk di bangku perkuliahan. Dosen-dosen yang luar biasa dengan ilmu yang luar biasa.
  7. Keluarga besar Pendidikan Bahasa Indonesia yang namanya tidak dapat peneliti cantumkan satu per satu dan alhamdulillah UIN Suska Riau.

Peneliti berdo'a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal'amin.*

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Peneliti,

Maimunah

NIM. 11811123593

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Maimunah (2022): Afiksasi dalam Wacana Politik Koran *Riau Pos* dan Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA Kelas X (Kajian Fungsi dan Makna)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman tentang afiks diperlukan dalam tulisan karena kesalahan penggunaan afiks dapat menimbulkan makna yang berbeda. Afiks banyak digunakan dalam tulisan termasuk juga dalam koran. Pembelajaran afiksasi dari keseluruhan aspek kebahasaan yang ada di SMA kelas X sebesar 20%. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan afiks dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* serta pemanfaatannya sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA kelas X. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas X pada KD 3.2 Aspek Kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik simak, catat. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu metode agih dengan teknik lesap dan teknik ganti. Teori yang digunakan adalah Verhaar (2010), Chaer (2015) dan Ramlan (2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1490 kata yang menggunakan afiks, prefiks sebanyak 663, sufiks 101, dan konfiks 726. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fungsi afiks sebagai pembentuk kata benda, pembentuk kata kerja, pembentuk kata sifat, pembentuk kata kerja pasif, pembentuk kata kerja aktif transitif, pembentuk kata kerja intransitif, pembentuk kata bilangan bertingkat, dan pembentuk kata keterangan. Afiks memunculkan makna yang berbeda pada bentuk dasar.

**Kata kunci:** *Afiksasi, Koran, Fungsi, Makna*



## ملخص

ميمونة، (٢٠٢٢): الإصاق في الخطاب السياسي في جريدة رياو فوس واستخدامه كمادة تعليمية للغة الإندونيسية في الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية (دراسة الوظيفة والمعنى)

هذا البحث خلفيته هي الفهم المطلوب حول الإصاق في الكتابة، لأن الخطأ في استخدام الإصاق يمكن أن يؤدي إلى معاني مختلفة. أستخدم الإصاق على نطاق واسع في الكتابة، بما في ذلك في الصحف. تعليم الإصاق من جميع جوانب اللغة في الصف 10 بالمدرسة الثانوية هو بمبلغ 20٪. هذا البحث يهدف إلى وصف استخدام الإصاق في الخطاب السياسي في جريدة رياو فوس واستخدامه كمادة تعليمية للغة الإندونيسية في الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية. يمكن استخدام هذا البحث كمادة تعليمية لتعلم اللغة الإندونيسية في الصف 10 بالمدرسة الثانوية عند الكفاءة الأساسية 3.2 وهي الجوانب اللغوية على الأقل من نصّي تقارير الملاحظة. ومصدر البيانات المستخدم هو نص الخبر في الخطاب السياسي في جريدة رياو فوس، طبعة 1-7 يناير 2022. وطريقة البحث المستخدمة هي طريقة الوصف الكيفي، وتقنية جمع بياناته تقنية التوثيق والتقنية التأويلية. وطريقة تحليل بياناته هي طريقة التوزيع مع تقنية الخسارة وتقنية الاستبدال. الطريقة المستخدمة فرهار (Verhaar) (2010)، وجاير (Chaer) (2015)، وراملان (Ramlan) (2011). ونتيجة البحث دلت على أن هناك ١٤٩٠ كلمة تستخدم الإصاق و663 بادئة و101 لاحقة و726 كلمة مختلطة. وبناء على نتيجة البحث عرف بأن وظيفة الإصاق هي تكوين الأسماء، وتكوين الأفعال، وتكوين الصفات، وتكوين الأفعال المبنية للمجهول، وتكوين الأفعال المتعدية النشطة، وتكوين الأفعال اللازمة، وتكوين أرقام متعددة المستويات، وتكوين الظروف. يؤدي الإصاق إلى معاني مختلفة في الشكل الأساسي. وهذا البحث يمكن استخدامه كمادة تعليمية للغة الإندونيسية في الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية وهي في الكفاءات الأساسية لنوع تحليل المحتوى والجوانب اللغوية لنصين على الأقل من تقرير الملاحظة. فالجوانب اللغوية لنصين على الأقل من تقرير الملاحظة في الكفاءة الأساسية 3.2 هذه تناقش الإصاق بحيث يمكن استخدام هذا البحث كمادة تعليمية لفهم المادة.

الكلمات الأساسية: إصاق، جريدة، وظيفة، معنى.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TANDA .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan Laporan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Kajian Teoretis .....	6
1. Afiksasi .....	6
2. Jenis-Jenis Afiks .....	7
3. Fungsi Afiks.....	9
4. Afiksasi dalam Pembelajaran.....	20
B. Penelitian Terdahulu .....	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Berpikir.....	24
---------------------------	----

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Metode Penelitian.....	25
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Instrumen Penelitian .....	26
E. Teknik Analisis Data.....	27

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data.....	29
B. Analisis Data .....	30
1. Prefiks .....	30
2. Sufiks.....	62
3. Konfiks.....	71
C. Pembahasan.....	106
1. Jenis dan Fungsi Afiks .....	107
2. Pemanfaatan Afiksasi Sebagai Bahan Ajar.....	115

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	117
B. Saran .....	118

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 <b>Instrumen Penelitian</b> .....	26
Tabel 4. 1 <b>Jumlah Afiks</b> .....	30
Tabel 4. 2 <b>Prefiks <i>meN-</i></b> .....	31
Tabel 4. 3 <b>Prefiks <i>ber-</i></b> .....	35
Tabel 4. 4 <b>Prefiks <i>di-</i></b> .....	39
Tabel 4. 5 <b>Prefiks <i>ter-</i></b> .....	43
Tabel 4. 6 <b>Prefiks <i>pe-</i></b> .....	46
Tabel 4. 7 <b>Prefiks <i>peN-</i></b> .....	49
Tabel 4. 8 <b>Prefiks <i>ke-</i></b> .....	52
Tabel 4. 9 <b>Prefiks <i>se-</i></b> .....	56
Tabel 4. 10 <b>Prefiks <i>para-</i></b> .....	59
Tabel 4. 11 <b>Sufiks <i>-an</i></b> .....	62
Tabel 4. 12 <b>Sufiks <i>-kan</i></b> .....	65
Tabel 4. 13 <b>Sufiks <i>-wan</i></b> .....	69
Tabel 4. 14 <b>Konfiks <i>meN-kan</i></b> .....	71
Tabel 4. 15 <b>Konfiks <i>meN-i</i></b> .....	75
Tabel 4. 16 <b>Konfiks <i>ber-an</i></b> .....	78
Tabel 4. 17 <b>Konfiks <i>di-kan</i></b> .....	81
Tabel 4. 18 <b>Konfiks <i>di-i</i></b> .....	85
Tabel 4. 19 <b>Konfiks <i>ter-kan</i></b> .....	89
Tabel 4. 20 <b>Konfiks <i>ter-i</i></b> .....	92
Tabel 4. 21 <b>Konfiks <i>peN-an</i></b> .....	93
Tabel 4. 22 <b>Konfiks <i>per-an</i></b> .....	97
Tabel 4. 23 <b>Konfiks <i>ke-an</i></b> .....	100
Tabel 4. 24 <b>Konfiks <i>se-nya</i></b> .....	103

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....	24
-----------------------------------	----

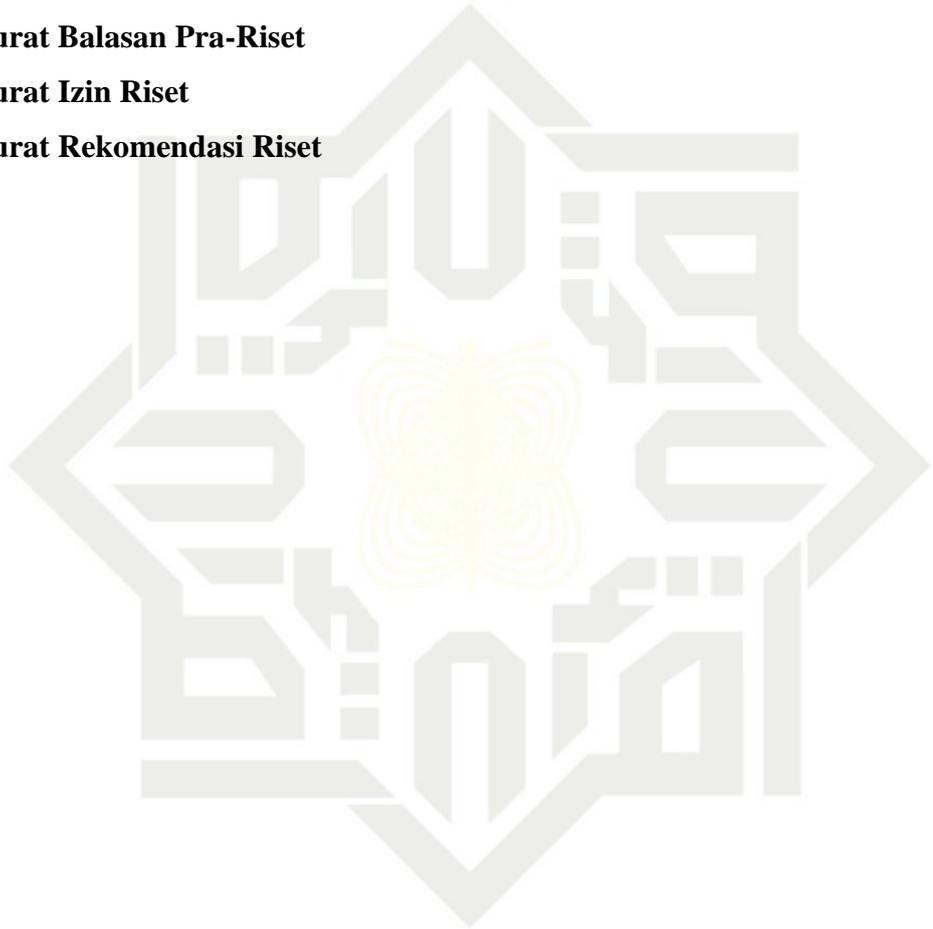


### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: **Data Afiksasi**
- Lampiran 2: **Bahan Ajar**
- Lampiran 3: **SK Pembimbing**
- Lampiran 4: **Blangko Bimbingan Proposal dan Skripsi**
- Lampiran 5: **Surat Balasan Pra-Riset**
- Lampiran 6: **Surat Izin Riset**
- Lampiran 7: **Surat Rekomendasi Riset**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TANDA

\* Kalimat yang tidak berterima



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Melalui bahasa manusia dapat mengekspresikan diri, serta menyampaikan ide, gagasan dan pikirannya kepada orang lain. Bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi tersebut ada dua jenis yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis.

Bahasa lisan merupakan bahasa yang digunakan secara langsung yaitu berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung dari mulut. Sedangkan bahasa tulis adalah bahasa yang tampak yaitu berupa kosakata yang disusun dan membentuk suatu kalimat. Bahasa tulis dapat ditemukan dalam artikel, koran, buku, dan media cetak lainnya.

Ketika bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan maka dalam proses komunikasi akan dibantu dengan adanya mimik wajah, gestur tubuh. Sehingga maksud dan makna ujaran dapat dipahami. Masih banyak orang yang berujar tanpa memperhatikan kosakata yang digunakan, tetapi orang yang mendengar atau lawan bicaranya tetap dapat memahami maksud dari ujaran tersebut.

Berbeda halnya dengan bahasa tulis yang mengharuskan penempatan kosakata yang tepat. Kosakata yang digunakan harus tepat dan disusun sebaik mungkin. Jika terjadi kesalahan penggunaan kata akan mengakibatkan kesalahpahaman makna/maksud dari tulisan tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman memahami makna/maksud dari tulisan, maka kata-kata yang digunakan harus diperhatikan seperti contohnya pada kata yang berafiks.

Afiksasi merupakan salah satu kajian dari morfologi. Morfologi menurut Ramlan (2001: 21) adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan kata dan arti kata. Sebagai salah satu proses pembentukan kata, afiks memiliki peranan penting dalam bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi, terutama bahasa tulis harus memperhatikan penggunaan kata yang tepat. Sehingga memahami proses pembentukan kata adalah penting, salah satunya dengan mengetahui penggunaan afiks itu sendiri.

Afiks banyak digunakan dalam tulisan termasuk juga dalam koran. Koran merupakan media massa yang digunakan masyarakat untuk memperoleh berita atau informasi. Saat ini teknologi berkembang pesat, banyak orang yang menggunakan teknologi sebagai salah satu sarana memperoleh informasi atau berita. Teknologi seperti berita-berita online yang disediakan di beberapa website atau aplikasi penyedia berita. Namun banyak juga orang-orang yang masih menjadikan koran sebagai sumber informasi atau berita. Koran yang digunakan masyarakat untuk memperoleh berita salah satunya adalah koran *Riau Pos*.

Koran atau surat kabar *Riau Pos* banyak dicari dan dibaca oleh masyarakat, terutama masyarakat Riau. Koran *Riau Pos* memuat berita-berita yang baru dan masih hangat dibicarakan. Selain itu, berita yang dimuat tidak hanya berita dari Riau saja tetapi mencakup berita Nasional. Kata-kata yang terdapat dalam tulisan pada koran *Riau Pos* memuat afiks. Afiks merupakan salah satu pelajaran kebahasaan yang tentunya berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran penting. Dengan bahan atau materi ajar yang banyak dan bervariasi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini nantinya dapat dijadikan salah satu materi ajar atau bahan tambahan bagi siswa maupun guru untuk memahami afiksasi. Pembelajaran afiksasi dari keseluruhan aspek kebahasaan yang ada di SMA kelas X sebesar 20%.

Materi afiksasi di SMA kelas X terdapat dalam KD 3.2 yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi. Kebahasaan yang digunakan dalam menulis laporan hasil observasi salah satunya adalah penggunaan afiksasi. Afiksasi merupakan aspek kebahasaan yang dipelajari siswa kelas X dalam menulis serta menganalisis laporan hasil observasi.

Afiksasi merupakan aspek bahasa yang penting dalam pembelajaran bahasa. Pemahaman tentang afiks diperlukan dalam tulisan. Jika tidak memahami penggunaan afiks akan menyebabkan kesalahan dalam penulisan afiks. Kesalahan dalam penulisan afiks dapat menimbulkan kebingungan dalam memahami maksud dari sebuah kata yang dituliskan. Penulisan afiks penting untuk diperhatikan agar tulisan sesuai dengan pedoman dan kaidah yang berlaku serta dapat memperoleh pemahaman yang baik terhadap tulisan tersebut.

Oleh karena itu, peneliti memilih “Afiksasi dalam Wacana Politik Koran Riau Pos dan Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA Kelas X (Kajian Fungsi dan Makna)” sebagai judul penelitian. Penelitian ini membahas jenis dan fungsi afiks yang digunakan dalam koran Riau Pos serta pemanfaatan afiksasi sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA kelas X.

## B. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan arti istilah yang terkandung dalam judul skripsi:

### 1. Afiksasi

Afiksasi merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada sebuah kata atau bentuk dasar dan mengubah makna gramatikalnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Wacana Politik

Wacana Politik merupakan salah satu kolom yang terdapat dalam koran yang berisikan berita seputar politik.

## 3. Koran

Koran merupakan lembaran-lembaran kertas yang bertulis informasi atau berita yang terbit setiap hari dan memiliki beberapa kolom.

### C. Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis dan fungsi afiks yang digunakan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022?
2. Bagaimana pemanfaatan afiksasi dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas X?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi jenis dan fungsi afiks yang digunakan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* Edisi 1-7 Januari 2022.
- b. Mengidentifikasi pemanfaatan afiksasi dalam wacana Politik koran *Riau Pos* Edisi 1-7 Januari 2022 terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas X.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoretis, yaitu untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan kajian linguistik, tentang afiksasi dalam wacana politik pada koran *Riau Pos* Edisi 1-7 Januari 2022.
- b. Manfaat praktis, yaitu sebagai penambah wawasan bagi peneliti tentang penggunaan afiksasi, terutama dalam wacana politik pada koran *Riau Pos* Edisi 1-7 Januari 2022.

## E. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penyusunan penelitian ini, peneliti membagi penulisan penelitian ini dalam lima bab. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Penegasan Istilah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan Laporan

### BAB II: TINJAUAN TEORETIS

- A. Kajian Teoretis
  1. Pengertian Afiksasi
  2. Jenis-Jenis Afiks
  3. Fungsi Afiksasi
  4. Afiksasi dalam Pembelajaran
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berpikir

### BAB III: METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Metode Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Instrumen Penelitian
- E. Teknik Analisis Data

### BAB IV: PEMBAHASAN

### BAB V: PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN TEORETIS

### A. Kajian Teoretis

#### 1. Afiksasi

Menurut Ramlan (2001: 55) Afiks adalah suatu gramatikal terikat yang di dalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata atau pokok kata baru. Kridalaksana dalam N.M. Dhanawaty et al (2017: 58) juga berpendapat bahwa afiks merupakan bentuk terikat yang bila ditambahkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya.

Afiks merupakan bentuk morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah kata dasar sehingga membentuk kata yang memiliki makna gramatikal berbeda. Proses pengimbuhan pada suatu kata dasar dapat dilakukan diawal, ditengah, diakhir serta diawal dan diakhir kata yang diimbuhkan.

Menurut Chaer (2014: 177) afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Afiksasi adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem terikat, yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Verhaar (2010: 107) juga berpendapat bahwa afiksasi adalah pengimbuhan afiks.

Afiksasi menurut N.M. Dhanawaty et al (2017: 58) adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkan. Selanjutnya menurut Alek (2018: 63) afiksasi adalah proses penambahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkan. Proses ini dapat bersifat inflektif dan dapat pula bersifat derivatif. Bersifat inflektif apabila afiksasi ini tidak

mengubah kelas kata. Sebaliknya bersifat derivatif apabila hasil afiksasi mengubah kelas kata.

Afiksasi merupakan suatu atau sebuah proses pembubuhan afiks atau bentuk dasar sehingga membentuk kata baru dan mengubah makna gramatikalnya. Proses afiksasi juga disebut sebagai proses pengimbuhan pada sebuah kata atau bentuk dasar. Afiks adalah morfem terikat yang diimbuhi pada kata dasar. Jadi afiksasi merupakan suatu proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks atau morfem terikat pada sebuah kata dasar sehingga makna gramatikal dari kata tersebut mengalami perubahan.

## 2. Jenis-Jenis Afiks

Verhaar (2010: 107) dan Chaer (2015: 27) membedakan afiksasi ke dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Prefiksasi
- b. Konfiksasi
- c. Sufiksasi
- d. Infiksasi

Berkenaan dengan jenis afiks di atas perlu peneliti jabarkan jenis-jenis afiks sebagai berikut:

### a. Prefiks

Menurut Chaer (2014: 178) prefiks merupakan afiks yang diimbuhan di depan bentuk dasar, contohnya *me-* pada kata *menghibur*. N.M. Dhanawaty et al (2017: 59) juga berpendapat bahwa prefiks ialah afiks yang diimbuhan di awal bentuk dasar. Prefiks menurut Alek (2018: 63) yaitu afiks yang letaknya di muka bentuk dasar.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa prefiks merupakan pengimbuhan atau pembubuhan afiks pada bentuk dasar yang dilakukan di awal. Artinya afiks yang dibubuhkan berada

atau diletakkan di depan kata atau bentuk dasar. Bentuk Prefiks yaitu seperti: *ber-*, *di-*, *me-*, *ter-*, *se-*, *ter-*.

b. Infiks

Menurut Chaer (2014: 178) infiks merupakan afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar. Senada dengan Chaer, Alek (2018: 63) berpendapat bahwa infiks adalah afiks yang diimbuhkan di dalam bentuk dasar. N.M. Dhanawaty et al (2017: 59) juga menyatakan bahwa infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar.

Infiks merupakan pembubuhan afiks pada bentuk dasar yang dilakukan di tengah atau di dalam. Afiks dibubuhkan di tengah dari bentuk dasar atau kata. Misalnya *-el-* pada kata *telunjuk* dan *-er-* pada kata *seruling*.

c. Sufiks

Menurut Chaer (2014: 178) sufiks merupakan afiks yang diimbuhkan di akhir bentuk dasar. Contohnya, dalam bahasa Indonesia sufiks *-an* pada kata *bagian*, dan sufiks *-kan* pada kata *bagikan*.

Senada dengan Chaer, Sitorus (2019: 299) berpendapat bahwa sufiks merupakan jenis afiksasi yang terjadi dalam bahasa dengan cara menambahkan afiks di akhir kata. Sufiks dalam bahasa Indonesia yang dikenal yaitu *-i*, *-kan*, *-an*, *-wan*.

Sufiks adalah pembentukan kata dengan proses pembubuhan afiks pada akhir bentuk dasar. Setiap sufiks yang dibubuhkan pada bentuk dasar akan menghasilkan makna yang berbeda.

d. Konfiks

Menurut Chaer (2014: 179) konfiks afiks yang berupa morfem terbagi, yang bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar, dan bagian yang kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Contohnya konfiks *per-/an* pada kata *pertemuan*, konfiks *ber-/an* pada kata *berciuman*.

Alek (2018: 63) konfiks adalah satu afiks dengan satu makna gramatikal, sedangkan kombinasi afiks bukanlah satu afiks, dan

berkemungkinan mengungkapkan beberapa makna gramatikal. Dalam bahasa Indonesia setidaknya terdapat empat konfiks, yaitu *ke/-an*, *pen-/-an*, *per-/-an*, dan *ber-/-an*. Konfiks-konfiks ini misalnya melekat pada kata *pengiriman*, *persahabatan*, *berhalangan*.

Konfiks merupakan proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks pada awal dan akhir bentuk dasar. Maksudnya konfiks adalah proses afiksasi yang dilakukan dengan memberi afiks pada bentuk dasar di kanan dan di kiri dari bentuk dasar.

### 3. Fungsi Afiks

Afiks memiliki fungsi dalam pembentukan kata. Menurut Ramlan (2001: 106) fungsi afiks secara umum ada 2 yaitu fungsi gramatikal dan fungsi semantik. Fungsi gramatikal merupakan fungsi yang berhubungan dengan ketatabahasaan. Sedangkan fungsi semantik yaitu fungsi yang berhubungan dengan makna atau menyatakan suatu makna kata berafiks.

Afiks dalam fungsi gramatikal memiliki fungsi sebagai pembentuk kata nominal maupun sebagai pembentuk kata verbal. Contohnya kata “makan” yang merupakan kata kerja (verbal) ketika diberi afiks *-an* maka kata yang terbentuk adalah “makanan” yang merupakan kata benda. Sehingga fungsi gramatikal sufiks *-an* pada kata “makanan” adalah sebagai pembentuk kata nominal.

Berbeda dengan fungsi gramatikal, fungsi semantik berhubungan dengan makna sehingga disebut dengan makna. Berikut ini penjelasan tentang fungsi dan makna afiks.

#### a. Afiks *meN-*

Menurut Ramlan (2001: 107) afik *meN-* hanya memiliki satu fungsi yaitu sebagai pembentuk kata verbal. Karena semua afiks *meN-* termasuk golongan kata verbal.

Makna yang dihasilkan dari pembubuhan afiks *meN-* pada bentuk dasar menurut Ramlan (2001: 110-112) adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apabila bentuk dasarnya berupa pokok kata, afiks *meN-* menyatakan makna ‘suatu perbuatan yang aktif lagi transitif’, maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh pelaku yang menduduki fungsi subjek dan lagi menuntut adanya objek. Contohnya terdapat pada kata *mengambil, menulis, mencetak, mengakui* dan lainnya.
- 2) Apabila bentuk dasarnya berupa kata sifat, afiks *meN-* menyatakan makna ‘menjadi seperti keadaan yang tersebut pada bentuk dasarnya’ atau menyatakan makna ‘proses’. Contohnya *melebar, meluas, membeku, membaik, menguning* dan sebagainya.
- 3) Apabila bentuk dasarnya berupa kata nomina, afiks *meN-* menyatakan berbagai makna seperti ‘memakai apa yang tersebut pada bentuk dasar, berlaku atau menjadi seperti apa yang tersebut pada bentuk dasar, menuju ke tempat yang tersebut pada bentuk dasar, membuat apa yang tersebut pada bentuk dasar, dan lainnya lagi’ dapat dirangkum dalam satu makna yaitu melakukan tindakan berhubung dengan apa yang tersebut pada bentuk dasar. Contohnya:
 

Menepi : ‘menuju ke tepi’  
 Merokok : ‘menghisap rokok’  
 Membatu : ‘menjadi seperti batu’
- 4) Pada kata *mengantuk* dan *menyendiri* afiks *meN-* menyatakan makna ‘dalam keadaan’, atau boleh juga dikatakan menyatakan makna ‘statif’.

b. Afiks *ber-*

Afiks *ber-* memiliki fungsi gramatikal yaitu sebagai pembentuk kata verbal. Adapun Menurut Ramlan (2001: 114) makna yang dihasilkan dari pembubuhan afiks dengan bentuk dasarnya adalah sebagai berikut.

- 1) Menyatakan makna ‘suatu perbuatan yang aktif’, ialah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menduduki fungsi subjek. Makna

ini pada umumnya terdapat pada kata berafiks *ber-* yang bentuk dasarnya berupa pokok kata dan kata kerja, misalnya pada kata *bernyanyi*, *berdagang*, *bermain*, dan sebagainya.

- 2) Apabila bentuk dasar kata-kata berafik *ber-* merupakan kata sifat maka makna yang dinyatakan adalah ‘dalam keadaan’ atau statif, contohnya *berbahagia*, *bergembira*, dan *bersedih*.
- 3) Apabila bentuk dasarnya kata bilangan afiks *ber-* menyatakan makna ‘kumpulan yang terdiri dari jumlah yang tersebut pada bentuk dasar’, kecuali pada kata *bersatu* yang menyatakan makna ‘menjadi satu’. Contohnya kata *berdua* menyatakan makna ‘kumpulan yang terdiri dari dua’.
- 4) Apabila bentuk dasarnya kata nominal, afiks *ber-* mempunyai berbagai kemungkinan makna yaitu ‘memakai apa yang apa yang tersebut pada bentuk dasar, mengendarai apa yang tersebut pada bentuk dasar, mengeluarkan apa yang tersebut pada bentuk dasar, mengadakan apa yang tersebut pada bentuk dasar, mengusahakan apa yang tersebut pada bentuk dasar’ sehingga dapat dirangkum dalam satu makna ‘melakukan perbuatan berhubungan dengan apa yang tersebut pada bentuk dasar’. Contohnya *berbaju* menyatakan makna ‘memakai baju’, *bersuara* menyatakan makna ‘mengeluarkan suara’. Selain itu afiks *ber-* juga menyatakan makna ‘mempunyai apa yang tersebut pada bentuk dasar’. Contohnya *berumah* menyatakan makna ‘mempunyai rumah’

c. Afiks *di-*

Afiks *di-* hanya memiliki satu fungsi yaitu membentuk kata kerja pasif. Selanjutnya afiks *di-* menyatakan makna ‘suatu perbuatan yang pasif. Contohnya *dibangun*, *diambil*, dan sebagainya.

d. Afiks *ter-*

Afiks *ter-* memiliki fungsi membentuk kata kerja pasif, kata kerja intransitif, kata sifat, dan kata nominal. Contohnya *terdengar*, *tertudur*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *tertinggi*. Selanjutnya menurut Ramlan (2001: 121-123) makna yang dihasilkan dari pembubuhan afiks *ter-* adalah sebagai berikut.

1) Menyatakan ‘aspek perfektif’

Contoh: Dengan demikian, kerajaan Mataram yang sudah sangat jauh surutnya itu kini *terbagi* menjadi empat buah kerajaan, yakni Yogyakarta, Pakualaman, Surakarta, dan Mangkunegaran.

Maknanya dari kata *terbagi* pada kalimat tersebut adalah ‘sudah dibagi’, atau menyatakan ‘aspek perfektif’.

2) Menyatakan makna ‘ketidaksengajaan’

Contoh: *terpijak, terbawa, terjahit, tersinggung*, dan sebagainya.

3) Menyatakan makna ‘ketiba-tibaan’

Contoh: *terbangun, terperosok, teringat*, dan sebagainya.

4) Menyatakan makna ‘kemungkinan’.

Afiks *ter-* yang menyatakan makna ‘kemungkinan’ pada umumnya didahului kata negatif *tidak* atau *tak*. Contohnya *tidak ternilai*: ‘tidak dapat dinilai’ memiliki makna ‘kemungkinan’.

5) Menyatakan makna paling apabila bentuk dasarnya berupa kata sifat. Contoh: *tertinggi* memiliki makna ‘paling tinggi’.

6) Dalam lingkungan pengadilan terdapat beberapa istilah berupa kata berafiks *ter-*, yaitu *terdakwa, tertuduh, terhukum*, dan *tersangka*. Kata-kata tersebut merupakan kata nominal.

e. Afiks *peN-*

Menurut Ramlan (2001: 125) afik *peN-* hanya memiliki satu fungsi yaitu membentuk kata nominal. Selanjutnya Ramlan (2001: 127) menyatakan makna afiks *peN-* adalah sebagai berikut.

1) Menyatakan makna ‘yang (pekerjaannya) melakukan perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar’ atau ‘agentif’, apabila bentuk dasarnya berupa pokok kata. Contoh: *pembaca, pelukis, pencipta, pencukur*, dan masih banyak lagi.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyatakan makna ‘alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar’. Contohnya *penjahit, pengangkut, pembeli, pencegah*, dan sebagainya.
  - 3) Menyatakan makna ‘yang memiliki sifat yang tersebut pada bentuk dasarnya’, apabila bentuk dasarnya berupa kata sifat. Contohnya *pemalas, periang, pendiam, penyayang*, dan sebagainya.
  - 4) Apabila bentuk dasarnya kata sifat, afiks *peN-* menyatakan makna ‘menyebabkan adanya sifat yang tersebut pada bentuk dasar’. Contoh: *pendingin, perusak, penyakit*, dan sebagainya.
  - 5) Apabila bentuk dasarnya kata nominal, afiks *peN-* menyatakan makna ‘yang (pekerjaannya) melakukan perbuatan berhubung dengan benda yang tersebut pada bentuk dasarnya. Contoh kata *penyair* memiliki makna ‘yang (pekerjaannya) mencipta syair.
- f. Afiks *pe-*
- Afiks *pe-* berfungsi sebagai pembentuk kata nominal, dan menyatakan makna ‘yang biasa/pekerjaannya/gemar melakukan pekerjaan yang tersebut pada bentuk dasar’. Contoh *petani* memiliki makna ‘yang biasa/pekerjaannya/gemar bertani’. Selanjutnya pada kata *pesuruh, petatar, dan petugas* afiks *pe-* menyatakan makna ‘orang yang pekerjaannya) di...’.
- g. Afiks *per-*
- Afiks *per-* memiliki fungsi sebagai pembentuk kata nominal dan pembentuk pokok kata. Afiks yang berfungsi sebagai pembentuk kata nominal termasuk afiks yang tidak produktif. Afiks ini hanya terdapat pada kata *pelajar* dan *pertapa*. Afiks *per-* hanya mempunyai satu makna, yaitu menyatakan ‘kausatif’. Apabila bentuk dasarnya berupa kata sifat, kausatif itu berarti ‘membuat jadi lebih daripada apa yang tersebut pada bentuk dasar’; apabila bentuk dasarnya berupa kata bilangan, kausatif itu berarti ‘membuat jadi apa yang tersebut pada bentuk dasarnya’, dan apabila bentuk dasarnya berupa kata nominal,

kausatif itu berarti ‘membuat jadi atau menganggap sebagai apa yang tersebut pada bentuk dasar’. Contoh: *perbesar, perdua, peristeri, perkuda, pertuan*, dan *perbudak*.

h. Afiks *se-*

Afiks *se-* melekat pada bentuk dasar yang berupa kata nominal, kata sifat dan kata verbal. Ada juga yang melekat pada golongan kata tambah misalnya kata *sebelum, sesudah, dan setelah*. Menurut Ramlan (2001: 136) afiks *se-* mempunyai makna sebagai berikut.

1) Menyatakan makna ‘satu’

Contoh: *serombongan, sebuah, sehari, sekarang* dan sebagainya.

2) Menyatakan makna ‘seluruh’

Contohnya *sedunia, se-Indonesia*, dan sebagainya.

3) Menyatakan makna ‘sama, seperti’

Contoh: *sehebat, semanis, sepandai*, dan sebagainya.

4) Menyatakan makna ‘setelah’

Contoh: *sesampainya, sepulangku, kembalinya, seberangkatku*.

i. Afiks *ke-*

Afiks *ke-* berfungsi sebagai pembentuk kata nominal dan pembentuk pokok kata. Makna yang dinyatakan oleh afiks *ke-* menurut Ramlan (2001: 139) ada dua yaitu sebagai berikut.

1) Menyatakan kumpulan yang terdiri dari jumlah yang tersebut pada bentuk dasar. Contoh *kedua* (orang) menyatakan makna ‘kumpulan yang terdiri dari dua orang’.

2) Menyatakan urutan

Contoh: (pegawai) *kedua* menyatakan makna ‘urutan’.

j. Afiks *para-*

Afiks *para-* selalu melekat pada bentuk dasar yang termasuk golongan kata nominal insani. Makna yang dinyatakan afiks *para-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya satu, yaitu ‘banyak’. Contoh: *para pemuda* menyatakan makna ‘pemuda-pemuda’.

k. Afiks *-kan*

Afiks *-kan* berfungsi membentuk pokok kata. Menurut Ramlan (2001: 143) afiks *-kan* mempunyai beberapa makna sebagai berikut.

- 1) Menyatakan makna ‘benefaktif’, maksudnya perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar dilakukan untuk orang lain. Contoh *membacakan* menyatakan makna ‘membaca (...) untuk orang lain’.
- 2) Menyatakan makna ‘kausatif’. Makna ini digolongkan menjadi empat yaitu:
  - a) Menyebabkan (...) melakukan perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar. Contoh: *mendudukan* menyatakan makna ‘menyebabkan (...) duduk’.
  - b) Menyebabkan (...) menjadi seperti yang tersebut pada bentuk dasar. Makna ini timbul akibat pertemuan afiks *-kan* dengan bentuk dasar yang berupa kata sifat. Contoh *meluaskan* menyatakan makna ‘menyebabkan (...) jadi luas’.
  - c) Menyebabkan (...) jadi atau menganggap (...) sebagai apa yang tersebut pada bentuk dasar. Contoh *mendewakan* ‘menganggap (...) dewa’.
  - d) Membawa/memasukkan (...) ke tempat yang tersebut pada bentuk dasar. Contoh *memenjarakan* menyatakan makna ‘memasukkan (...) ke penjara’.

l. Afiks *-i*

Afiks *-i* berfungsi sebagai pembentuk pokok kata. Menurut Ramlan (2001: 149) afiks *-i* mempunyai beberapa makna sebagai berikut.

- 1) Menyatakan makna ‘perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar itu dilakukan berulang-ulang’. Contoh pada kata *memukuli* menyatakan makna berulang-ulang memukul.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyatakan makna ‘memberi apa yang tersebut pada bentuk dasar pada...’. Contoh pada kata *menggarami* menyatakan makna memberi garam.
- 3) Menyatakan makna ‘kausatif’  
Contoh: *membasahi, mengotori, memanasi*, dan sebagainya

#### m. Afiks –an

Afiks –an memiliki fungsi sebagai pembentuk kata nominal. Makna yang dinyatakan afiks –an menurut Ramlan (2001: 154) adalah sebagai berikut.

- 1) Menyatakan ‘sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar’. *Sesuatu* itu dapat berupa hasil perbuatan, alat, atau sesuatu yang biasa dikenai perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar. Contoh *cucian* menyatakan makna ‘hasil mencuci’ atau ‘sesuatu yang biasa dikenai perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar’.
- 2) Menyatakan makna ‘tiap-tiap’, contoh *bulanan* menyatakan makna ‘tiap-tiap bulan’.
- 3) Menyatakan makna ‘satuan yang terdiri dari apa yang tersebut pada bentuk dasar’. Contoh: *meteran, literan, puluhan*, dan sebagainya.
- 4) Menyatakan makna ‘beberapa’, contoh kata *ribuan* menyatakan makna ‘beberapa ribu’.
- 5) Menyatakan makna ‘sekitar’.afiks –an, contoh *tahun 90-an* menyatakan makna ‘sekitar tahun 90’.

#### n. Afiks –wan

Menurut Ramlan (2001: 157) afiks –wan hanya memiliki satu fungsi yaitu pembentuk kata nominal. Selain itu, Ramlan juga memaparkan makna yang dinyatakan afiks –wan yaitu sebagai berikut.

- 1) Menyatakan makna ‘orang yang ahli dalam hal yang tersebut pada bentuk dasar, dan tugasnya berhubungan dengan hal yang tersebut

pada bentuk dasar'. Makna ini terdapat pada afiks *-wan* yang melekat pada bentuk dasar yang termasuk golongan kata nominal. Contoh pada kata *negarawan* makna yang dinyatakan 'orang yang ahli dalam kenegaraan dan tugasnya berhubungan dengan masalah kenegaraan'

- 2) Menyatakan makna 'orang yang memiliki sifat yang tersebut pada bentuk dasar,. Makna ini terdapat pada afiks *-wan* yang melekat pada bentuk dasar yang termasuk golongan kata sifat. Contoh pada kata *sosiawan* menyatakan makna 'orang yang bersifat sosial'.

o. Afiks *ke-an*

Afiks *ke-an* memiliki fungsi sebagai pembentuk kata nominal dan pembentuk kata verbal. Menurut Ramlan (2001: 159) ada beberapa makna yang dihasilkan akibat pertemuan afiks *ke-an* yaitu sebagai berikut.

- 1) Menyatakan makna 'suatu abstraksi' atau 'hal', baik abstraksi dari suatu perbuatan maupun dari suatu sifat atau keadaan. Contoh pada kata *kebaikan* menyatakan makna 'hal baik.
- 2) Menyatakan makna 'hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang tersebut pada bentuk dasar'. Contoh (masalah) *keduniaan* menyatakan makna 'hal-hal yang berhubungan dengan masalah dunia'.
- 3) Menyatakan makna 'dapat dikenai perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar' atau dengan kata lain menyatakan makna 'dapat di...'. Contoh *kelihatan* menyatakan makna 'dapat dilihat'.
- 4) Menyatakan makna 'dalam keadaan tertimpa akibat perbuatan, keadaan, atau hal yang tersebut pada bentuk dasar'. Contoh *kehujan* 'dalam keadaan tertimpa hujan'.
- 5) Menyatakan makna 'tempat' atau 'daerah'. Contoh *kepresidenan* menyatakan makna 'tempat presiden'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



p. Afiks *peN-an*

Afiks *peN-an* memiliki satu fungsi yaitu sebagai pembentuk kata nominal. Makna yang dinyatakan oleh afiks *peN-an* menurut Ramlan (2001: 163) adalah sebagai berikut.

- 1) Menyatakan makna 'hal melakukan perbuatan yang tersebut pada kata yang sejalan'. Contoh pada kata *penulisan* menyatakan makna 'hal menulis'.
- 2) Menyatakan makna 'cara melakukan perbuatan yang tersebut pada kata yang sejalan'. Contoh *penyajian* menyatakan makna 'cara menyajikan'.
- 3) Menyatakan makna 'hasil perbuatan yang tersebut pada kata yang sejalan', atau menyatakan 'apa-apa yang di...'. Contoh *pendengaran* menyatakan makna 'hasil usaha mendengarkan' atau 'apa-apa yang didengar'.
- 4) Menyatakan makna 'alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang tersebut pada kata yang sejalan'.

Contoh: *penglihatan* orang tua itu sudah agak kabur.

Kalimat tersebut menyatakan makna 'alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang tersebut pada kata yang sejalan', yaitu 'alat untuk melihat'.

- 5) Menyatakan makna 'tempat melakukan perbuatan yang tersebut pada kata yang sejalan'. Contoh *pengadilan* menyatakan makna 'tempat mengadili'.

q. Afiks *per-an*

Afiks *per-an* berfungsi sebagai pembentuk kata nominal. Menurut Ramlan (2001: 169) akibat pertemuan afiks *per-an* dengan bentuk dasar, afiks *per-an* menyatakan berbagai makna sebagai berikut.

- 1) Menyatakan makna 'perihal apa yang tersebut pada bentuk dasar'.  
Contoh *pergedungan* menyatakan makna 'perihal gedung'.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyatakan makna ‘hal’ atau ‘hasil’ apabila kata berafiks *per-an* itu sejalan dengan kata kerja bentuk *ber-(an)* atau *memper- (-kan,-i)*. Contoh *persahabatan* menyatakan makna ‘hal atau hasil bersahabat’.
- 3) Menyatakan makna ‘tempat’ adalah ‘tempat melakukan perbuatan yang tersebut pada kata yang sejalan’. Contoh *peristirahatan* menyatakan makna ‘tempat beristirahat’.
- 4) Menyatakan makna ‘daerah’, adalah ‘daerah yang berupa atau terdiri dari apa yang tersebut pada bentuk dasar’. Contoh *perkampungan* menyatakan makna ‘daerah yang berupa atau terdiri dari kampung’; ‘daerah kampung’.
- 5) Menyatakan makna ‘berbagai-bagai’. Contoh *persyaratan* menyatakan makna ‘berbagai-bagai syarat’.

#### r. Afiks *ber-an*

Afiks *ber-an* memiliki satu fungsi yaitu sebagai pembentuk kata kerja. Ramlan (2001: 173) menyatakan bahwa afiks *ber-an* memiliki tiga makna yaitu sebagai berikut.

- 1) Menyatakan makna bahwa ‘perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar dilakukan oleh banyak pelaku’. Contoh *berdatangan* menyatakan makna ‘(banyak pelaku) datang’.
- 2) Menyatakan makna bahwa ‘perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar dilakukan berulang-ulang’. Contoh pada kata *berloncatan* menyatakan makna ‘meloncat berkali-kali’.
- 3) Menyatakan makna ‘saling’. Contoh pada kata *bersentuhan* yang menyatakan makna ‘saling menyentuh’.

#### s. Afiks *se-nya*

Afiks *se-nya* memiliki fungsi sebagai pembentuk kata keterangan. Menurut Ramlan (2001: 175) afiks *se-nya* menyatakan makna ‘tingkat yang paling tinggi yang dapat dicapai’ atau lazim disebut ‘superlatif’.

Contoh pada kata *sepenuh-penuhnya* menyatakan makna ‘tingkat penuh yang paling tinggi yang dapat dicapai’.

#### 4. Afiksasi dalam Pembelajaran

Afiksasi dalam Pembelajaran Siddik dalam Pane dan Dasopang (2017: 337) menyatakan bahwa Pembelajaran merupakan suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan di dalam kelas yang melibatkan guru, siswa, dan media pembelajaran. Pembelajaran memiliki tujuan yang hendak dicapai. Menurut Ananda (2019: 67) tujuan pembelajaran berkaitan erat dengan hasil belajar yang akan mengarahkan kepada sasaran yang akan dicapai siswa yaitu dalam bentuk pengetahuan, sikap dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran berkaitan erat dengan hasil yang dicapai oleh peserta didik, baik dari segi pengetahuan dan pemahaman terhadap materi yang diajarkan maupun dari segi sikap dan prakteknya. Pembelajaran di dalam kelas atau sekolah tidak akan lepas dari kurikulum.

Kurikulum menurut Masykur (2019: 16) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Kurikulum selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kurikulum yang dikembangkan baru-baru ini adalah kurikulum 2013.

Baderiah (2018: 12) memaparkan bahwa kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Kurikulum 2013 saat ini digunakan di sekolah-sekolah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran tidak dapat

dilepaskan, sebab dalam melakukan pembelajaran harus memperhatikan kurikulum yang digunakan.

Pembelajaran bahasa Indonesia juga harus memperhatikan kurikulum. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 dengan melihat kompetensi dasar yang harus diperoleh oleh peserta didik. Mata pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA kelas X sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan salah satunya membahas tentang kebahasaan yaitu afiksasi.

Afiksasi merupakan salah satu materi yang dipelajari di SMA Kelas X semester 1. Pembelajaran afiksasi terdapat pada KD 3.2 yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi. Materi menyusun laporan observasi yang dipelajari di kelas X ini membahas afiksasi sebagai salah satu aspek kebahasaannya. Siswa diminta untuk memahami afiksasi atau proses pembentukan kata. Karena itu penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan ajar bagi siswa untuk memahami afiksasi, contoh-contoh afiksasi serta fungsi afiksasi.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Renaldi Lutfi Putra (2021) tentang “Analisis Proses Afiksasi pada Artikel Kelapa Sawit Mencari Jalan Tengah”. Penelitian ini mendeskripsikan atau menganalisis pengertian dan jenis-jenis afiksasi dan juga mendeskripsikan atau menganalisis proses afiksasi pada artikel kelapa sawit mencari jalan tengah dalam koran Kompas edisi: hari Selasa, 22 Mei 2018. Hasil penelitian ini yaitu ditemukan sebanyak 8 prefiks, 13 infiks, 25 sufiks, 10 konfiks dan 10 kombinasi afiks serta analisis maknanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada subjek penelitiannya. Putra melakukan penelitian pada artikel “Kelapa Sawit Mencari Jalan Tengah”, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022. Persamaan penelitian yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh Putra dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji afiksasi dan jenis afiks.

2. Amma Khoirotul Bariyah, Agus Darmuki, dan Joko Setiyono “Analisis Afiksasi Pada Kolom Jati Diri di Surat Kabar Jawa Pos Edisi 6 Januari - 4 Februari 2021 dan Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMA”. Hasil dari penelitian ini yaitu: bentuk afiksasi pembentuk verba dalam kolom Jati Diri di surat kabar Jawa Pos ditemukan sebanyak 71 Prefiks pembentuk verba, 14 Konfiks pembentuk verba, dan 49 Klofiks pembentuk verba, dan yang lebih dominan dari ketiga bentuk afiksasi adalah Prefiks pembentuk verba. Hasil penelitian kedua yaitu afiksasi adalah salah satu proses morfologi digunakan untuk bahan pengajaran agar siswa mampu dengan mudah mengidentifikasikan, mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan bentuk afiksasi dalam salah satu surat kabar Jawa pos tepatnya pada kolom Jati Diri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada subjek penelitiannya. Bariyah dkk melakukan penelitian pada surat kabar “Jawa Pos” edisi 6 Januari - 4 Februari 2021”, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bariyah, Darmuki, dan Setiyono dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji afiksasi.
3. Riska Herawati, Dase Erwin Juansah, dan Sundawati Tisnasari (2019) tentang “Analisis Afiksasi dalam Kata-Kata Mutiara pada Caption di Media Sosial Instagram dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMP”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 20 caption di instagram terdapat 87 data afiks yang ditemukan dalam kata-kata mutiara pada caption di media sosial instagram meliputi, 31 buah prefiks, 18 buah sufiks, 4 buah infiks, 16 buah konfiks, dan 18 buah klofiks. Data afiks yang memiliki frekuensi kemunculan paling banyak, yaitu prefiks sebanyak 31 buah, sedangkan afiks yang memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit, yaitu infiks sebanyak 4 buah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada subjek

penelitiannya. Herawati dkk melakukan penelitian pada caption di media sosial instagram, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Putra dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji afiksasi dan jenis afiks.

4. Firna Putri Ananda (2020), “Afiksasi Dalam Wacana Politik Di Koran Jawa Pos Edisi Jumat 1 November 2019”. Hasil penelitian ini adalah didapatkan tiga proses perubahan kata yaitu prefiks, sufiks, dan konfiks, dari tujuh proses afiksasi dan ditemukan 20 prefiks, 7 sufiks, dan 20 konfiks. Perbedaan penelitian Ananda dengan skripsi ini adalah pada subjek penelitiannya, Ananda meneliti di Koran Jawa Pos Edisi Jumat 1 November 2019 sedangkan pada skripsi ini meneliti pada koran *Riau Pos* Edisi 1-7 Januari 2022. Perbedaan selanjutnya adalah pada kajiannya, skripsi ini mengkaji fungsi dan makna dari afiksasi sedangkan penelitian Ananda tidak. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji afiksasi pada koran.

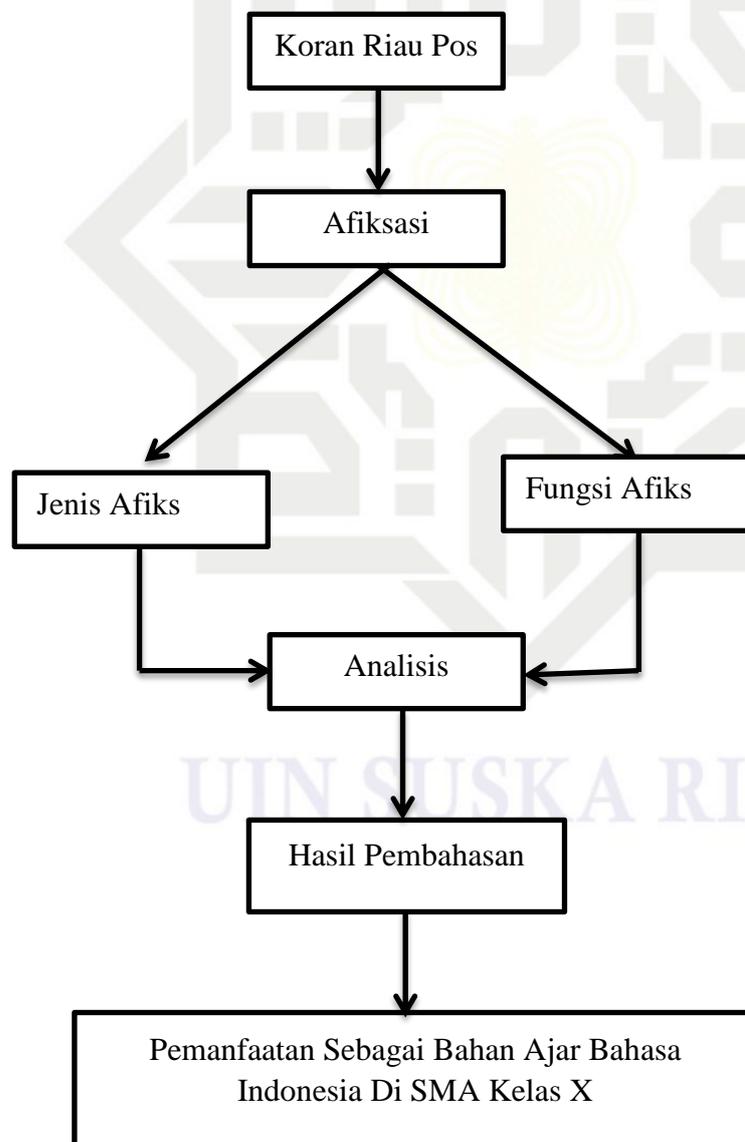
5. Dita Yuniar, Dewi Herlina Sugiarti, dan Uah Maspuroh (2022) “Analisis Penggunaan Afiksasi pada Berita Hardnews di Media Daring Kompas.com”. Hasil penelitian ini adalah ditemukan bentuk bentuk afiks yaitu prefiks, sufiks dan konfiks. (1) membentuk verba, baik aktif maupun pasif, (2) membentuk nomina, (3) membentuk adjektiva, (4) membentuk adverbial. Fungsi afiks yang lebih dominan dalam penelitian ini adalah membentuk kata verba, baik aktif maupun pasif dan membentuk nomina, dan makna yang dimiliki berupa (1) melakukan kegiatan, (2) menyatakan bilangan, (3) menyatakan keadaan, (4) menyatakan peristiwa, (5) menyatakan memiliki sifat, (6) menyatakan perbuatan, (7) membuat jadi lebih menambah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuniar dkk dengan skripsi ini adalah pada subjek penelitiannya, penelitian Yuniar dkk dilakukan pada berita *Hardnews* di Media Daring *Kompas.com* sedangkan pada skripsi ini penelitiannya dilakukan pada wacana Politik pada koran

*Riau Pos* Edisi 1-7 Januari 2022. Persamaan penelitian dengan skripsi ini adalah pada kajiannya yaitu sama-sama mengkaji penggunaan afiksasi.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir memuat pernyataan yang dapat digunakan dalam menentukan beberapa perencanaan yang berkorelasi di dalam penelitian dan menimbulkan hal-hal yang berhubungan dengan peneliti. Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada bagan 2.1 di bawah ini.

**Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir**



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Fadli (2021: 50) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memfokuskan pada suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material sehingga lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan menguraikan data dan tidak dijabarkan dalam bentuk angka statistik.

### B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 pada wacana Politik. Koran itu terbit setiap hari, namun pada hari Minggu tidak memuat wacana Politik sehingga pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 tidak terdapat data. Berita yang diteliti berjumlah 26 berita yang memuat afiks.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Widodo (2019: 75) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelusuran dokumen. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 dalam wacana Politik.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik catat. Menurut Azwardi (2018: 103) metode simak adalah cara pengumpulan data melalui menyimak penggunaan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Teknik catat menurut Azwardi (2018: 103) adalah teknik

yang digunakan dalam penelitian ketika menerapkan metode simak. Bentuk dari teknik catat yaitu mencatat data-data yang menggunakan afiks.

Adapun langkah kerja yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan sebagai sumber data berupa tulisan yang ada pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 dalam wacana Politik
2. Menyimak data berupa koran *Riau Pos* Edisi 1-7 Januari 2022 untuk menemukan jenis afiks.
3. Mencatat data-data yang menggunakan afiks.
4. Mengelompokkan data-data sesuai jenis afiks.

#### D. Instrumen Penelitian

Menurut Djaali dalam Ismawati (2016:82) instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian dapat memudahkan dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa tabel pengumpulan data sebagai berikut.

**Tabel 3. 1 Instrumen Penelitian**

No	Tanggal Edisi	Judul	Data	Bentuk Afiks
1				
2				
3				
4				
Dst.				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan metode agih dengan teknik lesap dan teknik ganti. Menurut Sudaryanto (2015: 18) metode agih adalah suatu metode analisis data yang alat penentunya bagian dari bahasa yang bersangkutan. Alat penentu dalam metode agih, berupa bagian atau unsur dari bahasa objek sasaran penelitian itu sendiri, seperti kata, fungsi sintaksis, dan klausa.

Metode agih memiliki beberapa macam teknik, dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik lesap dan teknik ganti. Sudaryanto (2015: 43) menyatakan bahwa teknik lesap merupakan teknik analisis data yang dilaksanakan dengan melepasakan, melepaskan, menghilangkan, menghapuskan, mengurangi unsur tertentu satuan lingual yang bersangkutan. Lebih lanjut, Sudaryanto (2015: 49) menjelaskan teknik lesap adalah teknik analisis yang berupa penghilangan atau pelepasan unsur satuan lingual data itu akan menghasilkan tuturan berbentuk ABC, ABD, ABD, ACD, atau BCD bila tuturan semula adalah ABCD. Unsur yang dilesapkan merupakan unsur yang menjadi pokok perhatian dalam analisis. Sudaryanto (2015: 43) menyatakan bahwa teknik ganti dilaksanakan dengan menggantikan unsur tertentu satuan lingual yang bersangkutan dengan “unsur” tertentu yang lain diluar satuan lingual yang bersangkutan.

Adapun langkah kerja yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi data berdasarkan jenis afiksasi.
2. Mengklasifikasikan jenis afiksasi dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* Edisi 1-7 Januari 2022.
3. Menganalisis jenis dan fungsi afiksasi dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* Edisi 1-7 Januari 2022. Analisis dilakukan dengan melepasakan atau mengganti afiks pada kata-kata yang berafiks.
4. Melakukan pengecekan kembali terhadap hasil yang dianalisis.
5. Membuat simpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyajikan hasil analisis tentang jenis dan fungsi afiksasi dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* Edisi 1-7 Januari 2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Dari analisis dan pembahasan afiksasi dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat tiga jenis afiks yang digunakan dalam wacana Politik pada koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022, yaitu prefiks, sufiks dan konfiks dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1490 afiks. Prefiks merupakan pembubuhan afiks di awal bentuk dasar, sufiks merupakan pembubuhan afiks di akhir bentuk dasar, konfiks merupakan pembubuhan afiks di awal dan akhir pada bentuk dasar. Penggunaan prefiks yang peneliti temukan sebanyak 663, dengan rincian: 212 prefiks *MeN-*, 119 prefiks *Ber-*, 61 prefiks *Di-*, 123 prefiks *Ter-*, 8 prefiks *Pe-*, 66 prefiks *PeN-*, 4 prefiks *Ke-*, 59 prefiks *Se-*, dan 11 prefiks *para*. Sufiks yang ditemukan dalam koran *Riau Pos* ini sebanyak 101, dengan rincian: 92 sufiks *-an*, 7 sufiks *-kan*, dan 2 sufiks *-wan*. Serta penggunaan konfiks sebanyak 726 dengan rincian: 206 konfiks *MeN-kan*, 72 konfiks *MeN-i*, 14 konfiks *Ber-an*, 84 konfiks *di-kan*, 14 konfiks *di-i*, 5 konfiks *ter-kan*, 1 konfiks *ter-i*, 111 konfiks *PeN-an*, 63 konfiks *Per-an*, 139 konfiks *Ke-an*, dan 15 konfiks *se-nya*. Fungsi penggunaan afiks pada setiap jenis afiks tidak sama. Fungsi afiks yang ditemukan adalah sebagai pembentuk kata kerja, pembentuk kata benda, pembentuk kata sifat, pembentuk kata kerja pasif, pembentuk kata kerja aktif transitif, pembentuk kata numeralia, dan pembentuk kata keterangan. Afiks juga menyatakan makna yang berbeda, makna yang dinyatakan oleh sebuah kata berafiks dengan kata yang afiksnya dilesapkan dan juga dengan afiks yang berbeda tidak sama. Makna dari setiap kata yang memiliki afiks juga ditentukan oleh konteks kalimat.

2. Pemanfaatan afiksasi dalam Wacana Politik Pada Koran *Riau Pos* edisi 1-7 Januari 2022 ini adalah sebagai bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas X. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia pada KD 3.2 yaitu Menganalisis Isi dan Aspek Kebahasaan dari Minimal Dua Teks Laporan Hasil Observasi. Materi pelajaran dari KD 3.2 ini memiliki kaitan dengan hasil penelitian ini sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran.

### B. Saran

Berdasarkan ulasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Bagi peneliti lainnya, dapat melakukan penelitian afiksasi pada sumber lainya, seperti pada media sosial atau sumber lainya yang memuat lebih banyak afiks yang beragam.
2. Bagi guru dan siswa, dapat menggunakan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia untuk menambah pemahaman terhadap materi afiksasi.
3. Bagi pembaca, dengan penelitian ini dapat mengetahui afiksasi, jenis afiks, fungsi afiks serta makna yang dinyatakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alek. (2018). *Linguistik Umum*. Jakarta: Erlangga.
- Ananda, Afiat. (2022). “Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau”. dalam *Riau Pos*, 7 Januari 2022.
- Ananda, F. P. (2020). Afiksasi dalam Wacana Politik di Koran Jawa Pos Edisi Jumat 1 November 2019. *Jurnal Disastri: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(1), 9-17.
- Ananda, R., & Amiruddin, A. (2019). *Perencanaan Pembelajaran*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Azwardi (ed.). (2018). *Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Baderiah, B. (2018). *Pengembangan Kurikulum*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Bariyah, A. K. (2021). Analisis Afiksasi Pada Kolom Jati Diri di Surat Kabar Jawa Pos Edisi 6 Januari-4 Februari 2021 dan Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sma. *Eduutama*.
- Chaer, Abdul. (2014). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . (2015). *Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dhanawaty, Ni Made, Made Sri Satyawati, dan Ni Putu N. Widarsini. (2017). *Pengantar Linguistik Umum*. Bali: Pustaka Larasan.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fauzan, M. R. (2017). Analisis Penggunaan Afiks Bahasa Indonesia Dalam Status Blackberry Messenger Mahasiswa Kelas C Angkatan 2012 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 2(2).

- Herawati, R., Juansah, D. E., & Tisnasari, S. (2019). Analisis Afiksasi dalam Kata-Kata Mutiara Pada Caption di Media Sosial Instagram dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. *Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(1), 45-50.
- Ismawati, Esti. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa & Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Jannah, M. (2020). Afiksasi (Prefiks dan Sufiks) dalam Kolom Ekonomi Bisnis di Koran Jawa Pos Edisi Kamis 14 November 2019. *Jurnal Disastri (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 2(1), 18-25.
- Masykur, R. (2019). *Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum*. Bandar Lampung: Aura.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Pratama, Heroik. (2022). "Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel". dalam *Riau Pos*, 3 Januari 2022.
- Putra, R. L. (2021). Analisis Proses Afiksasi pada Artikel Kelapa Sawit Mencari Jalan Tengah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 3196-3203.
- Ramlan, M. (2001). *Ilmu Bahasa Indonesia Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: C.V. Karyono
- Riau Pos*. (2022). "Charly ST12 Jadi Kader PAN". dalam *Riau Pos*, 5 Januari 2022.
- \_\_\_\_\_. (2022). "DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM". dalam *Riau Pos*, 5 Januari 2022.
- \_\_\_\_\_. (2022). "DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri". dalam *Riau Pos*, 5 Januari 2022.
- \_\_\_\_\_. (2022). "Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel". dalam *Riau Pos*, 7 Januari 2022.
- \_\_\_\_\_. (2022). "ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan". dalam *Riau Pos*, 1 Januari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

— (2022). “Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA”. dalam *Riau Pos*, 6 Januari 2022.

— (2022). “Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina”. dalam *Riau Pos*, 6 Januari 2022.

— (2022). “Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi”. dalam *Riau Pos*, 7 Januari 2022.

— (2022). “KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan”. dalam *Riau Pos*, 6 Januari 2022.

— (2022). “Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik”. dalam *Riau Pos*, 5 Januari 2022.

— (2022). “Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani”. dalam *Riau Pos*, 1 Januari 2022.

— (2022). “Margarito Soroti Permohonan JR Presidential *Threshold* Nol Persen”. dalam *Riau Pos*, 1 Januari 2022.

— (2022). “MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024”. dalam *Riau Pos*, 4 Januari 2022.

— (2022). “Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat”. dalam *Riau Pos*, 1 Januari 2022.

— (2022). “Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas”. dalam *Riau Pos*, 4 Januari 2022.

— (2022). “Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi”. dalam *Riau Pos*, 5 Januari 2022.

— (2022). “PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh”. dalam *Riau Pos*, 4 Januari 2022.

— (2022). “Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak”. dalam *Riau Pos*, 4 Januari 2022.

— (2022). “Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS”. dalam *Riau Pos*, 5 Januari 2022.

- . (2022). “Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju”. dalam *Riau Pos*, 6 Januari 2022.
- . (2022). “Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta”. dalam *Riau Pos*, 4 Januari 2022.
- . (2022). “Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir”. dalam *Riau Pos*, 6 Januari 2022.
- . (2022). “Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementerian”. dalam *Riau Pos*, 3 Januari 2022.
- . (2022). “Tokoh Cenderung Lebih Kuat”. dalam *Riau Pos*, 3 Januari 2022.
- Sitorus, Jonter Pandapotan. (2019). *Mengenal Tata Bahasa Indonesia*. Malang: Eternity Fisher Media.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Verhaar, J.W.M. (2010). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widodo. (2019). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: Rajawali Pers.
- Yuniar, D., Sugiarti, D. H., & Maspuroh, U. (2022). Analisis Penggunaan Afiksasi pada Berita Hardnews di Media Daring Kompas. com. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1126-1133.

TABEL KUMPULAN AFIKS DALAM KOLOM POLITIKA DI KORAN RIAU POS EDISI 1-7 JANUARI 2022

No	Tanggal Edisi	Judul	Data	Bentuk Afiks
1	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan <i>menuju</i> 2022, ada beberapa catatan yang perlu pemerintah cermati terkait pandemi Covid-19	MeN-
2	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	<i>Menurut</i> Herzaky, banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pandemi selama dua tahun ini.	MeN-
3	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	Jangan <i>menunggu</i> korban berjatuhan.	MeN-
4	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	Jangan kemudian <i>membuat</i> kebijakan serba tanggung.	MeN-
5	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	Hampir 1,5 tahun rakyat bingung dan menghadapi kesulitan luar biasa, dari terancam nyawa karena Covid-19, dan kemudian karena kondisi ekonomi <i>memburuk</i> .	MeN-
6	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	Herzaky menuturkan agar pemerintah lebih terbuka dalam <i>menerima</i> masukan dan kritikan terkait kebijakan yang diambil.	MeN-
7	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	Bagaimana agar dampak pandemi ini tidak terlalu besar, dan <i>menelan</i> banyak korban rakyat Indonesia?," ungkapnya.	MeN-
8	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	"Jangan kemudian ketika situasi <i>memburuk</i> dan mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak, baru pemerintah mau mendengarkan.	MeN-
9	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	Sudah ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia yang <i>menjadi</i> korban, baru pemerintah berubah," tuturnya	MeN-
10	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	Herzaky juga <i>meminta</i> agar pandemi ini tidak dijadikan ladang bisnis.	MeN-
11	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	Nyawa rakyat ini, jangan sampai godaan rupiah atau dolar <i>membuat</i> pemerintah hilang fokus," tegasnya	MeN-
12	01-Jan-22	Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat	<i>Menurut</i> Herzaky, para pejabat terkait sebaiknya menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi.	MeN-

13	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, para pejabat terkait sebaiknya <i>menjauh</i> dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi.	MeN-
14	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	"Ujung-ujungnya akan semakin <i>menghambat</i> kita dalam menangani pandemi ini, dan pandemi-pandemi ke depannya,"ujarnya.	MeN-
15	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi <i>menilai</i> , selama setahun terakhir, masih kurangnya komunikasi publik dari Kemenhan ini.	MeN-
16	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Karena banyak yang <i>mengira</i> itu adalah wajib militer.	MeN-
17	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi <i>menilai</i> Kemenhan di bawah Prabowo Subianto masih belum transparan ke publik.	MeN-
18	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) <i>membahas</i> rencana kerja Kemhan tahun 2021 beserta dukungan anggarannya.	MeN-
19	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Termasuk juga dorongan untuk <i>menjadi</i> capres di 2024.	MeN-
20	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Sehingga <i>menurut</i> Fahmi, Prabowo tidak perlu memikirkan mengenai Pilpres 2024.	MeN-
21	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Artinya catatan kinerja akan <i>menjadi</i> tolak ukur bagi masyarakat untuk melihat apakah layak untuk jadi calon pemimpin atau tidak.	MeN-
22	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Artinya catatan kinerja akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk <i>melihat</i> apakah layak untuk jadi calon pemimpin atau tidak.	MeN-

23	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Yakni <i>membentuk</i> cadangan logistik strategis nasional.	MeN-
24	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Kemenhan hanya <i>mengambil</i> porsi dengan cadangan logistik strategis, jangan semua seluruh food estate.	MeN-
25	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Misalnya saja Prabowo sudah <i>membeli</i> Pesawat Airbus A400M, kapal perang Fregat dari Italia, Maung buatan PT Pindad, Helicopter Bell 412EPI, kapal perang angkut tank AT-8 dan AT-9, dan KRI Golok-688.	MeN-
26	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	<i>Menurut</i> Lestari, tidak kunjung selesainya RUU TPKS ini merupakan sinyal buta nurani dari para pimpinan DPR.	MeN-
27	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Lestari mengatakan, RUU TPKS harus secepatnya disahkan <i>menjadi</i> produk undang-undang.	MeN-
28	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Ini alasan <i>mendasar</i> di balik Deklarasi Universal HAM pada 1948, Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 dan batang tubuh, dan UU Nomor 39 Tahun 1999,"katanya.	MeN-
29	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Anggota Majelis Tinggi Parta Nasdem ini <i>menilai</i> , pimpinan DPR telah abai adanya kasus kekerasan-kekerasan seksual yang terus terjadi.	MeN-
30	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Mengesahkan RUU TPKS adalah tindakan <i>memihak</i> korban, mewujudkan keadilan dan kebenaran,"ungkapnya.	MeN-
31	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Meski begitu, Margarito <i>menilai</i> , permohonan <i>judicial review presidential threshold</i> nol persen tersebut cukup rumit, baik secara teknis maupun konseptual.	MeN-
32	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	<i>Menurut</i> Margarito, secara konseptual, UUD 1945 Pasal 6a ayat (2) menyebutkan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."	MeN-
33	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	"Saya pikir akan ada kesulitan bagaimana hakim MK <i>menerima</i> gugatan dari perseorangan.	MeN-

34	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Saya tidak tahu bagaimana jalan pikiran hakim, tetapi saya <i>menduga</i> hakim MK akan dengan mudah mengesampingkan permohonan-permohonan dalam arti tidak diterima," kata Margarito.	MeN-
35	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Kalau <i>melihat</i> gejala hari ini, Maragrigo menduga pemohon akan berhadapan dengan masalah teknis maupun konsep.	MeN-
36	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Kalau melihat gejala hari ini, Maragrigo <i>menduga</i> pemohon akan berhadapan dengan masalah teknis maupun konsep.	MeN-
37	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Direktur Eksekutif The Republic Institute Sufy Sufyanto mengatakan, sikap pemilih dengan <i>memilih</i> tokoh menunjukkan peningkatan.	MeN-
38	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Ada perilaku pemilih yang bergerak dari <i>memilih</i> partai ideologis ke individu," ujar Sufy dalam paparan survei kemarin (2/1).	MeN-
39	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Dengan kata lain, sebuah partai bisa ditinggal kapan saja jika tokoh-tokoh yang <i>menjadi</i> penopang dalam mengeruk suara pemilih henggang.	MeN-
40	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Dengan kata lain, sebuah partai bisa ditinggal kapan saja jika tokoh-tokoh yang menjadi penopang dalam <i>mengeruk</i> suara pemilih henggang.	MeN-
41	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Untuk itu, dia <i>menduga</i> perebutan tokoh menjelang pileg akan krusial.	MeN-
42	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Untuk itu, dia menduga perebutan tokoh <i>menjelang</i> pileg akan krusial.	MeN-
43	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Bergairah tidak hanya waktu tertentu ( <i>menjelang</i> pemilu)," sarannya.	MeN-
44	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Konsisten kehadiran bisa dilakukan dengan terus <i>menyerap</i> aspirasi hingga aktif melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan.	MeN-
45	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Ketua Bawaslu Sumatera Utara Safrida Rasahan menambahkan, faktor personal calon memang <i>mendominasi</i> pertimbangan pemilih.	MeN-
46	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan, <i>menguat</i> nya personal branding tidak bisa dihindari dalam sistem politik saat ini.	MeN-
47	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Misalnya, karena <i>memilih</i> partai yang tidak sesuai dengan situasi politik di daerah pemilihannya.	MeN-
48	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	<i>Menurut</i> nya, Polri harus menjadi lembaga yang independen.	MeN-

49	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Menurutnya, Polri harus <i>menjadi</i> lembaga yang independen.	MeN-
50	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	"Jika memang pujian tersebut bagian dari strategi mendalami calon seharusnya juga dilakukan secara <i>merata</i> kepada calon- calon yang lain," ujarnya kemarin (2/1).	MeN-
51	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Misalnya dengan <i>menyuruh</i> calon utnuk mengambil profesi lain dan sebagainya.	MeN-
52	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Misalnya dengan menyuruh calon utnuk <i>mengambil</i> profesi lain dan sebagainya.	MeN-
53	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Sementara itu, Bahtiar <i>membantah</i> tudingan keberpihakan.	MeN-
54	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Dia beralih, setiap anggota timsel memiliki cara dan gaya masing-masing dalam <i>menggali</i> informasi, isi pikiran, sikap, dan pandangan setiap bakal calon.	MeN-
55	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Arus gugatan terhadap norma <i>presidential threshold</i> atau ambang batas pencalonan presiden terus <i>mengalir</i> .	MeN-
56	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Semua permohonan <i>menjadi</i> prioritas untuk sesegera mungkin diselesaikan," ujarnya kepada JPG, Senin (3/1).	MeN-
57	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Terkait waktu penyelesaian, Fajar memastikan perkara yang berkaitan langsung dengan agenda ketatanegaraan, seperti tahapan dan jadwal pemilu, akan <i>menjadi</i> perhatian MK.	MeN-
58	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Yang pasti MK akan <i>memproses</i> setiap perkara secara optimal.	MeN-
59	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Faktanya, MK juga pernah <i>mengubah</i> putusannya untuk perkara yang sama.	MeN-
60	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Refly menjelaskan, kondisi faktual Pemilu Presiden (Pilpres 2019) di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik bisa <i>menjadi</i> dasar.	MeN-
61	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Hal itu bisa <i>menjadi</i> alasan bahwa <i>presidential threshold</i> tidak relevan lagi.	MeN-

62	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Dari aspek konstitusi, pihaknya meyakini bahwa norma ambang batas pencalonan presiden <b>melanggar</b> ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang memberi hak partai politik mengusung calon presiden.	MeN-
63	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Dari aspek konstitusi, pihaknya meyakini bahwa norma ambang batas pencalonan presiden melanggar ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang <b>memberi</b> hak partai politik mengusung calon presiden.	MeN-
64	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Dari aspek konstitusi, pihaknya meyakini bahwa norma ambang batas pencalonan presiden melanggar ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang memberi hak partai politik <b>mengusung</b> calon presiden.	MeN-
65	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden potensial mengampustasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan <b>menyeleksi</b> calon pemimpin," ujar pakar hukum tata negara itu.	MeN-
66	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Presiden PKS Ahmad Syaikh mengemukakan, agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) untuk <b>mencabut</b> UU No 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	MeN-
67	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<b>Menurut</b> Syaikh, setelah UU Cipta Kerja disahkan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), banyak terjadi gejala, terutama kalangan buruh.	MeN-
68	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Martri Agoeng menegaskan "Seharusnya hal ini <b>menjadi</b> tanggung jawab negara yang harus diselesaikan," ungkapnya.	MeN-
69	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Keempat, banyaknya permasalahan yang <b>menimpa</b> para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.	MeN-
70	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Harus ada regulasi UU yang mampu memberikan perlindungan secara <b>menyeluruh</b> kepada PMI meliputi dari sebelum keberangkatan, ketika penempatan dan kemudian saat kembali lagi ke tanah air, sehingga PMI merasa tenang dalam bekerja," tuturnya.	MeN-
71	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Harus ada regulasi UU yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI <b>meliputi</b> dari sebelum keberangkatan, ketika penempatan dan kemudian saat kembali lagi ke tanah air, sehingga PMI merasa tenang dalam bekerja," tuturnya.	MeN-

72	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya akan melakukan pengembangan organisasi, di mana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat sendiri di Mabes Polri.	MeN-
73	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Sahroni juga <i>meminta</i> kepada seluruh jajaran kepolisian agar Direktorat ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.	MeN-
74	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Sahroni juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian agar Direktorat ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal demi <i>menekan</i> angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.	MeN-
75	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	"Setelah Pak Kapolri <i>membentuk</i> wadahnya, saya minta kepada seluruh kepolisian agar betul-betul bekerja memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	MeN-
76	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Dewan <i>meminta</i> penataan ruang harus jadi perhatian serius dalam pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN).	MeN-
77	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Jangan sampai tata ruang dan lingkungan <i>menjadi</i> masalah setelah dilakukan pemindahan IKN baru.	MeN-
78	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Anggota panitia khusus (pansus) RUU IKN Guspari Gaus mengatakan, hal itu <i>menjadi</i> perhatian banyak pihak.	MeN-
79	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Sebab, ada sejumlah isu yang <i>menjadi</i> tantangan terkait penataan ruang IKN baru.	MeN-
80	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Mulai struktur tanah, hutan, hingga banjir yang kerap <i>melanda</i> wilayah Kalimantan.	MeN-
81	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	<i>Menurut</i> anggota Komisi II DPR tersebut, semua indikator itu menunjukkan bahwa penataan ruang merupakan isu yang sangat penting.	MeN-
82	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	RUU IKN harus secara komprehensif <i>menjawab</i> persoalan-persoalan itu.	MeN-
83	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	"Sebab, tujuan ibu kota negara bukan hanya 10 atau 20 tahun ke depan, tetapi untuk <i>menjawab</i> tantangan hingga 50 tahun ke depan," paparnya.	MeN-
84	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Pansus telah <i>mengundang</i> para ilmuwan dan ahli untuk memberikan masukan dan saran.	MeN-

85	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	<i>Menurut</i> dia, banjir di Penajem Paser Utara membuat penetapan IKN baru layak dipertanyakan.	MeN-
86	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Menurut dia, banjir di Penajem Paser Utara <i>membuat</i> penetapan IKN baru layak dipertanyakan.	MeN-
87	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	" Pemerintah harus <i>membentuk</i> tim dari multidisiplin untuk mengkaji lokasi yang pas untuk IKN baru," ucapnya.	MeN-
88	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	" Pemerintah harus membentuk tim dari multidisiplin untuk <i>mengkaji</i> lokasi yang pas untuk IKN baru," ucapnya.	MeN-
89	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Sebab <i>menurut</i> pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono, sosok yang harusnya pantas menggantikan Anies adalah figur baru harus memahami karakteristik Jakarta secara utuh dan menyeluruh agar berkesinambungan dengan pemimpin terdahulu.	MeN-
90	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Sebab menurut pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono, sosok yang harusnya pantas menggantikan Anies adalah figur baru harus memahami karakteristik Jakarta secara utuh dan <i>menyeluruh</i> agar berkesinambungan dengan pemimpin terdahulu.	MeN-
91	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Anies Baswedan sebagai pertahanan memiliki peluang besar dan dapat terpilih kembali. Namun, jalan <i>menuju</i> Calon Presiden (Capres) 2024 menurut saya lebih menarik baginya," kata pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono di Jakarta, Senin (3/1).	MeN-
92	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Anies Baswedan sebagai pertahanan memiliki peluang besar dan dapat terpilih kembali. Namun, jalan menuju Calon Presiden (Capres) 2024 <i>menurut</i> saya lebih menarik baginya," kata pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono di Jakarta, Senin (3/1).	MeN-
93	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Anies Baswedan sebagai pertahanan memiliki peluang besar dan dapat terpilih kembali. Namun, jalan menuju Calon Presiden (Capres) 2024 menurut saya lebih <i>menarik</i> baginya," kata pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono di Jakarta, Senin (3/1).	MeN-
94	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Dia <i>melihat</i> , sebaiknya warga Jakarta memberi kepercayaan pada tokoh lokal, sebab kompleksitas Ibu Kota membutuhkan sosok yang langsung <i>running</i> setelah terpilih.	MeN-

95	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Ames di Pilgub Jakarta</b>	Dia melihat, sebaiknya warga Jakarta <i>memberi</i> kepercayaan pada tokoh lokal, sebab kompleksitas Ibu Kota membutuhkan sosok yang langsung <i>running</i> setelah terpilih.	MeN-
96	05-Jan-22	<b>DPK Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Guspari Gaus <i>meminta</i> agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak mengangkat penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri.	MeN-
97	05-Jan-22	<b>DPK Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Jangan sampai Kemendagri <i>menyeret</i> TNI dan Polri mengisi jabatan yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh Kemendagri dari orang dalam," ujar Guspari kepada wartawan, Selasa (4/1)	MeN-
98	05-Jan-22	<b>DPK Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Jangan sampai Kemendagri menyeret TNI dan Polri <i>mengisi</i> jabatan yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh Kemendagri dari orang dalam," ujar Guspari kepada wartawan, Selasa (4/1)	MeN-
99	05-Jan-22	<b>DPK Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) <i>meminta</i> agar Kemendagri mengisi kekosongan kepala daerah diisi oleh aparatur sipil negara (ASN).	MeN-
100	05-Jan-22	<b>DPK Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar Kemendagri <i>mengisi</i> kekosongan kepala daerah diisi oleh aparatur sipil negara (ASN).	MeN-
101	05-Jan-22	<b>DPK Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Adapun, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat (10) dijelaskan penjabat gubernur yang <i>mengisi</i> kekosongan jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.	MeN-
102	05-Jan-22	<b>DPK Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sementara pada ayat (11) dijelaskan untuk <i>mengisi</i> kekosongan bupati/wali kota diangkat penjabat bupati/wali kota dari jabatan pimpinan tinggi pratama.	MeN-
103	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	<i>Merespons</i> itu, dia menegaskan budaya kerja di BRIN tidak seperti birokrasi di lembaga pemerintah lainnya.	MeN-
104	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Jadi, BRIN secara kelembagaan hanya akan menanyakan proyek penelitian pada awal tahun, kemudian <i>menagih</i> capaiannya pada akhir tahun seperti apa.	MeN-
105	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Dia menyebut BRIN sudah memberikan kesempatan kepada para periset honorer eijkman untuk masuk ke BRIN.	MeN-

106	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Handoko mengatakan sejatinya penggabungan Eijkman ke BRIN <i>membawa</i> dampak positif.	MeN-
107	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Di antaranya adalah <i>membuat</i> lembaga itu menjadi resmi.	MeN-
108	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Di antaranya adalah membuat lembaga itu <i>menjadi</i> resmi.	MeN-
109	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Sebab, selama ini LBME <i>menjadi</i> unit proyek dari Kemenrisek.	MeN-
110	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Akibatnya, pegawai-pegawai di Eijkman tidak bisa <i>menjadi</i> ASN.	MeN-
111	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Begitu pun dengan periset yang sudah ASN, tidak bisa <i>menjadi</i> di ASN periset penuh.	MeN-
112	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	"Saat saya kepala LIPI, ada yang <i>menghadap</i> ke saya," katanya.	MeN-
113	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Periset itu <i>meminta</i> supaya bisa menjadi ASN penuh.	MeN-
114	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Periset itu meminta supaya bisa <i>menjadi</i> ASN penuh.	MeN-
115	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ketua DPR RI Puan Maharani <i>merespons</i> keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong percepatan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).	MeN-
116	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ketua DPR RI Puan Maharani merespons keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang <i>mendorong</i> percepatan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).	MeN-
117	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami <i>mengapresiasi</i> Presiden Jokowi yang menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sudah mendesak untuk segera ditangani dengan hadirnya RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR," ujar Puan kepada wartawan, Selasa (4/1).	MeN-

118	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	"Kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sudah <i>mendesak</i> untuk segera ditangani dengan hadirnya RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR," ujar Puan kepada wartawan, Selasa (4/1).	MeN-
119	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Puan <i>menyambut</i> langsung Presiden Jokowi yang telah meminta Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang disiapkan oleh DPR.	MeN-
120	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Puan menyambut langsung Presiden Jokowi yang telah <i>meminta</i> Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang disiapkan oleh DPR.	MeN-
121	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Puan <i>meminta</i> pihak pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memperhatikan.	MeN-
122	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Puan meminta pihak pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan pelaksanaan pembahasan <i>mengingat</i> RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memperhatikan.	MeN-
123	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Sebelumnya, Presiden Joko Widodo <i>mendorong</i> langkah-langkah percepatan pengesahan RUU TPKS yang hingga kini masih berproses.	MeN-
124	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Jokowi <i>mengaku</i> telah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga untuk berkoordinasi dengan DPR terkait RUU tersebut.	MeN-
125	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Di samping itu, kepala negara juga telah <i>meminta</i> kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI.	MeN-

126	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU IPKS</b>	Dengan demikian, proses pembahasan bersama nanti lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum, serta <i>menjamin</i> perlindungan bagi korban kekerasan seksual.	MeN-
127	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Nantinya, Charly akan <i>menjadi</i> caleg di Pileg 2024 dari Dapil Jabar VIII yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.	MeN-
128	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Charly mengakui bahwa kepindahannya ke PAN adalah perintah Zulkifli Hasan agar dia bisa <i>menjadi</i> caleg di pileg 2024 mendatang.	MeN-
129	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Afriansyah <i>menilai</i> alasan artis-artis tersebut bergabung ke PBB karena melihat partai tersebut masih bersih dari korupsi.	MeN-
130	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Tak hanya itu, mereka juga <i>melihat</i> sosok Yusril sebagai seorang tokoh negarawan yang dimiliki Indonesia saat ini.	MeN-
131	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	"Saya sangat <i>mengapresiasi</i> komitmen jaksa agung yang bertujuan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.	MeN-
132	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Kita juga wajib <i>memonitor</i> terus langkah-langkah penyelesaian yang diambil, agar kita tahu progresnya," ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (4/1).	MeN-
133	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Karenanya, Sahroni <i>mendorong</i> terbentuknya kerja sama antara kejaksaan dan lembaga HAM lainnya.	MeN-
134	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Penuntasan HAM berat <i>menjadi</i> salah satu dari sembilan rencana program prioritas Kejaksaan di 2022.	MeN-
135	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru Leonardus Lelo <i>mengajak</i> semua pihak untuk menghormati keputusan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.	MeN-
136	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Ketum AHY pasti sudah <i>mengambil</i> berbagai pertimbangan dan masukan sebelum mengambil keputusan.	MeN-
137	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Ketum AHY pasti sudah mengambil berbagai pertimbangan dan masukan sebelum <i>mengambil</i> keputusan.	MeN-
138	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Saya yakin beliau <i>mengambil</i> keputusan terbaik bagi masa depan Demokrat di NTT," ujar Lelo dalam keterangannya, Selasa (4/1).	MeN-

139	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Pelakunya orang luar dan sudah kami laporkan pada polisi karena <i>merusak</i> atribut partai kami," tegas Lelo.	MeN-
140	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Lelo juga berjanji akan segera berkomunikasi dengan ketua DPD sebelumnya, Jefry Riwu Kore (Jeriko) untuk <i>mengajak</i> nya bersama-sama membangun dan membesarkan Partai Demokrat di NTT.	MeN-
141	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Lelo juga berjanji akan segera berkomunikasi dengan ketua DPD sebelumnya, Jefry Riwu Kore (Jeriko) untuk mengajaknya bersama-sama <i>membangun</i> dan membesarkan Partai Demokrat di NTT.	MeN-
142	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Menurut Lelo, AHY berpandangan sudah saatnya Jeriko naik kelas ke panggung politik nasional, dengan <i>melihat</i> prestasi-prestasi politiknya yang panjang selama ini.	MeN-
143	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Beliau tokoh yang sudah makan asam garam di politik lokal maupun nasional, serta sudah menetapkan standar pencapaian yang tinggi, yang <i>menjadi</i> tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa menyamainya atau melampauinya," tuturnya.	MeN-
144	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Karena itu Lelo <i>mengimbau</i> agar para pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat di NTT untuk tetap tenang.	MeN-
145	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Apalagi kalau kita lihat dalam gambar besarnya, pak Jeriko sebenarnya tidak dikalahkan, tapi akan diminta untuk <i>memegang</i> amanah jabatan yang lebih terhormat, sebagai penghargaan atas prestasi beliau selama ini," ujarnya.	MeN-
146	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Pasalnya, Indonesia tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang lebih dulu <i>menggarap</i> bahan kimia yang diperoleh dari bahan bakar fosil tersebut.	MeN-
147	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Adalah <i>membangun</i> petrochemical yang selama ini Indonesia gak punya, itu Thailand punya, Singapura punya, Malaysia punya," ujar Erick dalam satu kesempatan.	MeN-
148	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Tetapi mungkin perlu dihitung secara cermat apakah produk produk itu sekarang kita impor banyak salah satunya metanol itu dibutuhkan industri dalam negeri kita atau memungkinkan untuk <i>memasok</i> pasar luar"" kata Faizol Riza dalam keterangannya, Rabu (5/1).	MeN-

149	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	<b>Menurut</b> politikus PKB itu, langkah Pertamina ini sangat baik, namun perlu melihat keseimbangan dalam bisnis ke depan, karena ekonomi bangsa sat ini terpukul dengan pandemi Covid-19, hingga ada kekhawatiran inflasi akan meningkat.	MeN-
150	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Menurut politikus PKB itu, langkah Pertamina ini sangat baik, namun perlu <b>melihat</b> keseimbangan dalam bisnis ke depan, karena ekonomi bangsa sat ini terpukul dengan pandemi Covid-19, hingga ada kekhawatiran inflasi akan meningkat.	MeN-
151	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Menurut politikus PKB itu, langkah Pertamina ini sangat baik, namun perlu melihat keseimbangan dalam bisnis ke depan, karena ekonomi bangsa sat ini terpukul dengan pandemi Covid-19, hingga ada kekhawatiran inflasi akan <b>meningkat</b> .	MeN-
152	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Terus terang kita perlu <b>melihat</b> keseimbangan dalam bisnis ke depan ekonomi Indonesia kedepan setelah dua tahun lebih kita seluruh bangsa ini mengalami pandemi sektor riil oraktis berhenti dan ada kekhawatiran inflasi akan meningkat," ucapnya.	MeN-
153	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Terus terang kita perlu melihat keseimbangan dalam bisnis ke depan ekonomi Indonesia kedepan setelah dua tahun lebih kita seluruh bangsa ini mengalami pandemi sektor riil oraktis berhenti dan ada kekhawatiran inflasi akan <b>meningkat</b> , " ucapnya.	MeN-
154	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Kalau inflasi <b>meningkat</b> , daya beli masyarakat menurun dan kalau menurun maka produk-produk manufaktur mungkin tidak terbeli juga.	MeN-
155	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Kalau inflasi meningkat, daya beli masyarakat <b>menurun</b> dan kalau menurun maka produk-produk manufaktur mungkin tidak terbeli juga.	MeN-
156	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Kalau inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun dan kalau <b>menurun</b> maka produk-produk manufaktur mungkin tidak terbeli juga.	MeN-
157	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Namun begitu, beberapa partai politik sudah mendeklarasikan untuk <b>mengusung</b> kader, agar bisa maju pada Pilkada,khususnya Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri).	MeN-

158	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Dikatakan dia, untuk keputusan pemberian dukungan, PPP Riau memang tetap harus <i>mendapat</i> restu DPP terlebih dahulu.	MeN-
159	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	"Kami tentu mesti <i>mendapat</i> restu dulu dari pimpinan DPP.	MeN-
160	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Setakat ini, ia <i>mengklaim</i> sudah mendapat dukungan masyarakat, khususnya masyarakat Riau Pesisir.	MeN-
161	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Setakat ini, ia mengklaim sudah <i>mendapat</i> dukungan masyarakat, khususnya masyarakat Riau Pesisir.	MeN-
162	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	"Kita <i>melihat</i> dukungan masyarakat yang memberikan dukungan sepenuhnya, khususnya masyarakat Meranti, Bengkalis.	MeN-
163	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Dalam kegiatan itu PPP Riau turut <i>menggelar</i> sejumlah kegiatan sosial.	MeN-
164	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Bahkan <i>menjelang</i> hari H, PPP Riau juga menggelar beberapa kegiatan sosial.	MeN-
165	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Bahkan menjelang hari H, PPP Riau juga <i>menggelar</i> beberapa kegiatan sosial.	MeN-
166	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani <i>meminta</i> aturan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen bisa dievaluasi.	MeN-
167	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Menurut Netty, adalah hilangnya hak orang tua untuk tetap <i>memilih</i> opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhadap anak-anaknya.	MeN-

168	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Sementara itu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti pun menyampaikan bahwa <i>mendukung</i> hal ini.	MeN-
169	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	"KPAI <i>mendukung</i> hal tersebut, karena sejak awal pembukaan PTM terbatas, KPAI sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar vaksinasi peserta didik dijadikan persyaratan penyelenggaraan PTM, yaitu minimal 70 persen warga sekolah sudah di vaksin," ujar dia dikutip, Rabu (5/1).	MeN-
170	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Retno pun memberikan catatan sebagai dasar kehati-hatian dalam <i>menggelar</i> PTM 100 persen.	MeN-
171	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Perubahan perilaku dalam disiplin 3M yang masih belum maksimal, dan pencapaian vaksinasi anak yang masih rendah harus <i>menjadi</i> perhatian.	MeN-
172	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Untuk indikator kesiapan sekolah yang sudah menyelenggarakan PTM terbatas dengan kategori cukup, baik dan sangat baik <i>mencapai</i> 79,17 persen.	MeN-
173	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Sedangkan sisanya, yaitu kategori kurang dan sangat kurang <i>mencapai</i> 20,83 persen.	MeN-
174	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Artinya, dengan kondisi belum siap, ternyata sekolah tetap <i>menggelar</i> tatap muka.	MeN-
175	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Perhatian selanjutnya adalah pelanggaran protokol kesehatan 3M, seperti masker yang diletakan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air <i>mengalir</i> dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.	MeN-
176	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Ada juga sekolah yang mayoritas siswanya <i>melepas</i> masker saat tiba di sekolah.	MeN-
177	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Saat diwawancarai, anak-anak mengatakan mereka <i>memakai</i> masker saat diperjalanan pergi dan pulang sekolah. Ada pemahaman yang salah terkait fungsi masker yang disamakan dengan helm.	MeN-
178	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Presiden Joko Widodo pun <i>mendorong</i> adanya percepatan pembahasan sehingga RUU tersebut dapat segera disahkan.	MeN-

179	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu <i>menjadi</i> perhatian bersama, utamanya kekerasan seksual pada perempuan," tegas Jokowi kemarin (4/1).	MeN-
180	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Untuk itu, presiden <i>memerintah</i> menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkum HAM) serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR.	MeN-
181	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Di samping itu, kepala negara telah <i>meminta</i> kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM).	MeN-
182	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya <i>menyambut</i> baik pernyataan Presiden Jokowi tersebut.	MeN-
183	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	<i>Menurut</i> dia, saat ini RUU TPKS sudah berada di tangan pimpinan DPR.	MeN-
184	06-Jan-22	Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno beberapa waktu lalu pernah menyatakan keengganannya untuk ikut maju dalam bursa calon presiden dalam Pemilu 2024 <i>mendatang</i> .	MeN-
185	06-Jan-22	Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju	Alasan lain yang <i>membuat</i> Sandiaga Uno layak maju karena selama setahun terakhir, Sandi telah berkeliling Indonesia dan mengunjungi lebih dari 50 desa wisata dan mempromosikan serta memperluas manfaat pariwisata.	MeN-
186	06-Jan-22	Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju	Alasan lain yang membuat Sandiaga Uno layak maju karena selama setahun terakhir, Sandi telah berkeliling Indonesia dan mengunjungi lebih dari 50 desa wisata dan mempromosikan serta <i>memperluas</i> manfaat pariwisata.	MeN-
187	06-Jan-22	Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju	" Kita perlu <i>membangun</i> kembali ekonomi agar lebih kuat, adil, dan lebih setara," kata Mahendra.	MeN-
188	06-Jan-22	Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju	"Lewat adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang <i>menjadi</i> langkah kerja Sandiaga Uno, ekonomi Indonesia segera pulih," ujarnya.	MeN-

189	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Satu di antaranya lewat revitalisasi usaha mikro, kecil, dan <i>menengah</i> (UMKM) yang secara langsung membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi generasi muda.	MeN-
190	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Satu di antaranya lewat revitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang secara langsung <i>membuka</i> peluang usaha dan lapangan kerja bagi generasi muda.	MeN-
191	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Pihaknya berharap siapa pun yang terpilih bisa <i>membawa</i> perbaikan kualitas pemilu ke depan.	MeN-
192	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	"Kami berharap nama-nama ini jika dipilih akan <i>memperkuat</i> kelembagaan KPU dan Bawaslu," imbuhnya.	MeN-
193	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana <i>mengapresiasi</i> kerja timsel yang menuntaskan kerja tepat waktu.	MeN-
194	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Terkait nama-nama yang dipilih, dia <i>menyebut</i> itu kewenangan timsel.	MeN-
195	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Namun, jika dilihat dari segi komposisi, Ihsan <i>menilai</i> cukup baik.	MeN-
196	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	"Ini <i>menjadi</i> modal untuk perbaikan KPU dan Bawaslu ke depan ujarnya.	MeN-
197	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukong Kerja Kapolda Riau</b>	Hal itu disampaikan Agung usai <i>menerima</i> kunjungan Irjen Iqbal bersama rombongan ke DPRD Riau, Kamis (6/1).	MeN-
198	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukong Kerja Kapolda Riau</b>	Saat itu, Agung sebagai Wakil Ketua DPRD Riau turut <i>menyambut</i> kedatangan Iqbal bersama pimpinan DPRD Riau lainnya.	MeN-
199	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukong Kerja Kapolda Riau</b>	<i>Menurut</i> dia, Irjen Iqbal bukan sosok yang asing bagi dirinya.	MeN-
200	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukong Kerja Kapolda Riau</b>	Apalagi saat <i>menjabat</i> Kasat Lantas Poltabes Pekanbaru pada 2000 silam.	MeN-
201	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukong Kerja Kapolda Riau</b>	"Sejak jadi Kasat Lantas <i>mengenal</i> beliau (yang hobi otomotif), hingga mengikuti jejak karir beliau menjadi Kadiv Humas Mabes Polri dan Kapolda NTB.	MeN-

202	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	"Sejak jadi Kasat Lantas mengenal beliau (yang hobi otomotif), hingga mengikuti jejak karir beliau <i>menjadi</i> Kadiv Humas Mabes Polri dan Kapolda NTB.	MeN-
203	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Secara <i>menyeluruh</i> ada puluhan ribu kader yang siap menyukseskan kinerja Polda Riau di bawah kepemimpinan Irjen Iqbal.	MeN-
204	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Demokrat Riau, sambungnya, sangat optimis Polri khususnya pola Riau mampu menangani kasus-kasus yang <i>menjadi</i> atensi publik.	MeN-
205	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	"Kami selaku Wakil Ketua DPRD Riau dan juga Ketua Demokrat Riau yang menaungi 58 anggota DPRD se-Riau siap <i>mendukung</i> dan menyukseskan kerja Kapolda di Bumi Lancang Kuning," tegasnya.	MeN-
206	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Dirinya juga <i>menyambut</i> baik kunjungan silaturahmi yang dilaksanakan kapolda ke berbagai pihak mulai sejak awal menjabat.	MeN-
207	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Dirinya juga menyambut baik kunjungan silaturahmi yang dilaksanakan kapolda ke berbagai pihak mulai sejak awal <i>menjabat</i> .	MeN-
208	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Hal itu <i>menurut</i> Agung membuktikan Irjen Iqbal sangat paham dengan karakteristik budaya Melayu yang menjunjung tinggi nilai silaturahmi.	MeN-
209	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Hal itu menurut Agung membuktikan Irjen Iqbal sangat paham dengan karakteristik budaya Melayu yang <i>menjunjung</i> tinggi nilai silaturahmi.	MeN-
210	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Mereka <i>menjawab</i> keraguan dengan prestasi," ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (6/).	MeN-
211	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Legislator Partai Nasdem ini <i>menyebut</i> bahwa penangkapan ini juga membuktikan kualitas kerja KPK yang baru, di mana mereka bekerja sangat hati-hati.	MeN-
212	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Meski banyak yang meragukan, namun lembaga itu tetap berkomitmen dalam <i>memberantas</i> korupsi, dan hal ini dibuktikan melalui kerja nyatanya.	MeN-
213	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, banyak pelajaran <i>berharga</i> yang bisa dipetik dari pandemi selama dua tahun ini.	Ber-
214	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Seharusnya pemerintah <i>berfokus</i> pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa terhindar dari bencana Covid-19.	Ber-

215	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Seperti yang diingatkan <i>berulang</i> kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia.	Ber-
216	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Seperti yang diingatkan berulang kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih <i>berharga</i> daripada nyawa manusia.	Ber-
217	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky <i>berujar</i> , seharusnya dampak pandemi Covid-19 ini bisa kita lebih minimalisir, jika pemerintah sejak awal terbuka dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan.	Ber-
218	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	"Jangan kemudian ketika situasi memburuk dan mendapatkan kritikan tajam dari <i>berbagai</i> pihak, baru pemerintah mau mendengarkan.	Ber-
219	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Sudah ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia yang menjadi korban, baru pemerintah <i>berubah</i> , " tuturnya	Ber-
220	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Dari dugaan bisnis rapid test, antigen, PCR sampai kemudian sekarang karantina di hotel <i>berbintang</i> .	Ber-
221	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Sebenarnya kita tidak ingin tahu banyak dan terlalu detail tapi setidaknya tidak <i>berarti</i> kemudian semuanya dilakukan dengan tertutup.	Ber-
222	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Jadi orang tidak <i>berprasangka</i> , "katanya.	Ber-
223	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat <i>bersama</i> Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta.	Ber-
224	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Rapat <i>bersama</i> antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2021 beserta dukungan anggarannya.	Ber-
225	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2021 <i>beserta</i> dukungan anggarannya.	Ber-

226	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi juga <i>berpesan</i> agar mantan Danjen Kopassus ini berfokus pada jabatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).	Ber-
227	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi juga berpesan agar mantan Danjen Kopassus ini <i>berfokus</i> pada jabatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).	Ber-
228	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Kalau beliau punya prestasi itu juga kn baik jika kemudian akhirnya ikut <i>berkontestasi</i> di 2024.	Ber-
229	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Kemudian mengenai program <i>Food Estate</i> yang digagas oleh Presiden Jokowi, Fahmi juga <i>berpesan</i> agar Prabowo bertugas sesuai dengan tupoksinya.	Ber-
230	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Kemudian mengenai program <i>Food Estate</i> yang digagas oleh Presiden Jokowi, Fahmi juga berpesan agar Prabowo <i>bertugas</i> sesuai dengan tupoksinya.	Ber-
231	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Pasalnya dia menakutkan tugas Prabowo malah akan <i>berbenturan</i> dengan Kementerian Pertanian (Kementan).	Ber-
232	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi <i>berujar</i> , sudah berjalannya pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.	Ber-
233	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi berujar, sudah <i>berjalan</i> nya pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.	Ber-
234	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Ada beberapa belanja menunjukkan progres mengenai kebutuhan alutsista kita yang sebelumnya tidak <i>berjalan</i> sekarang berjalan.	Ber-
235	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Prinsip moral kini tidak lagi <i>bertaring</i> atas kejahatan dan kebaikan jadi kabur.	Ber-
236	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Ada perilaku pemilih yang <i>bergerak</i> dari memilih partai ideologis ke individu," ujar Sufy dalam paparan survei kemarin (2/1).	Ber-

237	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Situasi <i>berbeda</i> hanya terjadi pada partai-partai non-parlemen, khususnya partai baru.	Ber-
238	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sehingga apabila kehilangan tokoh, itu tidak <i>berdampak</i> signifikan terhadap masa depan partai.	Ber-
239	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	" <i>Bergairah</i> tidak hanya waktu tertentu (menjelang pemilu)," sarannya.	Ber-
240	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Makin <i>berpengaruh</i> nya tokoh- tokoh yang diusung jika dibandingkan dengan parpol itu sendiri merupakan dampak pola pemilihan yang berlaku saat ini.	Ber-
241	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Orang populer, kalau salah pilih parpol sebagai kendaraan politik, belum tentu <i>berhasil</i> ," jelasnya.	Ber-
242	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Karena itu, Polri bisa <i>bekerja</i> dengan independen.	Ber-
243	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Nantinya lanjut Agus, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) <i>berada</i> di bawah kementrian tersebut.	Ber-
244	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga <i>bersifat</i> politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," papar Agus menjelaskan.	Ber-
245	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Meski <i>berlangsung</i> lancar dan kondusif, koalisi masyarakat sipil memberikan catatan atas kinerja tim seleksi (timsel) tersebut.	Ber-
246	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Namun dari hasil pengamatan koalisi masyarakat sipil, ada sejumlah tindakan anggota timsel yang <i>berpotensi</i> mencederai upaya menghasilkan penyelenggara yang baik.	Ber-
247	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Dia <i>berdalih</i> , setiap anggota timsel memiliki cara dan gaya masing-masing dalam menggali informasi, isi pikiran, sikap, dan pandangan setiap bakal calon.	Ber-
248	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Lagi pula, lanjut dia, timsel <i>bekerja</i> secara tim.	Ber-
249	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Mereka tinggal di <i>berbagai</i> negara.	Ber-

250	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Terkait waktu penyelesaian, Fajar memastikan perkara yang <i>berkaitan</i> langsung dengan agenda ketatanegaraan, seperti tahapan dan jadwal pemilu, akan menjadi perhatian MK.	Ber-
251	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Sesuai dan <i>berdasar</i> hukum acara, sesuai dengan dinamika persidangan dan kebutuhan informasi persidangan," imbuhnya.	Ber-
252	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Namun, Fajar mengingatkan, kecepatan penyelesaian perkara tidak hanya <i>bergantung</i> kepada MK.	Ber-
253	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Jadi, ketentuan hukum bisa <i>berubah</i> jika alasan hukumnya berubah," ujar dia.	Ber-
254	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Dalam catatan ini, PKS berpandangan pemerintah belum <i>berpihak</i> kepada buruh.	Ber-
255	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Menurut Syaikh, setelah UU Cipta Kerja disahkan kemudian dinyatakan inkonstitusional <i>bersyarat</i> oleh Mahkamah Konstitusi (MK), banyak terjadi gejala, terutama kalangan buruh.	Ber-
256	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Dan dampaknya sangat <i>berpengaruh</i> dalam kehidupan bernegara, karena hal itu berdampak pada pendapatan dan pertumbuhan ekonomi," kata Martri.	Ber-
257	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Dan dampaknya sangat berpengaruh dalam kehidupan <i>bernegara</i> , karena hal itu berdampak pada pendapatan dan pertumbuhan ekonomi," kata Martri.	Ber-
258	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Dan dampaknya sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara, karena hal itu <i>berdampak</i> pada pendapatan dan pertumbuhan ekonomi," kata Martri.	Ber-
259	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Ketiga</i> , terjadinya penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan disisi lain PHK terjadi dimana-mana serta <i>berdampak</i> pada naiknya angka kemiskinan.	Ber-
260	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Martri Agoeng menjelaskan, banyak masyarakat <i>bekerja</i> keluar negeri bukan karena keinginan, tetapi ada keterpaksaan yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan di dalam negeri yang sangat sedikit, walaupun ada gaji yang ditawarkan tidak layak.	Ber-

261	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Harus ada regulasi UU yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI meliputi dari sebelum keberangkatan, ketika penempatan dan kemudian saat kembali lagi ke tanah air, sehingga PMI merasa tenang dalam <i>bekerja</i> , " tuturnya.	Ber-
262	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Selain itu, layanan juga bisa lebih komprehensif dan melibatkan <i>berbagai</i> elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.	Ber-
263	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	"Setelah Pak Kapolri membentuk wadahnya, saya minta kepada seluruh kepolisian agar betul-betul <i>bekerja</i> memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Ber-
264	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2024 nanti diperkirakan akan <i>berlangsung</i> dinamis.	Ber-
265	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Bagi calon-calon yang <i>berasal</i> di luar Jakarta pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan seluk beluk Jakarta, dan tak jarang melahirkan pandangan yang kurang tepat yang berimbas pada perlambatan kinerja" ujarnya.	Ber-
266	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Bagi calon-calon yang berasal di luar Jakarta pasti membutuhkan waktu untuk <i>beradaptasi</i> dengan seluk beluk Jakarta, dan tak jarang melahirkan pandangan yang kurang tepat yang berimbas pada perlambatan kinerja" ujarnya.	Ber-
267	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Bagi calon-calon yang berasal di luar Jakarta pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan seluk beluk Jakarta, dan tak jarang melahirkan pandangan yang kurang tepat yang <i>berimbas</i> pada perlambatan kinerja" ujarnya.	Ber-
268	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Lebih lanjut, Yusuf juga mengatakan, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria (Ariza) dianggap tokoh yang paling <i>berpeluang</i> mengingat posisinya saat ini sebagai orang nomor dua di Jakarta. Sosok lain juga dianggap layak adalah Silvyana Murni, mantan birokrat dan Ketua Komite 3 DPR-RI dapil Jakarta.	Ber-
269	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sementara TNI dan Polri dilarang untuk ikut dalam <i>berpolitik</i> .	Ber-

270	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Caranya untuk pengisian itu harus sesuai ketentuan peraturan dan <i>berlaku</i> ."	Ber-
271	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Dari 101 kepala daerah masa jabatannya <i>berakhir</i> pada tahun 2022.	Ber-
272	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Adapun, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat (10) dijelaskan penjabat gubernur yang mengisi kekosongan jabatan gubernur <i>berasal</i> dari jabatan pimpinan tinggi madya.	Ber-
273	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Dia mengatakan, memang ada peneliti honorer Eijkman yang keberatan, bahkan tidak mau <i>bergabung</i> dengan BRIN.	Ber-
274	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Namun, Handoko menegaskan tidak mau <i>berpikir</i> ke belakang.	Ber-
275	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan sendiri sudah berkali-kali menyatakan DPR siap bekerja cepat agar RUU TPKS bisa disahkan.	Ber-
276	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ia <i>berharap</i> setiap mekanisme yang berjalan dapat berjalan dengan lancar.	Ber-
277	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ia berharap setiap mekanisme yang berjalan dapat <i>berjalan</i> dengan lancar.	Ber-
278	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	DPR RI memastikan siap <i>bekerja</i> optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah ke depan.	Ber-
279	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami <i>berharap</i> adanya pembahasan yang progresif dari perwakilan pemerintah bersama DPR, agar pengesahan RUU TPKS bisa kita kebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tutur mantan Menko PMK tersebut.	Ber-
280	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami berharap adanya pembahasan yang progresif dari perwakilan pemerintah <i>bersama</i> DPR, agar pengesahan RUU TPKS bisa kita kebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tutur mantan Menko PMK tersebut.	Ber-
281	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami berharap adanya pembahasan yang progresif dari perwakilan pemerintah bersama DPR, agar pengesahan RUU TPKS bisa kita kebut sesuai dengan mekanisme yang <i>berlaku</i> ," tutur mantan Menko PMK tersebut.	Ber-

282	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Ia pun <i>berharap</i> dukungan dari semua elemen bangsa terhadap RUU TPKS agar korban-korban kekerasan seksual dapat lebih mendapatkan jaminan perlindungan sosial dan hukum.	Ber-
283	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	"Hadirnya undang-undang yang <i>berfokus</i> pada korban kekerasan seksual mutlak dibutuhkan.	Ber-
284	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan RUU TPKS yang hingga kini masih <i>berproses</i> .	Ber-
285	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga untuk <i>berkoordinasi</i> dengan DPR terkait RUU tersebut.	Ber-
286	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Dengan demikian, proses pembahasan <i>bersama</i> nanti lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.	Ber-
287	05-Jan-22	Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS	Sehingga dia <i>berharap</i> RUU TPKS ini bisa segera disahkan dan dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air.	Ber-
288	05-Jan-22	Charly ST12 Jadi Kader PAN	" <i>Bersyukur</i> karena ini perintah ketua umum.	Ber-
289	05-Jan-22	Charly ST12 Jadi Kader PAN	Saya siap <i>berupaya</i> maksimal," ujar Charly dalam keterangannya, Selasa (4/1).	Ber-
290	05-Jan-22	Charly ST12 Jadi Kader PAN	Diketahui pada 7 Juni 2021 lalu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer mengatakan bahwa Charly van Houten <i>bersama</i> dengan Andika Mahesa 'Kangen Band' telah bergabung ke partai yang dikepalai oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut.	Ber-
291	05-Jan-22	Charly ST12 Jadi Kader PAN	Diketahui pada 7 Juni 2021 lalu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer mengatakan bahwa Charly van Houten bersama dengan Andika Mahesa 'Kangen Band' telah <i>bergabung</i> ke partai yang dikepalai oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut.	Ber-
292	05-Jan-22	Charly ST12 Jadi Kader PAN	Afriansyah menilai alasan artis-artis tersebut <i>bergabung</i> ke PBB karena melihat partai tersebut masih bersih dari korupsi.	Ber-

293	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	"Saya sangat mengapresiasi komitmen jaksa agung yang <i>bertujuan</i> untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.	Ber-
294	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Lebih jauh, legislator Partai Nasdem ini menuturkan, dalam melaksanakan penuntasan kasus ini, tentunya Kejaksaan Agung akan menghadapi <i>berbagai</i> tantangan dari banyak pihak.	Ber-
295	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Jadi saya dorong kejaksaan agar koordinasi dengan lembaga lain seperti Komnas HAM dan lain-lain agar mereka bisa <i>bekerja</i> sama dengan maksimal.	Ber-
296	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Ketum AHY pasti sudah mengambil <i>berbagai</i> pertimbangan dan masukan sebelum mengambil keputusan.	Ber-
297	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Lelo juga <i>berjanji</i> akan segera berkomunikasi dengan ketua DPD sebelumnya, Jefry Riwu Kore (Jeriko) untuk mengajaknya bersama-sama membangun dan membesarkan Partai Demokrat di NTT.	Ber-
298	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Lelo juga berjanji akan segera <i>berkomunikasi</i> dengan ketua DPD sebelumnya, Jefry Riwu Kore (Jeriko) untuk mengajaknya bersama-sama membangun dan membesarkan Partai Demokrat di NTT.	Ber-
299	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bisnis baru Pertamina itu akan <i>berjalan</i> .	Ber-
300	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Terus terang kita perlu melihat keseimbangan dalam bisnis ke depan ekonomi Indonesia kedepan setelah dua tahun lebih kita seluruh bangsa ini mengalami pandemi sektor riil oraktis <i>berhenti</i> dan ada kekhawatiran inflasi akan meningkat," ucapnya.	Ber-
301	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Namun, lanjut Faizol, langkah Pertamina mengembangkan petrochemical ini akan <i>berjalan</i> baik jika bahan baku produk Pertamina sendiri bisa disimpan dan bisa dimonotaise,hingga tidak mengakibatkan kerugian karena tidak terserap oleh pasar.	Ber-
302	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Anak buah Muhaimin Iskandar ini menyadari betul, Indonesia masih membutuhkan bahan baku obat karena sejauh ini Indonesia masih <i>bergantung</i> pada impor, dan langkah Erick Thohir untuk mengembangkan petrochemical sangat tepat.	Ber-

303	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Adapun sekolah dan madrasah yang dipantau langsung sepanjang tahun 2021 <b>berjumlah</b> 72 sekolah/madrasah dengan rincian 24 (33,80 persen) SMA/MA baik negeri maupun swasta, 11 (15,50 persen) SMK Negeri, 23 (32,40 persen) SMP/MI negeri dan swasta, 13 (18,06 persen) SD/MI negeri dan swasta.	Ber-
304	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Meskipun ketidaksiapan itu diantaranya adalah belum dibuatnya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam <b>berbagai</b> layanan saat PTM terbatas.	Ber-
305	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Perhatian selanjutnya adalah pelanggaran protokol kesehatan 3M, seperti masker yang diletakan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak <b>bermasker</b> saat berada di lingkungan sekolah.	Ber-
306	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Perhatian selanjutnya adalah pelanggaran protokol kesehatan 3M, seperti masker yang diletakan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak <b>bermasker</b> saat <b>berada</b> di lingkungan sekolah.	Ber-
307	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Sejak disiapkan pada 2016, pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) <b>berjalan</b> lambat.	Ber-
308	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian <b>bersama</b> , utamanya kekerasan seksual pada perempuan," tegas Jokowi kemarin (4/1).	Ber-
309	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	"Sejak dalam pembentukan pada 2016, hingga saat ini masih <b>berproses</b> di DPR," lanjutnya.	Ber-
310	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Untuk itu, presiden memerintah menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkum HAM) serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) segera berkoordinasi dan <b>berkonsultasi</b> dengan DPR.	Ber-
311	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Dengan demikian, proses pembahasan <b>bersama</b> nanti bisa lebih cepat.	Ber-

312	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Menurut dia, saat ini RUU TPKS sudah <i>berada</i> di tangan pimpinan DPR.	Ber-
313	06-Jan-22	Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju	Kendati demikian, beberapa pihak masih meyakini bahwa Sandi layak ikut <i>bersaing</i> dalam kontestasi tersebut.	Ber-
314	06-Jan-22	Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju	Alasan lain yang membuat Sandiaga Uno layak maju karena selama setahun terakhir, Sandi telah <i>berkeliling</i> Indonesia dan mengunjungi lebih dari 50 desa wisata dan mempromosikan serta memperluas manfaat pariwisata.	Ber-
315	06-Jan-22	Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju	Alasan lainnya adalah Sandi merupakan orang yang <i>berorientasi</i> pada pemulihan ekonomi nasional.	Ber-
316	07-Jan-22	Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel	Ketua Timsel Juri Ardiantoro mengatakan, nama-nama yang disetorkan merupakan sosok terbaik dari <i>berbagai</i> tes yang digelar.	Ber-
317	07-Jan-22	Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel	"Sudah kami pertimbangkan dari <i>berbagai</i> aspek," ujarnya kemarin.	Ber-
318	07-Jan-22	Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel	Pihaknya <i>berharap</i> siapa pun yang terpilih bisa membawa perbaikan kualitas pemilu ke depan.	Ber-
319	07-Jan-22	Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel	"Kami <i>berharap</i> nama-nama ini jika dipilih akan memperkuat kelembagaan KPU dan Bawaslu," imbuhnya.	Ber-
320	07-Jan-22	Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel	Ada yang <i>berlatar belakang</i> sebagai penyelenggara pemilu, akademisi, hingga penggiat kepemiluan.	Ber-
321	07-Jan-22	Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel	Kemudian, <i>berdasar</i> latar belakang pendidikan, ada berbagai ahli seperti ahli ilmu politik, hukum, hingga kependidikan.	Ber-
322	07-Jan-22	Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel	Kemudian, berdasar latar belakang pendidikan, ada <i>berbagai</i> ahli seperti ahli ilmu politik, hukum, hingga kependidikan.	Ber-
323	07-Jan-22	Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau	Hal itu disampaikan Agung usai menerima kunjungan Irjen Iqbal <i>bersama</i> rombongan ke DPRD Riau, Kamis (6/1).	Ber-
324	07-Jan-22	Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau	Saat itu, Agung sebagai Wakil Ketua DPRD Riau turut menyambut kedatangan Iqbal <i>bersama</i> pimpinan DPRD Riau lainnya.	Ber-
325	07-Jan-22	Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau	Dirinya juga menyambut baik kunjungan silaturahmi yang dilaksanakan kapolda ke <i>berbagai</i> pihak mulai sejak awal menjabat.	Ber-

326	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan OTT terhadap kepala daerah ini menunjukkan bahwa KPK tetap bisa tajam dalam melakukan penangkapan, dan tidak seperti yang ditakutkan <b>berbagai</b> pihak selama ini.	Ber-
327	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	"Beberapa waktu belakangan, kita dengar banyak sekali keraguan-keraguan terhadap kinerja KPK karena <b>berbagai</b> isu yang tengah dihadapinya.	Ber-
328	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Namun penangkapan ini menunjukkan bahwa <b>berbagai</b> kekhawatiran itu tidak terbukti, dan KPK tetap tajam dalam melakukan penangkapan.	Ber-
329	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Legislator Partai Nasdem ini menyebut bahwa penangkapan ini juga membuktikan kualitas kerja KPK yang baru, di mana mereka <b>bekerja</b> sangat hati-hati.	Ber-
330	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Meski banyak yang meragukan, namun lembaga itu tetap <b>berkomitmen</b> dalam memberantas korupsi, dan hal ini dibuktikan melalui kerja nyatanya.	Ber-
331	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Penangkapan ini <b>berkaitan</b> dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.	Ber-
332	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pandemi selama dua tahun ini.	Di-
333	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky menuturkan agar pemerintah lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritikan terkait kebijakan yang <b>diambil</b> .	Di-
334	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Akan timbul ketidakpercayaan publik yang <b>diambil</b> , karena ada satu dua pejabat publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi.	Di-
335	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Kemudian mengenai program <i>Food Estate</i> yang <b>digagas</b> oleh Presiden Jokowi, Fahmi juga berpesan agar Prabowo bertugas sesuai dengan tupoksinya.	Di-
336	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Membiarkan RUU TPKS tak diakomodir pimpinan DPR RI adalah sinyal butanya nurani.	Di-

337	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Maka kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang <i>dikutuk</i> oleh prinsip moral agama, kepercayaan, dan ideologi manapun.	Di-
338	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Saya tidak tahu bagaimana jalan pikiran hakim, tetapi saya menduga hakim MK akan dengan mudah mengesampingkan permohonan-permohonan dalam arti tidak <i>diterima</i> , " kata Margarito.	Di-
339	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Berdasarkan survei dan riset yang dilakukan The Republic Institute, pemilih cenderung mengutamakan faktor tokoh yang <i>diusung</i> dibandingkan institusi partai itu sendiri.	Di-
340	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Karena yang <i>diketahui</i> publik sebatas partainya," imbuhnya.	Di-
341	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Dengan kata lain, sebuah partai bisa <i>ditinggal</i> kapan saja jika tokoh-tokoh yang menjadi penopang dalam mengeruk suara pemilih henggang.	Di-
342	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Penguatan basis kelembagaan partai bisa <i>ditempuh</i> , misalnya, dengan konsisten hadir ditengah masyarakat.	Di-
343	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Paparan survei The Republic Institute tidak <i>dibantah</i> partai politik (parpol).	Di-
344	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Makin berpengaruhnya tokoh- tokoh yang <i>diusung</i> jika dibandingkan dengan parpol itu sendiri merupakan dampak pola pemilihan yang berlaku saat ini.	Di-
345	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Faktanya, kata pria yang akrab <i>disapa</i> Awiek tersebut, ada banyak orang yang punya ketokohan, tetapi gagal lolos.	Di-
346	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	" Polri harus mandiri sebagai alat negara sebagaimana BIN dan TNI," kata Tjahjo <i>dikonfirmasi</i> , Ahad (3/1)	Di-
347	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan <i>dibuat</i> , pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," papar Agus menjelaskan.	Di-
348	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Hal itu terlihat dari pujian Bahtiar pada salah seorang calon yang selama ini <i>dikenal</i> dekat.	Di-
349	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Refly Harun, kuasa hukum pemohon, menyatakan, meski gugatan serupa sudah kerap dilakukan dan <i>ditolak</i> , pihaknya tak patah arang.	Di-
350	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Sebab, pihaknya meyakini, dalam ilmu hukum <i>dikenal</i> prinsip <i>law changes by reasons</i> .	Di-

351	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih <i>didengar</i> dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya.	Di-
352	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih <i>didengar</i> dan <i>dilayani</i> dalam hal pemulihan mentalnya.	Di-
353	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Karena itu, niat memindahkan IKN ke kabupaten tersebut layak <i>ditinjau</i> kembali.	Di-
354	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Lebih lanjut, Yusuf juga mengatakan, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria (Ariza) <i>dianggap</i> tokoh yang paling berpeluang mengingat posisinya saat ini sbagai orang nomor dua di Jakarta. Sosok lain juga dianggap layak adalah Silvyana Murni, mantan birokrat dan Ketua Komite 3 DPR-RI dapil Jakarta.	Di-
355	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sehingga kekosongan jabatan itu harus <i>diisi</i> oleh penjabat gubernur atau bupati dan wali kota hingga 2024.	Di-
356	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Guspari menjelaskan penjabat kepala daerah tidak <i>diambil</i> dari TNI dan Polri.	Di-
357	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sementara TNI dan Polri <i>dilarang</i> untuk ikut dalam berpolitik.	Di-
358	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Bagaimana jabatan politis tidak lagi <i>diisi</i> TNI-Polri tetapi oleh sipil, jadi civil society.	Di-
359	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar Kemendagri mengisi kekosongan kepala daerah <i>diisi</i> oleh aparatur sipil negara (ASN).	Di-
360	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Misalnya saja jabatan gubernur bisa <i>diisi</i> oleh penjabat setingkat Dirjen.	Di-
361	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	<i>Diketahui</i> , ada 101 Kepala Daerah habis masa jabatannya tahun 2022.	Di-
362	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal <i>diisi</i> oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.	Di-
363	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal <i>diisi</i> oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak <i>digelar</i> tahun 2024.	Di-

364	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Adapun, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat (10) <i>dijelaskan</i> penjabat gubernur yang mengisi kekosongan jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.	Di-
365	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sementara pada ayat (11) dijelaskan untuk mengisi kekosongan bupati/wali kota <i>diangkat</i> penjabat bupati/wali kota dari jabatan pimpinan tinggi pratama.	Di-
366	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Yang belum S-3 bisa <i>diberi</i> kesempatan untuk kuliah dahulu.	Di-
367	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memperkenalkan Charly van Houten atau lebih <i>dikenal</i> sebagai Charly ST12 atau Charly Setiaku sebagai kader dan calon anggota legislatif terbaru partai tersebut.	Di-
368	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	<i>Diketahui</i> pada 7 Juni 2021 lalu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer mengatakan bahwa Charly van Houten bersama dengan Andika Mahesa 'Kangen Band' telah bergabung ke partai yang dikepalai oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut.	Di-
369	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, komitmen Jaksa Agung ini perlu terus <i>didukung</i> dan dimonitor pelaksanaannya.	Di-
370	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, komitmen Jaksa Agung ini perlu terus didukung dan <i>dimonitor</i> pelaksanaannya.	Di-
371	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Kita juga wajib memonitor terus langkah-langkah penyelesaian yang <i>diambil</i> , agar kita tahu progresnya," ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (4/1).	Di-
372	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Apalagi kalau kita lihat dalam gambar besarnya, pak Jeriko sebenarnya tidak dikalahkan, tapi akan <i>diminta</i> untuk memegang amanah jabatan yang lebih terhormat, sebagai penghargaan atas prestasi beliau selama ini," ujarnya.	Di-

373	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Pasalnya, Indonesia tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang lebih dulu menggarap bahan kimia yang <i>diproleh</i> dari bahan bakar fosil tersebut.	Di-
374	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Erick juga memastikan, perluasan bisnis Pertamina mampu mengurangi beban Indonesia terhadap baku obat maupun bahan baju-bajuan yang saat ini masih <i>diimpor</i> .	Di-
375	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Tetapi mungkin perlu <i>dihitung</i> secara cermat apakah produk produk itu sekarang kita impor banyak salah satunya metanol itu dibutuhkan industri dalam negeri kita atau memungkinkan untuk memasok pasar luar" kata Faizol Riza dalam keterangannya, Rabu (5/1).	Di-
376	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Nah kalau misalnya produk-produk itu yang disebut sebagai kelanjutan dari bahan baku petrochemical tadi, apakah tepat untuk <i>diproduksi</i> hari ini," tambahnya.	Di-
377	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Kecuali ada strategi lain di mana produksi bahan baku yang merupakan kelanjutan dari bahan baku produk produk pertamina ini bisa <i>disimpan</i> dan bisa di monotaise.	Di-
378	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Tapi sekali lagi mohon <i>ditimbang</i> dengan baik rencana besar ini supaya tidak salah sasaran," ujarnya.	Di-
379	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Di mana, bila situasi memungkinkan pascapemilihan legislatif (Pileg) yang <i>digelar</i> lebih awal, PPP akan mengusungkan calon sendiri untuk Pilgubri 2024.	Di-
380	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Untuk <i>diketahui</i> , DPW PPP Riau melaksanakan perayaan hari lahir PPP ke-49 di Pekanbaru, Rabu (5/1).	Di-
381	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta aturan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen bisa <i>dievaluasi</i> .	Di-
382	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Adapun soal PTM terbatas yang telah <i>dimulai</i> sejak Januari 2021 ini, KPAI juga telah melakukan pemantauan di sejumlah sekolah pada 8 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat , Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.	Di-

383	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Adapun sekolah dan madrasah yang <i>dipantau</i> langsung sepanjang tahun 2021 berjumlah 72 sekolah/madrasah dengan rincian 24 (33,80 persen) SMA/MA baik negeri maupun swasta, 11 (15,50 persen) SMK Negeri, 23 (32,40 persen) SMP/MI negeri dan swasta, 13 (18,06 persen) SD/MI negeri dan swasta.	Di-
384	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Meskipun ketidaksiapan itu diantaranya adalah belum <i>dibuat</i> nya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam berbagai layanan saat PTM terbatas.	Di-
385	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Ketua Umum Sedulur Sandiaga Uno, Mahendra, <i>dikutip</i> dari Antara, memaparkan sejumlah alasan mengapa Sandi layak maju Pilpres 2024.	Di-
386	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	"Sandiaga Uno diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo karena sangat memahami rakyat Indonesia," karena Mahendra melalui keterangan tertulis yang <i>diterima</i> di Jakarta, Rabu (5/1).	Di-
387	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan ketiga adalah Sandi <i>dinilai</i> memiliki sejumlah ide-ide baru program ekonomi yang telah terbukti diterapkannya.	Di-
388	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Terakhir, Sandi <i>dinilai</i> tegas dan cepat dalam menghadapi tantangan.	Di-
389	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Ketua Timsel Juri Ardiantoro mengatakan, nama-nama yang disetorkan merupakan sosok terbaik dari berbagai tes yang <i>digelar</i> .	Di-
390	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	"Kami berharap nama-nama ini jika <i>dipilih</i> akan memperkuat kelembagaan KPU dan Bawaslu," imbuhnya.	Di-
391	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Terkait nama-nama yang <i>dipilih</i> , dia menyebut itu kewenangan timsel.	Di-
392	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Namun, jika <i>dilihat</i> dari segi komposisi, Ihsan menilai cukup baik.	Di-
393	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan menuju 2022, ada beberapa catatan yang perlu pemerintah cermati <i>terkait</i> pandemi Covid-19.	Ter-
394	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Apa yang <i>terjadi</i> di negara lain, seharusnya diantisipasi dengan cepat dan serius.	Ter-

395	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Hampir 1,5 tahun rakyat bingung dan menghadapi kesulitan luar biasa, dari <i>terancam</i> nyawa karena Covid-19, dan kemudian karena kondisi ekonomi memburuk.	Ter-
396	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Seharusnya pemerintah berfokus pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa <i>terhindar</i> dari bencana Covid-19.	Ter-
397	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky menuturkan agar pemerintah lebih <i>terbuka</i> dalam menerima masukan dan kritikan terkait kebijakan yang diambil.	Ter-
398	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky menuturkan agar pemerintah lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritikan <i>terkait</i> kebijakan yang diambil.	Ter-
399	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Bagaimana agar dampak pandemi ini tidak <i>terlalu</i> besar, dan menelan banyak korban rakyat Indonesia?," ungkapnya.	Ter-
400	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky berujar, seharusnya dampak pandemi Covid-19 ini bisa kita lebih minimalis, jika pemerintah sejak awal <i>terbuka</i> dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan.	Ter-
401	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, para pejabat <i>terkait</i> sebaiknya menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi.	Ter-
402	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Akan timbul ketidakpercayaan publik yang diambil, karena ada satu dua pejabat publik yang <i>tersangkut</i> kasus bisnis di seputar pandemi.	Ter-
403	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Direktur Institute for Security and Strategig Studies (ISESS) Khairul Fahmi memberikan catatan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah komando Prabowo Subianto selama satu tahun <i>terakhir</i> .	Ter-
404	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi menilai, selama setahun <i>terakhir</i> , masih kurangnya komunikasi publik dari Kemenhan ini.	Ter-
405	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Sebenarnya kita tidak ingin tahu banyak dan <i>terlalu</i> detail tapi setidaknya tidak berarti kemudian semuanya dilakukan dengan tertutup.	Ter-

406	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Sebenarnya kita tidak ingin tahu banyak dan terlalu detail tapi setidaknya tidak berarti kemudian semuanya dilakukan dengan <i>tertutup</i> .	Ter-
407	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	<i>Termasuk</i> juga dorongan untuk menjadi capres di 2024.	Ter-
408	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Tidak perlu <i>terlalu</i> jauh.	Ter-
409	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Kalau kita catat ada beberapa hal penting pertama terealisasinya konsep Sistem Pertahanan Rakyat semesta sudah mulai <i>terlihat</i> , " ungkapnya.	Ter-
410	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Anggota Majelis Tinggi Parta Nasdem ini menilai, pimpinan DPR telah abai adanya kasus kekerasan-kekerasan seksual yang terus <i>terjadi</i> .	Ter-
411	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, pengajuan permohonan judicial review (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh individu dan sekelompok orang harus dihormati.	Ter-
412	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Meski begitu, Margarito menilai, permohonan <i>judicial review presidential threshold</i> nol persen <i>tersebut</i> cukup rumit, baik secara teknis maupun konseptual.	Ter-
413	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Gejala serupa juga <i>terjadi</i> di partai-partai lainnya.	Ter-
414	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Situasi berbeda hanya <i>terjadi</i> pada partai-partai non-parlemen, khususnya partai baru.	Ter-
415	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Menanggapi survei <i>tersebut</i> , Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, temuan tersebut menunjukkan kelembagaan partai yang rentan.	Ter-
416	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Bergairah tidak hanya waktu <i>tertentu</i> (menjelang pemilu)," sarannya.	Ter-
417	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sebab, sistem politik Indonesia menggunakan model suara <i>terbanyak</i> .	Ter-
418	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Imbasnya sistem suara <i>terbanyak</i> memang menyebabkan personal branding itu penting," ujarnya.	Ter-

419	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Untuk memastikan sosok tersebut <i>terpilih</i> dan duduk di parlemen, masyarakat juga tidak bisa mengesampingkan latar belakang partainya.	Ter-
420	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Untuk memastikan sosok <i>tersebut</i> terpilih dan duduk di parlemen, masyarakat juga tidak bisa mengesampingkan latar belakang partainya.	Ter-
421	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Faktanya, kata pria yang akrab disapa Awiiek <i>tersebut</i> , ada banyak orang yang punya ketokohan, tetapi gagal lolos.	Ter-
422	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menanggapi isu <i>terkait</i> penggabungan Polri di bawah kementrian.	Ter-
423	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Nantinya lanjut Agus, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementrian <i>tersebut</i> .	Ter-
424	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Meski berlangsung lancar dan kondusif, koalisi masyarakat sipil memberikan catatan atas kinerja tim seleksi (timsel) <i>tersebut</i> .	Ter-
425	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Salah satunya adalah tindakan anggota timsel yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bachtiar, yang <i>terindikasi</i> menunjukkan dukungan pada calon tertentu.	Ter-
426	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Salah satunya adalah tindakan anggota timsel yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bachtiar, yang terindikasi menunjukkan dukungan pada calon <i>tertentu</i> .	Ter-
427	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Hal itu <i>terlihat</i> dari pujian Bahtiar pada salah seorang calon yang selama ini dikenal dekat.	Ter-
428	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	"Jika memang pujian <i>tersebut</i> bagian dari strategi mendalami calon seharusnya juga dilakukan secara merata kepada calon- calon yang lain," ujarnya kemarin (2/1).	Ter-
429	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Di sisi lain, timsel juga <i>terkesan</i> menyudutkan beberapa calon.	Ter-
430	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	" Apalagi <i>terdapat</i> pernyataan dapat tidak mengucurkan dana pemilu.	Ter-
431	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Satu sama lain tidak bisa saling mempengaruhi terhadap pilihan <i>tertentu</i> .	Ter-

432	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Hingga kemarin (3/1), <i>tercatat</i> ada enam permohonan yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).	Ter-
433	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Gugatan <i>terbaru</i> pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu itu datang dari 27 warga negara Indonesia (WNI).	Ter-
434	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	<i>Terkait</i> waktu penyelesaian, Fajar memastikan perkara yang berkaitan langsung dengan agenda ketatanegaraan, seperti tahapan dan jadwal pemilu, akan menjadi perhatian MK.	Ter-
435	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	<i>Terutama</i> berkenaan dengan jumlah saksi dan ahli yang diajukan di persidangan.	Ter-
436	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Baik oleh pemohon, pemberi keterangan, atau jika ada pihak <i>terkait</i> , " tegasnya.	Ter-
437	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Refly menjelaskan, kondisi faktual Pemilu Presiden (Pilpres 2019) di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif <i>terbaik</i> bisa menjadi dasar.	Ter-
438	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	<i>Termasuk</i> isu polarisasi politik yang sangat kuat.	Ter-
439	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Perpu itu perlu dikeluarkan agar kekacauan yang <i>terjadi</i> selama ini bisa diselesaikan," ujar Syaikhu di Jakarta, Senin (3/1).	Ter-
440	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Menurut Syaikhu, setelah UU Cipta Kerja disahkan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), banyak <i>terjadi</i> gejala, terutama kalangan buruh.	Ter-
441	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Menurut Syaikhu, setelah UU Cipta Kerja disahkan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), banyak terjadi gejala, <i>terutama</i> kalangan buruh.	Ter-
442	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Hal ini, ditandai dengan jaminan dengan jaminan keselamatan kerja bagi buruh yang semain tidak jelas, bahkan PHK <i>terjadi</i> di mana-mana.	Ter-
443	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Ketiga</i> , terjadinya penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan disisi lain PHK <i>terjadi</i> dimana-mana serta berdampak pada naiknya angka kemiskinan.	Ter-

444	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Tidak hanya dari internal PKS, diskusi akhir tahun <i>tersebut</i> , juga dihadiri oleh beberapa tokoh dan pimpinan buruh yaitu Vice Presiden FSPMI dan KSPI Iswan Abdulah, Ketua umum SP TSK SPSI Roy Jinto, Ketua SP LEM SPSI Arif Winardi, dan Ketua SPN Djoko Heriyono.	Ter-
445	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Menanggapi hal <i>tersebut</i> , Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, itu adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.	Ter-
446	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, itu adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak <i>terjadi</i> di masyarakat.	Ter-
447	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Ini momentum yang sangat progresif di mana polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan <i>terbentuk</i> nya direktorat khusus yang memang menangani bidang ini, dan memang sudah sangat urgent sekali barang ini," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/1).	Ter-
448	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Legislator Partai Nasdem menambahkan bahwa dengan adanya Direktorat PPA nanti, diharapkan penanganan kasus hukum <i>terkait</i> kekerasan pada perempuan dan anak bisa lebih maksimal.	Ter-
449	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Hadirkan tenaga- tenaga <i>terbaik</i> , libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan istitusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan.	Ter-
450	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Sebab, ada sejumlah isu yang menjadi tantangan <i>terkait</i> penataan ruang IKN baru.	Ter-
451	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Selain itu, lanjut Guspari, pemindahan IKN bertujuan menyelesaikan persoalan-persoalan yang <i>terjadi</i> di DKI Jakarta.	Ter-
452	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Menurut anggota Komisi II DPR <i>tersebut</i> , semua indikator itu menunjukkan bahwa penataan ruang merupakan isu yang sangat penting.	Ter-
453	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Penetapan lokasi IKN <i>terkesan</i> di putus dengan serampangan.	Ter-

454	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Karena itu, niat memindahkan IKN ke kabupaten <i>tersebut</i> layak ditinjau kembali.	Ter-
455	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Perlu dipikirkan lokasi yang benar- benar <i>terbebas</i> banjir.	Ter-
456	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Sebab menurut pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono, sosok yang harusnya pantas menggantikan Anies adalah figur baru harus memahami karakteristik Jakarta secara utuh dan menyeluruh agar berkesinambungan dengan pemimpin <i>terdahulu</i> .	Ter-
457	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Anies Baswedan sebagai pertahanan memiliki peluang besar dan dapat <i>terpilih</i> kembali. Namun, jalan menuju Calon Presiden (Capres) 2024 menurut saya lebih menarik baginya," kata pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono di Jakarta, Senin (3/1).	Ter-
458	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Dia melihat, sebaiknya warga Jakarta memberi kepercayaan pada tokoh lokal, sebab kompleksitas Ibu Kota membutuhkan sosok yang langsung <i>running</i> setelah <i>terpilih</i> .	Ter-
459	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Menanggapi hal <i>tersebut</i> , Anggota Komisi II DPR Guspari Gaus meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak mengangkat penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri.	Ter-
460	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Rinciannya, 7 gubernur, <i>termasuk</i> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan habis masa jabatannya.	Ter-
461	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko akhirnya buka suara <i>terkait</i> polemik periset honorer di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME).	Ter-
462	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	"(khawatir, <i>red</i> ) <i>ternyata</i> nanti ada (urusan) birokrasi," katanya dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Jakarta kemarin (4/1) malam.	Ter-
463	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Sebab, dengan status ASN penuh, para peneliti <i>tersebut</i> bisa mendapatkan tunjangan seorang peneliti yang besar.	Ter-

464	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami berharap adanya pembahasan yang progresif dari perwakilan pemerintah bersama DPR, agar pengesahan RUU TPKS bisa kita kebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tutur mantan Menko PMK <i>tersebut</i> .	Ter-
465	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Dengan adanya UU TPKS nanti, kita harapkan kasus-kasus kekerasan seksual tak <i>terjadi</i> lagi dan negara bisa memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap warganya lebih maksimal khususnya kaum perempuan dan anak," tuturnya.	Ter-
466	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga untuk berkoordinasi dengan DPR terkait RUU <i>tersebut</i> .	Ter-
467	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memperkenalkan Charly van Houten atau lebih dikenal sebagai Charly ST12 atau Charly Setiaku sebagai kader dan calon anggota legislatif <i>terbaru</i> partai tersebut.	Ter-
468	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memperkenalkan Charly van Houten atau lebih dikenal sebagai Charly ST12 atau Charly Setiaku sebagai kader dan calon anggota legislatif terbaru partai <i>tersebut</i> .	Ter-
469	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Diketahui pada 7 Juni 2021 lalu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer mengatakan bahwa Charly van Houten bersama dengan Andika Mahesa 'Kangen Band' telah bergabung ke partai yang dikepalai oleh Yusril Ihza Mahendra <i>tersebut</i> .	Ter-
470	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Afriansyah menilai alasan artis-artis <i>tersebut</i> bergabung ke PBB karena melihat partai tersebut masih bersih dari korupsi.	Ter-
471	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Karenanya, Sahroni mendorong <i>terbentuk</i> nya kerja sama antara kejaksanaan dan lembaga HAM lainnya.	Ter-
472	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Saya yakin beliau mengambil keputusan <i>terbaik</i> bagi masa depan Demokrat di NTT," ujar Lelo dalam keterangannya, Selasa (4/1).	Ter-

473	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	<i>Terkait</i> insiden pembakaran atribut Parta Demokrat, Lelo mengungkapkan bahwa pelakunya bukan kader partai.	Ter-
474	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Saya pasti akan tempatkan pak Jericho pada posisi yang <i>terhormat</i> dalam kepengurusan DPD yang baru.	Ter-
475	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Walaupun saya dengar, karena prestasinya selama ini, pak Jericho akan ditawarkan posisi <i>terpandang</i> di DPP," katanya.	Ter-
476	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Beliau tokoh yang sudah makan asam garam di politik lokal maupun nasional, serta sudah menetapkan standar pencapaian yang tinggi, yang menjadi tantangan <i>tersendiri</i> bagi saya untuk bisa menyamainya atau melampauinya," tuturnya.	Ter-
477	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Apalagi kalau kita lihat dalam gambar besarnya, pak Jeriko sebenarnya tidak dikalahkan, tapi akan diminta untuk memegang amanah jabatan yang lebih <i>terhormat</i> , sebagai penghargaan atas prestasi beliau selama ini," ujarnya.	Ter-
478	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Pasalnya, Indonesia <i>tertinggal</i> dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang lebih dulu menggarap bahan kimia yang diperoleh dari bahan bakar fosil tersebut.	Ter-
479	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Pasalnya, Indonesia tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang lebih dulu menggarap bahan kimia yang diperoleh dari bahan bakar fosil <i>tersebut</i> .	Ter-
480	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian BUMN telah menugaskan kepada Pertamina untuk menyiapkan sejumlah langkah bisnis di sektor <i>tersebut</i> .	Ter-
481	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Menurut politikus PKB itu, langkah Pertamina ini sangat baik, namun perlu melihat keseimbangan dalam bisnis ke depan, karena ekonomi bangsa saat ini <i>terpukul</i> dengan pandemi Covid-19, hingga ada kekhawatiran inflasi akan meningkat.	Ter-
482	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Kalau inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun dan kalau menurun maka produk-produk manufaktur mungkin tidak <i>terbeli</i> juga.	Ter-

483	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Namun, lanjut Faizol, langkah Pertamina mengembangkan petrochemical ini akan berjalan baik jika bahan baku produk Pertamina sendiri bisa disimpan dan bisa dimonotaise,hingga tidak mengakibatkan kerugian karena tidak <i>terserap</i> oleh pasar.	Ter-
484	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Sehingga tidak mengakibatkan kerugian akibat dari produksi yang tidak <i>terserap</i> oleh pasar," jelasnya.	Ter-
485	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Dikatakan dia, untuk keputusan pemberiam dukungan, PPP Riau memang tetap harus mendapat restu DPP <i>terlebih</i> dahulu.	Ter-
486	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Tentunya, keputusan <i>tersebut</i> dibarengi dengan pertimbangan matang.	Ter-
487	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Sekolah tatap muka <i>tersebut</i> dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.	Ter-
488	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Adapun aturan yang perlu diikuti adalah <i>terkait</i> dengan pencapaian vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta masyarakat lanjut usia sebagai persyaratan PTM.	Ter-
489	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	"KPAI mendukung hal <i>tersebut</i> , karena sejak awal pembukaan PTM terbatas, KPAI sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar vaksinasi peserta didik dijadikan persyaratan penyelenggaraan PTM, yaitu minimal 70 persen warga sekolah sudah di vaksin," ujar dia dikutip, Rabu (5/1).	Ter-
490	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	"KPAI mendukung hal tersebut, karena sejak awal pembukaan PTM <i>terbatas</i> , KPAI sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar vaksinasi peserta didik dijadikan persyaratan penyelenggaraan PTM, yaitu minimal 70 persen warga sekolah sudah di vaksin," ujar dia dikutip, Rabu (5/1).	Ter-
491	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Adapun soal PTM <i>terbatas</i> yang telah dimulai sejak Januari 2021 ini, KPAI juga telah melakukan pemantauan di sejumlah sekolah pada 8 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat , Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.	Ter-

492	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Untuk indikator kesiapan sekolah yang sudah menyelenggarakan PTM <i>terbatas</i> dengan kategori cukup, baik dan sangat baik mencapai 79,17 persen.	Ter-
493	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Artinya, dengan kondisi belum siap, <i>ternyata</i> sekolah tetap menggelar tatap muka.	Ter-
494	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Meskipun ketidaksiapan itu diantaranya adalah belum dibuatnya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam berbagai layanan saat PTM <i>terbatas</i> .	Ter-
495	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Saat diwawancarai, anak-anak mengatakan mereka memakai masker saat diperjalanan pergi dan pulang sekolah. Ada pemahaman yang salah <i>terkait</i> fungsi masker yang disamakan dengan helm.	Ter-
496	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Presiden Joko Widodo pun mendorong adanya percepatan pembahasan sehingga RUU <i>tersebut</i> dapat segera disahkan.	Ter-
497	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Jokowi ingin langkah cepat dalam pengesahan RUU <i>tersebut</i> .	Ter-
498	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi <i>tersebut</i> .	Ter-
499	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Kendati demikian, beberapa pihak masih meyakini bahwa Sandi layak ikut bersaing dalam kontestasi <i>tersebut</i> .	Ter-
500	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	"Sandiaga Uno diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo karena sangat memahami rakyat Indonesia," karena Mahendra melalui keterangan <i>tertulis</i> yang diterima di Jakarta, Rabu (5/1).	Ter-
501	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan lain yang membuat Sandiaga Uno layak maju karena selama setahun <i>terakhir</i> , Sandi telah berkeliling Indonesia dan mengunjungi lebih dari 50 desa wisata dan mempromosikan serta memperluas manfaat pariwisata.	Ter-
502	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan ketiga adalah Sandi dinilai memiliki sejumlah ide-ide baru program ekonomi yang telah <i>terbukti</i> diterapkannya.	Ter-
503	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	<i>Terakhir</i> , Sandi dinilai tegas dan cepat dalam menghadapi tantangan.	Ter-

504	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Ketua Timsel Juri Ardiantoro mengatakan, nama-nama yang disetorkan merupakan sosok <i>terbaik</i> dari berbagai tes yang digelar.	Ter-
505	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Mulai tes <i>tertulis</i> , makalah, psikotes, wawancara, hingga tes kesehatan.	Ter-
506	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	<i>Terkait</i> proses selanjutnya, Juri menyerahkan penuh kepada presiden.	Ter-
507	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Seluruh nama yang <i>terpilih</i> akan diteruskan ke DPR untuk menjalani fit and proper test.	Ter-
508	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Pihaknya berharap siapa pun yang <i>terpilih</i> bisa membawa perbaikan kualitas pemilu ke depan.	Ter-
509	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Sementara Ketua KPU Ilham Saputra dan Ketua Bawaslu Abhan <i>tersingkir</i> , menyusul Pramono Ubaid Tanthowi.	Ter-
510	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	<i>Terkait</i> nama-nama yang dipilih, dia menyebut itu kewenangan timsel.	Ter-
511	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Dalam kesempatan <i>tersebut</i> , Agung turut menyatakan dukungan kepada Irjen Iqbal dalam melaksanakan tugas-tugas berat kepolisian.	Ter-
512	07-Jan-22	<b>Komisi II DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Wali Kota Bekasi Rahmad Effendi <i>terkena</i> operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	Ter-
513	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	OTT itu <i>terkait</i> pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.	Ter-
514	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Menanggapi hal <i>tersebut</i> , Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan OTT terhadap kepala daerah ini menunjukkan bahwa KPK tetap bisa tajam dalam melakukan penangkapan, dan tidak seperti yang ditakutkan berbagai pihak selama ini.	Ter-
515	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Namun penangkapan ini menunjukkan bahwa berbagai kekhawatiran itu tidak <i>terbukti</i> , dan KPK tetap tajam dalam melakukan penangkapan.	Ter-
516	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Akan timbul ketidakpercayaan publik yang diambil, karena ada satu dua <i>pejabat</i> publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi.	Pe-

517	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Hal ini agar masyarakat mempunyai instrumen <i>pelindung</i> bagi para pelaku-pelaku kejahatan seksual.	Pe-
518	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Kalau melihat gejala hari ini, Maragrigo menduga <i>pemohon</i> akan berhadapan dengan masalah teknis maupun konsep.	Pe-
519	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Baik oleh <i>pemohon</i> , pemberi keterangan, atau jika ada pihak terkait," tegasnya.	Pe-
520	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Refly Harun, kuasa hukum <i>pemohon</i> , menyatakan, meski gugatan serupa sudah kerap dilakukan dan ditolak, pihaknya tak patah arang.	Pe-
521	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Begitu pun dengan <i>periset</i> yang sudah ASN, tidak bisa menjadi di ASN periset penuh.	Pe-
522	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	<i>Periset</i> itu meminta supaya bisa menjadi ASN penuh.	Pe-
523	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Terkait insiden pembakaran atribut Parta Demokrat, Lelo mengungkapkan bahwa <i>pelaku</i> nya bukan kader partai.	Pe-
524	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan menuju 2022, ada beberapa catatan yang perlu <i>pemerintah</i> cermati terkait pandemi Covid-19	PeN-
525	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	" <i>Pemerintah</i> jangan pernah dan anggap remeh.	PeN-
526	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky menambahkan, selama pandemi, <i>pemerintah</i> seharusnya fokus pada upaya di bidang kesehatan.	PeN-
527	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Seharusnya <i>pemerintah</i> berfokus pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa terhindar dari bencana Covid-19.	PeN-
528	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky menuturkan agar <i>pemerintah</i> lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritikan terkait kebijakan yang diambil.	PeN-
529	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky berujar, seharusnya dampak pandemi Covid-19 ini bisa kita lebih minimalisir, jika <i>pemerintah</i> sejak awal terbuka dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan.	PeN-

530	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	"Jangan kemudian ketika situasi memburuk dan mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak, baru <i>pemerintah</i> mau mendengarkan.	PeN-
531	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Sudah ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia yang menjadi korban, baru <i>pemerintah</i> berubah," tuturnya	PeN-
532	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Nyawa rakyat ini, jangan sampai godaan rupiah atau dolar membuat <i>pemerintah</i> hilang fokus," tegasnya	PeN-
533	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Artinya catatan kinerja akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk melihat apakah layak untuk jadi calon <i>pemimpin</i> atau tidak.	PeN-
534	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Posisi partai politik sebagai basis utama pertimbangan <i>pemilih</i> dalam pemilihan umum legislatif (pileg) kian redup.	PeN-
535	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Berdasarkan survei dan riset yang dilakukan The Republic Institute, <i>pemilih</i> cenderung mengutamakan faktor tokoh yang diusung dibandingkan institusi partai itu sendiri.	PeN-
536	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Direktur Eksekutif The Republic Institute Sufy Sufyanto mengatakan, sikap <i>pemilih</i> dengan memilih tokoh menunjukkan peningkatan.	PeN-
537	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Untuk PKB misalnya, jumlah <i>pemilih</i> partai (tidak nyoblos caleg) pada 2019 sebanyak 26,9 persen.	PeN-
538	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Saat ini <i>pemilih</i> partainya hanya 22,7 persen.	PeN-
539	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Kemudian, <i>pemilih</i> PDIP pada 2019 sebanyak 29,46 persen, saat ini hanya 22,5 persen.	PeN-
540	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Ada perilaku <i>pemilih</i> yang bergerak dari memilih partai ideologis ke individu," ujar Sufy dalam paparan survei kemarin (2/1).	PeN-
541	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	<i>Pemilih</i> partai masih lebih tinggi dibandingkan pemilih calegnya.	PeN-
542	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sufy menjelaskan, menguatkan ketokohan dalam pertimbangan <i>pemilih</i> menunjukkan institut partai politik tidak cukup kuat.	PeN-
543	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Dengan kata lain, sebuah partai bisa ditinggal kapan saja jika tokoh-tokoh yang menjadi <i>penopang</i> dalam mengeruk suara pemilih hengkang.	PeN-
544	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Dengan kata lain, sebuah partai bisa ditinggal kapan saja jika tokoh-tokoh yang menjadi penopang dalam mengeruk suara <i>pemilih</i> hengkang.	PeN-

545	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sufy menyarankan, <i>penentu</i> kandidat dalam pileg harus mementingkan aktor lokal.	PeN-
546	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Ketua Bawaslu Sumatera Utara Safrida Rasahan menambahkan, faktor personal calon memang mendominasi pertimbangan <i>pemilih</i> .	PeN-
547	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Kadang faktor etnisitas dan kesamaan marga justru yang muncul (pertimbangan <i>pemilih, red</i> )," tegasnya.	PeN-
548	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Namun dari hasil pengamatan koalisi masyarakat sipil, ada sejumlah tindakan anggota timsel yang berpotensi mencederai upaya menghasilkan <i>penyelenggara</i> yang baik.	PeN-
549	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Baik oleh pemohon, <i>pemberi</i> keterangan, atau jika ada pihak terkait," tegasnya.	PeN-
550	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden potensial mengampustasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon <i>pemimpin</i> ," ujar pakar hukum tata negara itu.	PeN-
551	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Dalam catatan ini, PKS berpandangan <i>pemerintah</i> belum berpihak kepada buruh.	PeN-
552	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan, agar <i>pemerintah</i> segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) untuk mencabut UU No 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	PeN-
553	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Keempat</i> , banyaknya permasalahan yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum diselesaikan dengan baik oleh <i>pemerintah</i> .	PeN-
554	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Mereka sepakat, bahwa kebijakan rezim <i>pemerintah</i> saat ini masih jauh dari keberpihakan kepada buruh masing sangat memprihatinkan.	PeN-
555	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Di sisi lain, <i>pengamat</i> komunikasi M. Jamiludin Ritonga menyoroti banjir yang menerjang lokasi IKN.	PeN-
556	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Untuk itu, diperlukan studi komprehensif oleh para ahli, bukan didasarkan pada selera <i>penguasa</i> .	PeN-
557	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	" <i>Pemerintah</i> harus membentuk tim dari multidisiplin untuk mengkaji lokasi yang pas untuk IKN baru," ucapnya.	PeN-

558	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Sebab menurut <i>pengamat</i> politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono, sosok yang harusnya pantas menggantikan Anies adalah figur baru harus memahami karakteristik Jakarta secara utuh da menyeluruh agar berkesinambungan dengan pemimpin terdahulu.	PeN-
559	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Sebab menurut pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono, sosok yang harusnya pantas menggantikan Anies adalah figur baru harus memahami karakteristik Jakarta secara utuh da menyeluruh agar berkesinambungan dengan <i>pemimpin</i> terdahulu.	PeN-
560	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Anies Baswedan sebagai pertahanan memiliki peluang besar dan dapat terpilih kembali. Namun, jalan menuju Calon Presiden (Capres) 2024 menurut saya lebih menarik baginya," kata <i>pengamat</i> politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono di Jakarta, Senin (3/1).	PeN-
561	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sehingga kekosongan jabatan itu harus diisi oleh <i>penjabat</i> gubernur atau bupati dan wali kota hingga 2024.	PeN-
562	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Guspari Gaus meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak mengangkat <i>penjabat</i> kepala daerah dari TNI dan Polri.	PeN-
563	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Guspari menjelaskan <i>penjabat</i> kepala daerah tidak diambil dari TNI dan Polri.	PeN-
564	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Misalnya saja jabatan gubernur bisa diisi oleh <i>penjabat</i> setingkat Dirjen.	PeN-
565	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Kekosongan kepemimpinan <i>pemerintah</i> daerah itu, nantinya bakal diisi oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.	PeN-
566	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal diisi oleh <i>penjabat</i> kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.	PeN-
567	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Adapun, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat (10) dijelaskan <i>penjabat</i> gubernur yang mengisi kekosongan jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.	PeN-
568	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sementara pada ayat (11) dijelaskan untuk mengisi kekosongan bupati/wali kota diangkat <i>penjabat</i> bupati/wali kota dari jabatan pimpinan tinggi pratama.	PeN-

569	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Dia mengatakan, memang ada <i>peneliti</i> honorer Eijkman yang keberatan, bahkan tidak mau bergabung dengan BRIN.	PeN-
570	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Dia lantas menyebutkan salah satu <i>pemicu</i> nya.	PeN-
571	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	"(khawatir, <i>red</i> ) ternyata nanti ada (urusan) birokrasi," katanya dalam pertemuan dengan sejumlah <i>pemimpin</i> redaksi media massa di Jakarta kemarin (4/1) malam.	PeN-
572	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Merespons itu, dia menegaskan budaya kerja di BRIN tidak seperti birokrasi di lembaga <i>pemerintah</i> lainnya.	PeN-
573	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Sebab, dengan status ASN penuh, para peneliti tersebut bisa mendapatkan tunjangan seorang <i>peneliti</i> yang besar.	PeN-
574	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Handoko mengatakan, sebagai ASN <i>peneliti</i> penuh, mereka bisa mendapatkan gaji sekitar Rp25 juta setiap bulan.	PeN-
575	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ia menegaskan komitmen DPR bersama-sama <i>pemerintah</i> untuk cepat mengesahkan RUU TPKS yang banyak diharapkan masyarakat itu.	PeN-
576	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke <i>pemerintah</i> sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II," katanya.	PeN-
577	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan menyambut langsung Presiden Jokowi yang telah meminta Gugus Tugas <i>Pemerintah</i> yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang disiapkan oleh DPR.	PeN-
578	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	DPR RI memastikan siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama <i>pemerintah</i> ke depan.	PeN-
579	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan meminta pihak <i>pemerintah</i> memiliki komitmen yang sama dengan pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memperhatikan.	PeN-

580	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUTPKS</b>	"Kami berharap adanya pembahasan yang progresif dari perwakilan <i>pemerintah</i> bersama DPR, agar pengesahan RUU TPKS bisa kita kebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tutur mantan Menko PMK tersebut.	PeN-
581	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Sekolah tatap muka tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh <i>pemerintah</i> .	PeN-
582	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Adapun aturan yang perlu diikuti adalah terkait dengan pencapaian vaksinasi bagi <i>pendidik</i> dan tenaga kependidikan, peserta didik serta masyarakat lanjut usia sebagai persyaratan PTM.	PeN-
583	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	"KPAI mendukung hal tersebut, karena sejak awal pembukaan PTM terbatas, KPAI sudah menyampaikan rekomendasi kepada <i>pemerintah</i> agar vaksinasi peserta didik dijadikan persyaratan penyelenggaraan PTM, yaitu minimal 70 persen warga sekolah sudah di vaksin," ujar dia dikutip, Rabu (5/1).	PeN-
584	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Bahkan ada SD yang memiliki tempat cuci tangan di setiap depan kelas, namun saat KPAI datang dan duduk di dekat pintu gerbang sekolah, tak ada satu pun peserta didik dan <i>pendidik</i> yang mencuci tangan saat tiba di sekolah.	PeN-
585	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Di samping itu, kepala negara telah meminta kepada gugus tugas <i>pemerintah</i> yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM).	PeN-
586	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	<i>Peneliti</i> Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengapresiasi kerja timsel yang menuntaskan kerja tepat waktu.	PeN-
587	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Ada yang berlatar belakang sebagai <i>penyelenggara</i> pemilu, akademisi, hingga penggiat kepemiluan.	PeN-
588	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Ada yang berlatar belakang sebagai penyelenggara pemilu, akademisi, hingga <i>penggiat</i> kepemiluan.	PeN-
589	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Agung yang merupakan seorang <i>pembalap</i> memiliki hubungan erat dengan satuan lalu lintas Polri.	PeN-

590	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Kedua</i> , dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta keselamatan buruh yang semakin terabaikan.	Ke-
591	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Ketiga</i> , terjadinya penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan disisi lain PHK terjadi dimana-mana serta berdampak pada naiknya angka kemiskinan.	Ke-
592	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Keempat</i> , banyaknya permasalahan yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.	Ke-
593	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan <i>ketiga</i> adalah Sandi dinilai memiliki sejumlah ide-ide baru program ekonomi yang telah terbukti diterapkannya.	Ke-
594	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pandemi selama dua tahun ini.	Se-
595	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky menambahkan, <i>selama</i> pandemi, pemerintah seharusnya fokus pada upaya di bidang kesehatan.	Se-
596	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Akan timbul ketidakpercayaan publik yang diambil, karena ada satu dua pejabat publik yang tersangkut kasus bisnis di <i>seputar</i> pandemi.	Se-
597	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	"Ujung-ujungnya akan <i>semakin</i> menghambat kita dalam menangani pandemi ini, dan pandemi-pandemi ke depannya,"ujarnya.	Se-
598	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Direktur Institute for Security and Strategig Studies (ISESS) Khairul Fahmi memberikan catatan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah komando Prabowo Subianto <i>selama</i> satu tahun terakhir.	Se-
599	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi menilai, <i>selama</i> setahun terakhir, masih kurangnya komunikasi publik dari Kemenhan ini.	Se-
600	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi menilai, selama <i>setahun</i> terakhir, masih kurangnya komunikasi publik dari Kemenhan ini.	Se-
601	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Ada beberapa belanja menunjukkan progres mengenai kebutuhan alutsista kita yang <i>sebelum</i> nya tidak berjalan sekarang berjalan.	Se-

602	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, pengajuan permohonan judicial review (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh individu dan sekelompok orang harus dihormati.	Se-
603	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Menurut Margarito, secara konseptual, UUD 1945 Pasal 6a ayat (2) menyebutkan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum <i>sebelum</i> pelaksanaan pemilihan umum."	Se-
604	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Untuk PKB misalnya, jumlah pemilih partai (tidak nyoblos caleg) pada 2019 <i>sebanyak</i> 26,9 persen.	Se-
605	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Kemudian, pemilih PDIP pada 2019 <i>sebanyak</i> 29,46 persen, saat ini hanya 22,5 persen.	Se-
606	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Gejala <i>serupa</i> juga terjadi di partai-partai lainnya.	Se-
607	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Karena yang diketahui publik <i>sebatas</i> partainya," imbuhnya.	Se-
608	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Dengan kata lain, <i>sebuah</i> partai bisa ditinggal kapan saja jika tokoh-tokoh yang menjadi penopang dalam mengeruk suara pemilih henggang.	Se-
609	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	<i>Sebelum</i> nya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir tahun 2021 mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk.	Se-
610	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	" Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementrian, dan Polri seperti TNI, <i>sebuah</i> lembaga operasional.	Se-
611	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Namun dari hasil pengamatan koalisi masyarakat sipil, ada <i>sejumlah</i> tindakan anggota timsel yang berpotensi mencederai upaya menghasilkan penyelenggara yang baik.	Se-
612	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Hal itu terlihat dari pujian Bahtiar pada salah <i>seorang</i> calon yang selama ini dikenal dekat.	Se-
613	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Semua permohonan akan ditangani <i>secepat</i> mungkin.	Se-
614	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Semua permohonan menjadi prioritas untuk <i>sesegerakan</i> mungkin diselesaikan," ujarnya kepada JPG, Senin (3/1).	Se-

615	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Sementara itu, dalam permohonannya, 27 WNI menyampaikan <i>sejumlah</i> dalil.	Se-
616	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Refly Harun, kuasa hukum pemohon, menyatakan, meski gugatan <i>serupa</i> sudah kerap dilakukan dan ditolak, pihaknya tak patah arang.	Se-
617	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Perpu itu perlu dikeluarkan agar kekacauan yang terjadi <i>selama</i> ini bisa diselesaikan," ujar Syaikhu di Jakarta, Senin (3/1).	Se-
618	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Menurut Syaikhu, <i>setelah</i> UU Cipta Kerja disahkan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), banyak terjadi gejala, terutama kalangan buruh.	Se-
619	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Harus ada regulasi UU yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI meliputi dari <i>sebelum</i> keberangkatan, ketika penempatan dan kemudian saat kembali lagi ke tanah air, sehingga PMI merasa tenang dalam bekerja," tuturnya.	Se-
620	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	<i>Setelah</i> Pak Kapolri membentuk wadahnya, saya minta kepada seluruh kepolisian agar betul-betul bekerja memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Se-
621	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	<i>Sebelum</i> nya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada korban, maka Polri akan melakukan pengembangan organisasi, di mana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat sendiri di Mabes Polri.	Se-
622	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Jangan sampai tata ruang dan lingkungan menjadi masalah <i>setelah</i> dilakukan pemindahan IKN baru.	Se-
623	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Sebab, ada <i>sejumlah</i> isu yang menjadi tantangan terkait penataan ruang IKN baru.	Se-
624	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	"Jadi, jangan sampai <i>setelah</i> pemindahan, ibu kota baru malah banjir," ujarnya kemarin (3/1).	Se-
625	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Pada 2022 ini <i>sebanyak</i> 101 kepala daerah akan habis masa jabatnya.	Se-
626	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Misalnya saja jabatan gubernur bisa diisi oleh penjabat <i>setingkat</i> Dirjen.	Se-

627	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	"(khawatir, <i>red</i> ) ternyata nanti ada (urusan) birokrasi," katanya dalam pertemuan dengan <i>sejumlah</i> pemimpin redaksi media massa di Jakarta kemarin (4/1) malam.	Se-
628	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Padahal, ketika eijkman selama ini menggunakan anggaran dari APBN, seluruh kegiatannya harus sesuai dengan ketentuan keuangan negara.	Se-
629	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Sebab, <i>selama</i> ini LBME menjadi unit proyek dari Kemenrisek.	Se-
630	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Sebab, dengan status ASN penuh, para peneliti tersebut bisa mendapatkan tunjangan <i>seorang</i> peneliti yang besar.	Se-
631	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna <i>setelah</i> reses untuk kemudian kami kirimkan ke pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II," katanya.	Se-
632	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Supres <i>setelah</i> nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR," ungapnya.	Se-
633	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	<i>Sebelum</i> nya, Presiden Joko Widodo mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan RUU TPKS yang hingga kini masih berproses.	Se-
634	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Tentu ini adalah jawaban yang ditunggu-tunggu oleh <i>segenap</i> korban maupun keluarganya, dan kita semua.	Se-
635	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	<i>Sebelum</i> nya, Jaksa Agung ST Burhanudin menyampaikan janjinya pada tahun 2022 yang akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.	Se-
636	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Ketum AHY pasti sudah mengambil berbagai pertimbangan dan masukan <i>sebelum</i> mengambil keputusan.	Se-
637	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Lelo juga berjanji akan segera berkomunikasi dengan ketua DPD <i>sebelum</i> nya, Jefry Riwu Kore (Jeriko) untuk mengajaknya bersama-sama membangun dan membesarkan Partai Demokrat di NTT.	Se-
638	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Walaupun saya dengar, karena prestasinya <i>selama</i> ini, pak Jericho akan ditawarkan posisi terpandang di DPP," katanya.	Se-
639	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Menurut Lelo, AHY berpandangan sudah saatnya Jeriko naik kelas ke panggung politik nasional, dengan melihat prestasi-prestasi politiknya yang panjang <i>selama</i> ini.	Se-

640	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Saya pribadi sangat menghargai pak Jeriko, dan sangat menghormati pencapaian-pencapaian beliau <i>selama</i> ini.	Se-
641	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian BUMN telah menugaskan kepada Pertamina untuk menyiapkan <i>sejumlah</i> langkah bisnis di sektor tersebut.	Se-
642	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Adalah membangun petrochemical yang <i>selama</i> ini Indonesia gak punya, itu Thailand punya, Singapura punya, Malaysia punya," ujar Erick dalam satu kesempatan.	Se-
643	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Terus terang kita perlu melihat keseimbangan dalam bisnis ke depan ekonomi Indonesia kedepan <i>setelah</i> dua tahun lebih kita seluruh bangsa ini mengalami pandemi sektor riil oraktis berhenti dan ada kekhawatiran inflasi akan meningkat," ucapnya.	Se-
644	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Anak buah Muhaimin Iskandar ini menyadari betul, Indonesia masih membutuhkan bahan baku obat karena <i>sejauh</i> ini Indonesia masih bergantung pada impor, dan langkah Erick Thohir untuk mengembangkan petrochemical sangat tepat.	Se-
645	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Kalau bahan baku obat misalnya memang kita sangat membutuhkan dan itu hanya bisa disediakan <i>selama</i> ini melalui bahan baku impor bisa kita isi, memang akan sangat baik buat produksi dalam negeri," akunya.	Se-
646	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Dalam kegiatan itu PPP Riau turut menggelar <i>sejumlah</i> kegiatan sosial.	Se-
647	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Adapun soal PTM terbatas yang telah dimulai sejak Januari 2021 ini, KPAI juga telah melakukan pemantauan di <i>sejumlah</i> sekolah pada 8 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat , Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.	Se-
648	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Ketua Umum Sedulur Sandiaga Uno, Mahendra, dikutip dari Antara, memaparkan <i>sejumlah</i> alasan mengapa Sandi layak maju Pilpres 2024.	Se-

649	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan lain yang membuat Sandiaga Uno layak maju karena <i>selama</i> setahun terakhir, Sandi telah berkeliling Indonesia dan mengunjungi lebih dari 50 desa wisata dan memromosikan serta memperluas manfaat pariwisata.	Se-
650	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan lain yang membuat Sandiaga Uno layak maju karena selama <i>setahun</i> terakhir, Sandi telah berkeliling Indonesia dan mengunjungi lebih dari 50 desa wisata dan memromosikan serta memperluas manfaat pariwisata.	Se-
651	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan ketiga adalah Sandi dinilai memiliki <i>sejumlah</i> ide-ide baru program ekonomi yang telah terbukti diterapkannya.	Se-
652	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan OTT terhadap kepala daerah ini menunjukkan bahwa KPK tetap bisa tajam dalam melakukan penangkapan, dan tidak seperti yang ditakutkan berbagai pihak <i>selama</i> ini.	Se-
653	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, <i>para pejabat</i> terkait sebaiknya menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi.	Para-
654	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Menurut Lestari, tidak kunjung selesainya RUU TPKS ini merupakan sinyal buta nurani dari <i>para pimpinan</i> DPR.	Para-
655	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Hal ini agar masyarakat mempunyai instrumen pelindung bagi <i>para pelaku-pelaku</i> kejahatan seksual.	Para-
656	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Tapi juga ditentukan <i>para pemohon</i> .	Para-
657	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Keempat</i> , banyaknya permasalahan yang menimpa <i>para Pekerja</i> Migran Indonesia (PMI) yang belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.	Para-
658	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Pansus telah mengundang <i>para ilmuwan</i> dan ahli untuk memberikan masukan dan saran.	Para-
659	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Untuk itu, diperlukan studi komprehensif oleh <i>para ahli</i> , bukan didasarkan pada selera penguasa.	Para-
660	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	"Di BRIN tidak ada birokrasi (untuk <i>para periset</i> ).	Para-

661	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Dia menyebut BRIN sudah memberikan kesempatan kepada para periset honorer eijkman untuk masuk ke BRIN.	Para-
662	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Sebab, dengan status ASN penuh, <i>para peneliti</i> tersebut bisa mendapatkan tunjangan seorang peneliti yang besar.	Para-
663	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Karena itu Lelo mengimbau agar <i>para pengurus</i> , kader dan simpatisan Partai Demokrat di NTT untuk tetap tenang.	Para-
664	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky menuturkan agar pemerintah lebih terbuka dalam menerima <i>masukan</i> dan kritikan terkait kebijakan yang diambil.	..an
665	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky berujar, seharusnya dampak pandemi Covid-19 ini bisa kita lebih minimalisir, jika pemerintah sejak awal terbuka dengan <i>masukan</i> dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan.	..an
666	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Nyawa rakyat ini, jangan sampai <i>godaan</i> rupiah atau dolar membuat pemerintah hilang fokus," tegasnya	..an
667	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Direktur Institute for Security and Strategig Studies (ISESS) Khairul Fahmi memberikan <i>catatan</i> Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah komando Prabowo Subianto selama satu tahun terakhir.	..an
668	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2021 beserta <i>dukungan</i> anggarannya.	..an
669	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi juga berpesan agar mantan Danjen Kopassus ini berfokus pada <i>jabatan</i> yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).	..an
670	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Termasuk juga <i>dorongan</i> untuk menjadi capres di 2024.	..an
671	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fokus saja <i>jabatan</i> yang ia emban saat ini.	..an

672	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Artinya <i>catatan</i> kinerja akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk melihat apakah layak untuk jadi calon pemimpin atau tidak.	..an
673	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Yakni membentuk <i>cadangan</i> logistik strategis nasional.	..an
674	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Tapi ada porsi yang melibatkan Kemenhan misalnya <i>cadangan</i> logistik strategis," imbuhnya.	..an
675	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Membiarkan RUU TPKS tak diakomodir <i>pimpinan</i> DPR RI adalah sinyal butanya nurani.	..an
676	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Anggota Majelis Tinggi Parta Nasdem ini menilai, <i>pimpinan</i> DPR telah abai adanya kasus kekerasan-kekerasan seksual yang terus terjadi.	..an
677	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Karenanya <i>pimpinan</i> DPR dan semua fraksi di DPR harus punya itu pandangan untuk segera mengesahkan RUU TPKS ini.	..an
678	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	"Sayangnya, <i>pimpinan</i> DPR RI belum sampai pada tahap kontemplasi atas realitas.	..an
679	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Menurut Margarito, secara konseptual, UUD 1945 Pasal 6a ayat (2) menyebutkan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau <i>gabungan</i> partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."	..an
680	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	"Saya pikir akan ada kesulitan bagaimana hakim MK menerima <i>gugatan</i> dari perseorangan.	..an
681	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Ada perilaku pemilih yang bergerak dari memilih partai ideologis ke individu," ujar Sufy dalam <i>paparan</i> survei kemarin (2/1).	..an
682	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Menanggapi survei tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, <i>temuan</i> tersebut menunjukkan kelembagaan partai yang rentan.	..an
683	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	<i>Paparan</i> survei The Republic Institute tidak dibantah partai politik (parpol).	..an

684	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	<b>Tahapan</b> tes wawancara terhadap 48 bakal calon anggota KPU- Bawaslu RI periode 2022-2027 tuntas pada Jumat (31/12) lalu.	..an
685	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Meski berlangsung lancar dan kondusif, koalisi masyarakat sipil memberikan <b>catatan</b> atas kinerja tim seleksi (timsel) tersebut.	..an
686	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Sementara itu, Bahtiar membantah <b>tudingan</b> keberpihakan.	..an
687	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Dia beralih, setiap anggota timsel memiliki cara dan gaya masing-masing dalam menggali informasi, isi <b>pikiran</b> , sikap, dan pandangan setiap bakal calon.	..an
688	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Arus <b>gugatan</b> terhadap norma <i>presidential threshold</i> atau ambang batas pencalonan presiden terus mengalir.	..an
689	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	<b>Gugatan</b> terbaru pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu itu datang dari 27 warga negara Indonesia (WNI).	..an
690	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, banyaknya <b>gugatan</b> yang datang bukan persoalan.	..an
691	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Terkait waktu penyelesaian, Fajar memastikan perkara yang berkaitan langsung dengan agenda ketatanegaraan, seperti <b>tahapan</b> dan jadwal pemilu, akan menjadi perhatian MK.	..an
692	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Refly Harun, kuasa hukum pemohon, menyatakan, meski <b>gugatan</b> serupa sudah kerap dilakukan dan ditolak, pihaknya tak patah arang.	..an
693	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Faktanya, MK juga pernah mengubah <b>putusan</b> nya untuk perkara yang sama.	..an
694	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan <b>catatan</b> akhir tahun pada bidang ketenagakerjaan.	..an
695	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Dalam <b>catatan</b> ini, PKS berpandangan pemerintah belum berpihak kepada buruh.	..an
696	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Hal ini, ditandai dengan <b>jaminan</b> keselamatan kerja bagi buruh yang semain tidak jelas, bahkan PHK terjadi di mana-mana.	..an
697	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<b>Kedua</b> , dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti <b>jaminan</b> penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta keselamatan buruh yang semakin terabaikan.	..an

698	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Tidak hanya dari internal PKS, diskusi akhir tahun tersebut, juga dihadiri oleh beberapa tokoh dan <i>pimpinan</i> buruh yaitu Vice Presiden FSPMI dan KSPI Iswan Abdulah, Ketua umum SP TSK SPSI Roy Jinto, Ketua SP LEM SPSI Arif Winardi, dan Ketua SPN Djoko Heriyono.	..an
699	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Selain itu, <i>layanan</i> juga bisa lebih komprehensif dan melibatkan berbagai elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.	..an
700	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Sebab, ada sejumlah isu yang menjadi <i>tantangan</i> terkait penataan ruang IKN baru.	..an
701	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Politikus PAN itu mengatakan, salah satu <i>tujuan</i> pemindahan IKN adalah menghindari banjir.	..an
702	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	"Sebab, <i>tujuan</i> ibu kota negara bukan hanya 10 atau 20 tahun ke depan, tetapi untuk menjawab tantangan hingga 50 tahun ke depan," paparnya.	..an
703	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	"Sebab, tujuan ibu kota negara bukan hanya 10 atau 20 tahun ke depan, tetapi untuk menjawab <i>tantangan</i> hingga 50 tahun ke depan," paparnya.	..an
704	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Pansus telah mengundang para ilmuwan dan ahli untuk memberikan <i>masukan</i> dan saran.	..an
705	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Bagi calon-calon yang berasal di luar jakarta pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan seluk beluk Jakarta, dan tak jarang melahirkan <i>pandangan</i> yang kurang tepat yang berimbas pada perlambatan kinerja" ujarnya.	..an
706	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sehingga kekosongan <i>jabatan</i> itu harus diisi oleh penjabat gubernur atau bupati dan wali kota hingga 2024.	..an
707	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Jangan sampai Kemendagri menyeret TNI dan Polri mengisi <i>jabatan</i> yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh Kemendagri dari orang dalam," ujar Guspari kepada wartawan, Selasa (4/1)	..an
708	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Karena kepala daerah adalah <i>jabatan</i> politik.	..an
709	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Bagaimana <i>jabatan</i> politis tidak lagi diisi TNI-Polri tetapi oleh sipil, jadi civil society.	..an
710	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Misalnya saja <i>jabatan</i> gubernur bisa diisi oleh penjabat setingkat Dirjen.	..an

711	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Diketahui, ada 101 Kepala Daerah habis masa <i>jabatan</i> nya tahun 2022.	..an
712	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Dari 101 kepala daerah masa <i>jabatan</i> nya berakhir pada tahun 2022.	..an
713	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	<i>Rincian</i> nya, 7 gubernur, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan habis masa jabatannya.	..an
714	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Rinciannya, 7 gubernur, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan habis masa <i>jabatan</i> nya.	..an
715	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Kemudian, ada 76 bupati dan 18 walikota yang juga habis masa <i>jabatan</i> nya tahun ini.	..an
716	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Adapun, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat (10) dijelaskan penjabat gubernur yang mengisi kekosongan <i>jabatan</i> gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.	..an
717	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Adapun, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat (10) dijelaskan penjabat gubernur yang mengisi kekosongan jabatan gubernur berasal dari <i>jabatan</i> pimpinan tinggi madya.	..an
718	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Adapun, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat (10) dijelaskan penjabat gubernur yang mengisi kekosongan jabatan gubernur berasal dari jabatan <i>pimpinan</i> tinggi madya.	..an
719	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sementara pada ayat (11) dijelaskan untuk mengisi kekosongan bupati/wali kota diangkat penjabat bupati/wali kota dari <i>jabatan</i> pimpinan tinggi pratama.	..an
720	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sementara pada ayat (11) dijelaskan untuk mengisi kekosongan bupati/wali kota diangkat penjabat bupati/wali kota dari jabatan <i>pimpinan</i> tinggi pratama.	..an
721	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Jadi, BRIN secara kelembagaan hanya akan menanyakan proyek penelitian pada awal tahun, kemudian menagih <i>capaian</i> nya pada akhir tahun seperti apa.	..an
722	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Sebab, dengan status ASN penuh, para peneliti tersebut bisa mendapatkan <i>tunjangan</i> seorang peneliti yang besar.	..an

723	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ia pun berharap <i>dukungan</i> dari semua elemen bangsa terhadap RUU TPKS agar korban-korban kekerasan seksual dapat lebih mendapatkan jaminan perlindungan sosial dan hukum.	..an
724	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ia pun berharap dukungan dari semua elemen bangsa terhadap RUU TPKS agar korban-korban kekerasan seksual dapat lebih mendapatkan <i>jaminan</i> perlindungan sosial dan hukum.	..an
725	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Tentu ini adalah <i>jawaban</i> yang ditunggu-tunggu oleh segenap korban maupun keluarganya, dan kita semua.	..an
726	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Lebih jauh, legislator Partai Nasdem ini menuturkan, dalam melaksanakan penuntasan kasus ini, tentunya Kejaksaan Agung akan menghadapi berbagai <i>tantangan</i> dari banyak pihak.	..an
727	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	"Namanya HAM berat, <i>rintangan</i> nya juga berat.	..an
728	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Ketum AHY pasti sudah mengambil berbagai pertimbangan dan <i>masukan</i> sebelum mengambil keputusan.	..an
729	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Beliau tokoh yang sudah makan asam garam di politik lokal maupun nasional, serta sudah menetapkan standar pencapaian yang tinggi, yang menjadi <i>tantangan</i> tersendiri bagi saya untuk bisa menyamainya atau melampauinya," tuturnya.	..an
730	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Sebagai manusia biasa, wajar jika kesal atau marah saat <i>harapan</i> nya tidak terpenuhi.	..an
731	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Apalagi kalau kita lihat dalam gambar besarnya, pak Jeriko sebenarnya tidak dikalahkan, tapi akan diminta untuk memegang amanah <i>jabatan</i> yang lebih terhormat, sebagai penghargaan atas prestasi beliau selama ini," ujarnya.	..an
732	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Dikatakan dia, untuk keputusan pemberian <i>dukungan</i> , PPP Riau memang tetap harus mendapat restu DPP terlebih dahulu.	..an
733	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Seperti survei dan <i>dukungan</i> nyata masyarakat.	..an

734	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	"Kami tentu mesti mendapat restu dulu dari <i>pimpinan</i> DPP.	..an
735	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Tentunya dalam hal ini yang kami ketahui, bila dimungkinkan ada <i>jaminan</i> kemenangan, beliau (Ketum PPP, <i>red</i> ) memberikan izin," ujar Syamsurizal.	..an
736	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Bahkan Suharso juga akan memberikan <i>dukungan</i> penuh kepada kader yang memiliki potensi.	..an
737	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Setakat ini, ia mengklaim sudah mendapat <i>dukungan</i> masyarakat, khususnya masyarakat Riau Pesisir.	..an
738	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	"Kita melihat <i>dukungan</i> masyarakat yang memberikan dukungan sepenuhnya, khususnya masyarakat Meranti, Bengkalis.	..an
739	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	"Kita melihat dukungan masyarakat yang memberikan <i>dukungan</i> sepenuhnya, khususnya masyarakat Meranti, Bengkalis.	..an
740	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Serta daerah Pesisir lainnya yang saat ini telah memberikan <i>dukungan</i> ke saya," tambahnya.	..an
741	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Seperti kitanan massal, donor darah dan pemberian <i>santunan</i> .	..an
742	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	KPI setuju pelaksanaan PTM dengan <i>catatan</i> .	..an
743	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Sekolah tatap muka tersebut dilakukan dengan mengikuti <i>aturan</i> yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.	..an
744	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Adapun <i>aturan</i> yang perlu diikuti adalah terkait dengan pencapaian vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta masyarakat lanjut usia sebagai persyaratan PTM.	..an

745	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Retno pun memberikan <i>catatan</i> sebagai dasar kehati-hatian dalam menggelar PTM 100 persen.	..an
746	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Menurut dia, saat ini RUU TPKS sudah berada di tangan <i>pimpinan</i> DPR.	..an
747	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Terakhir, Sandi dinilai tegas dan cepat dalam menghadapi <i>tantangan</i> .	..an
748	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Ketua DPD Demokrat Provinsi Riau Agung Nugroho menyatakan <i>dukungan</i> penuh kepada Kapolda Riau Mohammad Iqbal.	..an
749	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Hal itu disampaikan Agung usai menerima <i>kunjungan</i> Irjen Iqbal bersama rombongan ke DPRD Riau, Kamis (6/1).	..an
750	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Hal itu disampaikan Agung usai menerima kunjungan Irjen Iqbal bersama <i>rombongan</i> ke DPRD Riau, Kamis (6/1).	..an
751	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Saat itu, Agung sebagai Wakil Ketua DPRD Riau turut menyambut kedatangan Iqbal bersama <i>pimpinan</i> DPRD Riau lainnya.	..an
752	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Dalam kesempatan tersebut, Agung turut menyatakan <i>dukungan</i> kepada Irjen Iqbal dalam melaksanakan tugas-tugas berat kepolisian.	..an
753	07-Jan-22	<b>Komisi II DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	OTT itu terkait pengadaan barang dan jasa serta jual beli <i>jabatan</i> .	..an
754	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Penangkapan ini berkaitan dengan kasus <i>dugaan</i> suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.	..an
755	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Penangkapan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli <i>jabatan</i> .	..an
756	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	<i>Hadirkan</i> tenaga- tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan istitusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan.	...kan
757	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Hadirkan tenaga- tenaga terbaik, <i>libatkan</i> Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan istitusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan.	

758	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Kita <i>harapkan</i> , 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak," ungkapnya.	...kan
759	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUUTPKS</b>	Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami <i>kirimkan</i> ke pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II," katanya.	...kan
760	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUUTPKS</b>	Dengan adanya UU TPKS nanti, kita <i>harapkan</i> kasus-kasus kekerasan seksual tak terjadi lagi dan negara bisa memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap warganya lebih maksimal khususnya kaum perempuan dan anak," tuturnya.	...kan
761	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Pelakunya orang luar dan sudah kami <i>laporkan</i> pada polisi karena merusak atribut partai kami," tegas Lelo.	...kan
762	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Saya pasti akan <i>tempatkan</i> pak Jericho pada posisi yang terhormat dalam kepengurusan DPD yang baru.	...kan
763	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Pansus telah mengundang para <i>ilmuwan</i> dan ahli untuk memberikan masukan dan saran.	...wan
764	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Tak hanya itu, mereka juga melihat sosok Yusril sebagai seorang tokoh <i>negarawan</i> yang dimiliki Indonesia saat ini.	..wan
765	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra <i>mengatakan</i> menuju 2022, ada beberapa catatan yang perlu pemerintah cermati terkait pandemi Covid-19	MeN-kan
766	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky <i>menambahkan</i> , selama pandemi, pemerintah seharusnya fokus pada upaya di bidang kesehatan.	MeN-kan
767	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Jika rakyat sehat, lebih mudah untuk <i>memulihkan</i> ekonomi.	MeN-kan
768	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky <i>menuturkan</i> agar pemerintah lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritikan terkait kebijakan yang diambil.	MeN-kan
769	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	"Jangan kemudian ketika situasi memburuk dan <i>mendapatkan</i> kritikan tajam dari berbagai pihak, baru pemerintah mau mendengarkan.	MeN-kan
770	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	"Jangan kemudian ketika situasi memburuk dan mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak, baru pemerintah mau <i>mendengarkan</i> .	MeN-kan

771	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Direktur Institute for Security and Strategig Studies (ISESS) Khairul Fahmi <i>memberikan</i> catatan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah komando Prabowo Subianto selama satu tahun terakhir.	MeN-kan
772	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Itu <i>menunjukkan</i> bahwa publik belum memahami, karena masih ada pro dan kontra.	MeN-kan
773	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Ini <i>menunjukkan</i> hal-hal ini belum terjelaskan dengan baik," tambahnya.	MeN-kan
774	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Sehingga menurut Fahmi, Prabowo tidak perlu <i>memikirkan</i> mengenai Pilpres 2024.	MeN-kan
775	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Kita <i>mengingatkan</i> sebagai Menteri Pertahanan harus menyelesaikan tugas sebagai Menteri Pertahanan degan baik dan penuh tanggung jawab," pesannya.	MeN-kan
776	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Kita mengingatkan sebagai Menteri Pertahanan harus <i>menyelesaikan</i> tugas sebagai Menteri Pertahanan degan baik dan penuh tanggung jawab," pesannya.	MeN-kan
777	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Jadi fokus <i>menyelesaikan</i> tugas-tugasnya," sambungnya.	MeN-kan
778	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Pasalnya dia <i>menakutkan</i> tugas Prabowo malah akan berbenturan dengan Kementerian Pertanian (Kementan).	MeN-kan
779	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Tapi ada porsi yang <i>melibatkan</i> Kemenhan misalnya cadangan logistik strategis," imbuhnya.	MeN-kan
780	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Ada beberapa belanja <i>menunjukkan</i> progres mengenai kebutuhan alutsista kita yang sebelumnya tidak berjalan sekarang berjalan.	MeN-kan

781	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti kinerja DPD yang tidak <i>menyelesaikan</i> Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di tahun 2021 ini.	MeN-kan
782	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	<i>Membiarkan</i> RUU TPKS tak diakomodir pimpinan DPR RI adalah sinyal butanya nurani.	MeN-kan
783	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Lestari <i>mengatakan</i> , RUU TPKS harus secepatnya disahkan menjadi produk undang-undang.	MeN-kan
784	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Karenanya pimpinan DPR dan semua fraksi di DPR harus punya atur pandangan untuk segera <i>mengesahkan</i> RUU TPKS ini.	MeN-kan
785	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	<i>Mengesahkan</i> RUU TPKS adalah tindakan memihak korban, mewujudkan keadilan dan kebenaran,"ungkapnya.	MeN-kan
786	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Mengesahkan RUU TPKS adalah tindakan memihak korban, <i>mewujudkan</i> keadilan dan kebenaran,"ungkapnya.	MeN-kan
787	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, pengajuan permohonan judicial review (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh individu dan sekelompok orang harus dihormati.	MeN-kan
788	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Menurut Margarito, secara konseptual, UUD 1945 Pasal 6a ayat (2) <i>menyebutkan</i> "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."	MeN-kan
789	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Secara nalar,lanjutnya, parpol yang mempunyai <i>legal standing</i> untuk <i>mempersoalkan</i> presidential threshold.	MeN-kan
790	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Namun, kenyataannya sekarang yang <i>mengajukan</i> adalah individu/kelompok.	MeN-kan
791	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Saya tidak tahu bagaimana jalan pikiran hakim, tetapi saya menduga hakim MK akan dengan mudah <i>mengesampingkan</i> permohonan-permohonan dalam arti tidak diterima," kata Margarito.	MeN-kan

792	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Porsen</b>	Karena dirinya tidak <i>menemukan</i> penalaran yang cukup logis untuk menyerupakan manusia dengan parpol.	MeN-kan
793	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Porsen</b>	Karena dirinya tidak menemukan penalaran yang cukup logis untuk <i>menyerupakan</i> manusia dengan parpol.	MeN-kan
794	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Berdasarkan survei dan riset yang dilakukan The Republic Institute, pemilih cenderung <i>mengutamakan</i> faktor tokoh yang diusung dibandingkan institusi partai itu sendiri.	MeN-kan
795	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Direktur Eksekutif The Republic Institute Sufy Sufyanto <i>mengatakan</i> , sikap pemilih dengan memilih tokoh menunjukkan peningkatan.	MeN-kan
796	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Direktur Eksekutif The Republic Institute Sufy Sufyanto mengatakan, sikap pemilih dengan memilih tokoh <i>menunjukkan</i> peningkatan.	MeN-kan
797	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sufy <i>menjelaskan</i> , menguatkan ketokohan dalam pertimbangan pemilih menunjukkan institut partai politik tidak cukup kuat.	MeN-kan
798	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sufy menjelaskan, <i>menguatkan</i> ketokohan dalam pertimbangan pemilih menunjukkan institut partai politik tidak cukup kuat.	MeN-kan
799	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sufy menjelaskan, menguatkan ketokohan dalam pertimbangan pemilih <i>menunjukkan</i> institut partai politik tidak cukup kuat.	MeN-kan
800	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sufy <i>menyarankan</i> , penentu kandidat dalam pileg harus mementingkan aktor lokal.	MeN-kan
801	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sufy menyarankan, penentu kandidat dalam pileg harus <i>mementingkan</i> aktor lokal.	MeN-kan
802	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Menanggapi survei tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad <i>mengatakan</i> , temuan tersebut menunjukkan kelembagaan partai yang rentan.	MeN-kan
803	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Menanggapi survei tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, temuan tersebut <i>menunjukkan</i> kelembagaan partai yang rentan.	MeN-kan
804	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Konsisten kehadiran bisa dilakukan dengan terus menyerap aspirasi hingga aktif <i>melakukan</i> pendidikan politik secara berkelanjutan.	MeN-kan

805	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Ketua Bawaslu Sumatera Utara Safrida Rasahan <i>menambahkan</i> , faktor personal calon memang mendominasi pertimbangan pemilih.	MeN-kan
806	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sebab, sistem politik Indonesia <i>menggunakan</i> model suara terbanyak.	MeN-kan
807	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Imbasnya sistem suara terbanyak memang <i>menyebabkan</i> personal branding itu penting," ujarnya.	MeN-kan
808	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Untuk <i>memastikan</i> sosok tersebut terpilih dan duduk di parlemen, masyarakat juga tidak bisa mengesampingkan latar belakang partainya.	MeN-kan
809	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Untuk memastikan sosok tersebut terpilih dan duduk di parlemen, masyarakat juga tidak bisa <i>mengesampingkan</i> latar belakang partainya.	MeN-kan
810	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Politikus PDI perjuangan ini menegaskan sampai saat ini tidak ada rencana penggabungan Polri di bawah kementrian.	MeN-kan
811	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir tahun 2021 <i>mengusulkan</i> agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk.	MeN-kan
812	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	" Untuk <i>mewujudkan</i> keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementrian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional.	MeN-kan
813	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Meski berlangsung lancar dan kondusif, koalisi masyarakat sipil <i>memberikan</i> catatan atas kinerja tim seleksi (timsel) tersebut.	MeN-kan
814	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama <i>mengatakan</i> , kebijakan timsel menyiarkan secara umum proses tes wawancara sebagai hal positif.	MeN-kan
815	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama mengatakan, kebijakan timsel <i>menyiarkan</i> secara umum proses tes wawancara sebagai hal positif.	MeN-kan
816	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Namun dari hasil pengamatan koalisi masyarakat sipil, ada sejumlah tindakan anggota timsel yang berpotensi mencederai upaya <i>menghasilkan</i> penyelenggara yang baik.	MeN-kan
817	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Salah satunya adalah tindakan anggota timsel yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bachtiar, yang terindikasi <i>menunjukkan</i> dukungan pada calon tertentu.	MeN-kan

818	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Di sisi lain, timsel juga terkesan <i>menyudutkan</i> beberapa calon.	MeN-kan
819	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	" Apalagi terdapat pernyataan dapat tidak <i>mengucurkan</i> dana pemilu.	MeN-kan
820	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Juru bicara MK Fajar Laksono <i>mengatakan</i> , banyaknya gugatan yang datang bukan persoalan.	MeN-kan
821	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Terkait waktu penyelesaian, Fajar <i>memastikan</i> perkara yang berkaitan langsung dengan agenda ketatanegaraan, seperti tahapan dan jadwal pemilu, akan menjadi perhatian MK.	MeN-kan
822	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Namun, Fajar <i>mengingatkan</i> , kecepatan penyelesaian perkara tidak hanya bergantung kepada MK.	MeN-kan
823	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Sementara itu, dalam permohonannya, 27 WNI <i>menyampaikan</i> sejumlah dalil.	MeN-kan
824	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Refly Harun, kuasa hukum pemohon, <i>menyatakan</i> , meski gugatan serupa sudah kerap dilakukan dan ditolak, pihaknya tak patah arang.	MeN-kan
825	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Refly <i>menjelaskan</i> , kondisi faktual Pemilu Presiden (Pilpres 2019) di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik bisa menjadi dasar.	MeN-kan
826	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Refly menjelaskan, kondisi faktual Pemilu Presiden (Pilpres 2019) di mana pemilih tidak <i>mendapatkan</i> calon-calon alternatif terbaik bisa menjadi dasar.	MeN-kan
827	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Penggunaan ambang batas untuk <i>mengajukan</i> calon presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin," ujar pakar hukum tata negara itu.	MeN-kan
828	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu <i>menyediakan</i> dan menyeleksi calon pemimpin," ujar pakar hukum tata negara itu.	MeN-kan
829	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) <i>mengeluarkan</i> catatan akhir tahun pada bidang ketenagakerjaan.	MeN-kan

830	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Presiden PKS Ahmad Syaikh <i>menegaskan</i> , agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) untuk mencabut UU No 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	MeN-kan
831	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Presiden PKS Ahmad Syaikh <i>menegaskan</i> , agar pemerintah segera <i>mengeluarkan</i> Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) untuk mencabut UU No 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	MeN-kan
832	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Martri Agoeng <i>memberikan</i> beberapa catatan penting di akhir tahun 2021, khususnya bidang ketenagakerjaan.	MeN-kan
833	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Pertama</i> , kondisi buruh yang semakin hari semakin <i>memprihatinkan</i> .	MeN-kan
834	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Martri Agoeng <i>menegaskan</i> "Seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab negara yang harus diselesaikan," ungkapnya.	MeN-kan
835	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Martri Agoeng <i>menjelaskan</i> , banyak masyarakat bekerja keluar negeri bukan karena keinginan, tetapi ada keterpaksaan yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan di dalam negeri yang sangat sedikit, walaupun ada gaji yang ditawarkan tidak layak.	MeN-kan
836	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Harus ada regulasi UU yang mampu <i>memberikan</i> perlindungan secara menyeluruh kepada PMI meliputi dari sebelum keberangkatan, ketika penempatan dan kemudian saat kembali lagi ke tanah air, sehingga PMI merasa tenang dalam bekerja," tuturnya.	MeN-kan
837	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo <i>mengatakan</i> , pihaknya akan melakukan pengembangan organisasi, di mana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat sendiri di Mabes Polri.	MeN-kan
838	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo <i>mengatakan</i> , pihaknya akan melakukan pengembangan organisasi, di mana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat sendiri di Mabes Polri.	MeN-kan
839	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni <i>mengatakan</i> , itu adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.	MeN-kan

840	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Ini momentum yang sangat progresif di mana polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga <i>memastikan</i> terbentuknya direktorat khusus yang memang menangani bidang ini, dan memang sudah sangat urgent sekali barang ini," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/1).	MeN-kan
841	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Legislator Partai Nasdem <i>menambahkan</i> bahwa dengan adanya Direktorat PPA nanti, diharapkan penanganan kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak bisa lebih maksimal.	MeN-kan
842	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Selain itu, layanan juga bisa lebih komprehensif dan <i>melibatkan</i> berbagai elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.	MeN-kan
843	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	" Kalau sudah ada direktoratnya kan polisi bisa lebih fokus <i>menghadirkan</i> layanan yang lebih maksimal pada korban.	MeN-kan
844	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Mereka tidak hanya <i>mendapatkan</i> perlindungan, tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya.	MeN-kan
845	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	"Setelah Pak Kapolri membentuk wadahnya, saya minta kepada seluruh kepolisian agar betul-betul bekerja <i>memaksimalkan</i> perlindungan terhadap perempuan dan anak.	MeN-kan
846	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo <i>mengatakan</i> dalam rangka meningkatkan pelayanan pada korban, maka Polri akan melakukan pengembangan organisasi, di mana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat sendiri di Mabes Polri.	MeN-kan
847	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan dalam rangka <i>meningkatkan</i> pelayanan pada korban, maka Polri akan melakukan pengembangan organisasi, di mana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat sendiri di Mabes Polri.	MeN-kan
848	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada korban, maka Polri akan <i>melakukan</i> pengembangan organisasi, di mana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat sendiri di Mabes Polri.	MeN-kan
849	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Anggota panitia khusus (pansus) RUU IKN Gusparadi Gaus <i>mengatakan</i> , hal itu menjadi perhatian banyak pihak.	MeN-kan

850	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Politikus PAN itu <i>mengatakan</i> , salah satu tujuan pemindahan IKN adalah menghindari banjir.	MeN-kan
851	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Selain itu, lanjut Guspari, pemindahan IKN bertujuan <i>menyelesaikan</i> persoalan-persoalan yang terjadi di DKI Jakarta.	MeN-kan
852	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Menurut anggota Komisi II DPR tersebut, semua indikator itu <i>menunjukkan</i> bahwa penataan ruang merupakan isu yang sangat penting.	MeN-kan
853	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Pansus telah mengundang para ilmuwan dan ahli untuk <i>memberikan</i> masukan dan saran.	MeN-kan
854	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Karena itu, niat <i>memindahkan</i> IKN ke kabupaten tersebut layak ditinjau kembali.	MeN-kan
855	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Dia <i>menambahkan</i> , memindahkan IKN itu tidak perlu dilakukan tergesa-gesa.	MeN-kan
856	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Dia menambahkan, <i>memindahkan</i> IKN itu tidak perlu dilakukan tergesa-gesa.	MeN-kan
857	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Tidak seperti <i>memindahkan</i> gubuk di ladang.	MeN-kan
858	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Estatet kepemimpinan di ibu kota mensyaratkan sosok yang memiliki pemaknaan akan kota dan masyarakat Jakarta agar dapat <i>meneruskan</i> keberhasilan Anies.	MeN-kan
859	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Sebab menurut pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono, sosok yang harusnya pantas <i>menggantikan</i> Anies adalah figur baru harus memahami karakteristik Jakarta secara utuh dan menyeluruh agar berkesinambungan dengan pemimpin terdahulu.	MeN-kan
860	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Dia melihat, sebaiknya warga Jakarta memberi kepercayaan pada tokoh lokal, sebab kompleksitas Ibu Kota <i>membutuhkan</i> sosok yang langsung <i>running</i> setelah terpilih.	MeN-kan
861	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Bagi calon-calon yang berasal di luar Jakarta pasti <i>membutuhkan</i> waktu untuk beradaptasi dengan seluk beluk Jakarta, dan tak jarang melahirkan pandangan yang kurang tepat yang berimbas pada perlambatan kinerja" ujarnya.	MeN-kan

862	04-Jan-22	Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta	"Bagi calon-calon yang berasal di luar Jakarta pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan seluk beluk Jakarta, dan tak jarang <i>melahirkan</i> pandangan yang kurang tepat yang berimbas pada perlambatan kinerja" ujarnya.	MeN-kan
863	04-Jan-22	Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta	Lebih lanjut, Yusuf juga <i>mengatakan</i> , Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria (Ariza) dianggap tokoh yang paling berpeluang mengingat posisinya saat ini sebagai orang nomor dua di Jakarta. Sosok lain juga dianggap layak adalah Silvyana Murni, mantan birokrat dan Ketua Komite 3 DPR-RI dapil Jakarta.	MeN-kan
864	05-Jan-22	DPD Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri	Guspari <i>menjelaskan</i> penjabat kepala daerah tidak diambil dari TNI dan Polri.	MeN-kan
865	05-Jan-22	Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi	Dia <i>mengatakan</i> , memang ada peneliti honorer Eijkman yang keberatan, bahkan tidak mau bergabung dengan BRIN.	MeN-kan
866	05-Jan-22	Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi	Dia lantas <i>menyebutkan</i> salah satu pemicunya.	MeN-kan
867	05-Jan-22	Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi	Merespons itu, dia <i>menegaskan</i> budaya kerja di BRIN tidak seperti birokrasi di lembaga pemerintah lainnya.	MeN-kan
868	05-Jan-22	Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi	Jadi, BRIN secara kelembagaan hanya akan <i>menanyakan</i> proyek penelitian pada awal tahun, kemudian menagih capaiannya pada akhir tahun seperti apa.	MeN-kan
869	05-Jan-22	Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi	Selain itu, Handoko <i>menyampaikan</i> , di LBME ada kegiatan-kegiatan penelitian di luar ketentuan.	MeN-kan
870	05-Jan-22	Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi	Sehingga menguntungkan periset honorer eijkman dari aspek finansial.	MeN-kan
871	05-Jan-22	Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi	Padahal, ketika eijkman selama ini menggunakan anggaran dari APBN, seluruh kegiatannya harus sesuai dengan ketentuan keuangan negara.	MeN-kan
872	05-Jan-22	Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi	Namun, Handoko <i>menegaskan</i> tidak mau berpikir ke belakang.	MeN-kan
873	05-Jan-22	Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi	Dia menyebut BRIN sudah memberikan kesempatan kepada para periset honorer eijkman untuk masuk ke BRIN.	MeN-kan

874	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Handoko <i>mengatakan</i> sejatinya penggabungan Eijkman ke BRIN membawa dampak positif.	MeN-kan
875	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Sebab, dengan status ASN penuh, para peneliti tersebut bisa <i>mendapatkan</i> tunjangan seorang peneliti yang besar.	MeN-kan
876	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Handoko <i>mengatakan</i> , sebagai ASN peneliti penuh, mereka bisa mendapatkan gaji sekitar Rp25 juta setiap bulan.	MeN-kan
877	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Handoko mengatakan, sebagai ASN peneliti penuh, mereka bisa <i>mendapatkan</i> gaji sekitar Rp25 juta setiap bulan.	MeN-kan
878	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ia <i>menegaskan</i> komitmen DPR bersama-sama pemerintah untuk cepat mengesahkan RUU TPKS yang banyak diharapkan masyarakat itu.	MeN-kan
879	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ia menegaskan komitmen DPR bersama-sama pemerintah untuk cepat <i>mengesahkan</i> RUU TPKS yang banyak diharapkan masyarakat itu.	MeN-kan
880	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang <i>menegaskan</i> perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sudah mendesak untuk segera ditangani dengan hadirnya RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR," ujar Puan kepada wartawan, Selasa (4/1).	MeN-kan
881	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan <i>memastikan</i> pihaknya akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR.	MeN-kan
882	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan memastikan pihaknya akan segera <i>mengesahkan</i> RUU TPKS sebagai inisiatif DPR.	MeN-kan
883	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan sendiri sudah berkali-kali menyatakan DPR siap bekerja cepat agar RUU TPKS bisa disahkan.	MeN-kan
884	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Baleg DPR RI sudah <i>merampungkan</i> pembahasan RUU TPKS.	MeN-kan
885	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan menyambut langsung Presiden Jokowi yang telah meminta Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk <i>menyiapkan</i> Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang disiapkan oleh DPR.	MeN-kan
886	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	DPR RI <i>memastikan</i> siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah ke depan.	MeN-kan

887	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan meminta pihak pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat <b>memperhatikan</b> <u>.(seharusnya <b>memprihatinkan</b>)</u>	MeN-kan
888	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan <b>mengingatkan</b> kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat darurat.	MeN-kan
889	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ia pun berharap dukungan dari semua elemen bangsa terhadap RUU TPKS agar korban-korban kekerasan seksual dapat lebih <b>mendapatkan</b> jaminan perlindungan sosial dan hukum.	MeN-kan
890	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Dengan adanya UU TPKS nanti, kita harapkan kasus-kasus kekerasan seksual tak terjadi lagi dan negara bisa <b>memberikan</b> perlindungan dan pelayanan terhadap warganya lebih maksimal khususnya kaum perempuan dan anak," tuturnya.	MeN-kan
891	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Jokowi mengaku telah <b>memerintahkan</b> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga untuk berkoordinasi dengan DPR terkait RUU tersebut.	MeN-kan
892	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Di samping itu, kepala negara juga telah meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera <b>menyiapkan</b> Daftar Inventarisasi Masalah terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI.	MeN-kan
893	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Dengan demikian, proses pembahasan bersama nanti lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk <b>memberikan</b> kepastian hukum, serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.	MeN-kan
894	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Sehingga dia berharap RUU TPKS ini bisa segera disahkan dan dapat <b>memberikan</b> perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air.	MeN-kan
895	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan <b>memperkenalkan</b> Charly van Houten atau lebih dikenal sebagai Charly ST12 atau Charly Setiaku sebagai kader dan calon anggota legislatif terbaru partai tersebut.	MeN-kan

896	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Diketahui pada 7 Juni 2021 lalu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer <b>mengatakan</b> bahwa Charly van Houten bersama dengan Andika Mahesa 'Kangen Band' telah bergabung ke partai yang dikepalai oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut.	MeN-kan
897	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Jaksa Agung ST Burhanudin <b>menyampaikan</b> janjinya pada tahun 2022 yang akan menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.	MeN-kan
898	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Jaksa Agung ST Burhanudin menyampaikan janjinya pada tahun 2022 yang akan <b>menuntaskan</b> kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.	MeN-kan
899	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni <b>mengatakan</b> , komitmen Jaksa Agung ini perlu terus didukung dan dimonitor pelaksanaannya.	MeN-kan
900	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	"Saya sangat mengapresiasi komitmen jaksa agung yang bertujuan untuk <b>menuntaskan</b> kasus pelanggaran HAM berat.	MeN-kan
901	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Lebih jauh, legislator Partai Nasdem ini <b>menuturkan</b> , dalam melaksanakan penuntasan kasus ini, tentunya Kejaksaan Agung akan menghadapi berbagai tantangan dari banyak pihak.	MeN-kan
902	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Lebih jauh, legislator Partai Nasdem ini menuturkan, dalam <b>melaksanakan</b> penuntasan kasus ini, tentunya Kejaksaan Agung akan menghadapi berbagai tantangan dari banyak pihak.	MeN-kan
903	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanudin <b>menyampaikan</b> janjinya pada tahun 2022 yang akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.	MeN-kan
904	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanudin menyampaikan janjinya pada tahun 2022 yang akan <b>menuntaskan</b> kasus pelanggaran HAM berat.	MeN-kan
905	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Terkait insiden pembakaran atribut Parta Demokrat, Lelo <b>mengungkapkan</b> bahwa pelakunya bukan kader partai.	MeN-kan
906	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Lelo juga berjanji akan segera berkomunikasi dengan ketua DPD sebelumnya, Jefry Riwu Kore (Jeriko) untuk mengajaknya bersama-sama membangun dan <b>membesarkan</b> Partai Demokrat di NTT.	MeN-kan

907	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Beliau tokoh yang sudah makan asam garam di politik lokal maupun nasional, serta sudah <i>menetapkan</i> standar pencapaian yang tinggi, yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa menyamainya atau melampauinya," tuturnya.	MeN-kan
908	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	PT Pertamina (Persero) saat ini tidak hanya fokus pada bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi juga mulai <i>melebarkan</i> sayapnya.	MeN-kan
909	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir <i>memastikan</i> bisnis baru Pertamina itu akan berjalan.	MeN-kan
910	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian BUMN telah <i>menugaskan</i> kepada Pertamina untuk menyiapkan sejumlah langkah bisnis di sektor tersebut.	MeN-kan
911	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian BUMN telah menugaskan kepada Pertamina untuk <i>menyiapkan</i> sejumlah langkah bisnis di sektor tersebut.	MeN-kan
912	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Erick juga <i>memastikan</i> , perluasan bisnis Pertamina mampu mengurangi beban Indonesia terhadap baku obat maupun bahan baju-bajuan yang saat ini masih di impor.	MeN-kan
913	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Ketua Komisi VI DPR RI Faizol Riza mengakui Pertamina saat ini memiliki bahan baku yang sangat cukup untuk <i>mengembangkan</i> produk petrochemical, namun perlu ada perhitungan secara cermat.	MeN-kan
914	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Menanggapi rencana Pertamina itu, Ketua Komisi VI DPR RI Faizo Riza mengakui Pertamina saat ini memiliki bahan baku yang sangat cukup untuk <i>mengembangkan</i> produk petro chemical, namun perlu ada perhitungan secara cermat.	MeN-kan
915	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Ya memang Pertamina memiliki bahan baku yang sangat cukup untuk <i>mengembangkan</i> produk produk petro chemical.	MeN-kan
916	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Tetapi mungkin perlu dihitung secara cermat apakah produk produk itu sekarang kita impor banyak salah satunya metanol itu dibutuhkan industri dalam negeri kita atau <i>memungkinkan</i> untuk memasok pasar luar" kata Faizol Riza dalam keterangannya, Rabu (5/1).	MeN-kan

917	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Namun, lanjut Faizol, langkah Pertamina <i>mengembangkan</i> petrochemical ini akan berjalan baik jika bahan baku produk Pertamina sendiri bisa disimpan dan bisa dimonotaise,hingga tidak mengakibatkan kerugian karena tidak terserap oleh pasar.	MeN-kan
918	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Namun, lanjut Faizol, langkah Pertamina mengembangkan petrochemical ini akan berjalan baik jika bahan baku produk Pertamina sendiri bisa disimpan dan bisa dimonotaise,hingga tidak <i>mengakibatkan</i> kerugian karena tidak terserap oleh pasar.	MeN-kan
919	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Sehingga tidak <i>mengakibatkan</i> kerugian akibat dari produksi yang tidak terserap oleh pasar," jelasnya.	MeN-kan
920	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Anak buah Muhaimin Iskandar ini menyadari betul, Indonesia masih <i>membutuhkan</i> bahan baku obat karena sejauh ini Indonesia masih bergantung pada impor, dan langkah Erick Thohir untuk mengembangkan petrochemical sangat tepat.	MeN-kan
921	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Anak buah Muhaimin Iskandar ini menyadari betul, Indonesia masih membutuhkan bahan baku obat karena sejauh ini Indonesia masih bergantung pada impor, dan langkah Erick Thohir untuk <i>mengembangkan</i> petrochemical sangat tepat.	MeN-kan
922	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Kalau bahan baku obat misalnya memang kita sangat <i>membutuhkan</i> dan itu hanya bisa disediakan selama ini melalui bahan baku impor bisa kita isi, memang akan sangat baik buat produksi dalam negeri," akuinya.	MeN-kan
923	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Namun begitu, beberapa partai politik sudah <i>mendeklarasikan</i> untuk mengusung kader, agar bisa maju pada Pilkada,khususnya Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri).	MeN-kan
924	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Di mana, bila situasi <i>memungkinkan</i> pasca pemilihan legislatif (Pileg) yang digelar lebih awal, PPP akan mengusungkan calon sendiri untuk Pilgubri 2024.	MeN-kan
925	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Di mana, bila situasi memungkinkan pasca pemilihan legislatif (Pileg) yang digelar lebih awal, PPP akan <i>mengusungkan</i> calon sendiri untuk Pilgubri 2024.	MeN-kan

926	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Tentunya dalam hal ini yang kami ketahui, bila dimungkinkan ada jaminan kemenangan, beliau (Ketum PPP, <i>red</i> ) <b>memberikan</b> izin," ujar Syamsurizal.	MeN-kan
927	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Bupati Bengkalis dua periode ini <b>menambahkan</b> , Ketum PPP Suharso Monoarfa sendiri memang sempat memberikan lampu hijau bagi kader yang memiliki keinginan maju sebagai kepala daerah.	MeN-kan
928	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Bupati Bengkalis dua periode ini menambahkan, Ketum PPP Suharso Monoarfa sendiri memang sempat <b>memberikan</b> lampu hijau bagi kader yang memiliki keinginan maju sebagai kepala daerah.	MeN-kan
929	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Bahkan Suharso juga akan <b>memberikan</b> dukungan penuh kepada kader yang memiliki potensi.	MeN-kan
930	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	"Kita melihat dukungan masyarakat yang <b>memberikan</b> dukungan sepenuhnya, khususnya masyarakat Meranti, Bengkalis.	MeN-kan
931	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Serta daerah Pesisir lainnya yang saat ini telah <b>memberikan</b> dukungan ke saya," tambahnya.	MeN-kan
932	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Untuk diketahui, DPW PPP Riau <b>melaksanakan</b> perayaan hari lahir PPP ke-49 di Pekanbaru, Rabu (5/1).	MeN-kan
933	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Sementara itu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti pun <b>menyampaikan</b> bahwa mendukung hal ini.	MeN-kan
934	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	"KPAI mendukung hal tersebut, karena sejak awal pembukaan PTM terbatas, KPAI sudah <b>menyampaikan</b> rekomendasi kepada pemerintah agar vaksinasi peserta didik dijadikan persyaratan penyelenggaraan PTM, yaitu minimal 70 persen warga sekolah sudah di vaksin," ujar dia dikutip, Rabu (5/1).	MeN-kan

935	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Adapun soal PTM terbatas yang telah dimulai sejak Januari 2021 ini, KPAI juga telah <i>melakukan</i> pemantauan di sejumlah sekolah pada 8 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat , Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.	MeN-kan
936	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	"Pengawasan PTM ini dilakukan dalam upaya <i>memastikan</i> perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak-anak di masa pandemi Covid-19.	MeN-kan
937	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Retno pun <i>memberikan</i> catatan sebagai dasar kehati-hatian dalam menggelar PTM 100 persen.	MeN-kan
938	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Untuk indikator kesiapan sekolah yang sudah <i>menyelenggarakan</i> PTM terbatas dengan kategori cukup, baik dan sangat baik mencapai 79,17 persen.	MeN-kan
939	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Saat diwawancarai, anak-anak <i>mengatakan</i> mereka memakai masker saat diperjalanan pergi dan pulang sekolah. Ada pemahaman yang salah terkait fungsi masker yang disamakan dengan helm.	MeN-kan
940	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Presiden <i>menyatakan</i> mencermati perjalanan RUU TPKS.	MeN-kan
941	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Di samping itu, kepala negara telah meminta kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk segera <i>menyiapkan</i> daftar inventarisasi masalah (DIM).	MeN-kan
942	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Jokowi ingin pembahasan langsung masuk pokok-pokok substansi untuk <i>memberikan</i> kepastian hukum.	MeN-kan
943	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	"Saya harap RUU Tndak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan sehingga dapat <i>memberikan</i> perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air," tegasnya.	MeN-kan
944	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Langkah selanjutnya adalah pengesahan di rapat paripurna untuk <i>menetapkan</i> sebagai RUU inisiatif DPR.	MeN-kan
945	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno beberapa waktu lalu pernah <i>menyatakan</i> keengganannya untuk ikut maju dalam bursa calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.	MeN-kan

946	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Ketua Umum Seduler Sandiaga Uno, Mahendra, dikutip dari Antara, <i>memaparkan</i> sejumlah alasan mengapa Sandi layak maju Pilpres 2024.	MeN-kan
947	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	"Sandiaga Uno diharapkan dapat <i>melanjutkan</i> kepemimpinan Joko Widodo karena sangat memahami rakyat Indonesia," karena Mahendra melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (5/1).	MeN-kan
948	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan lain yang membuat Sandiaga Uno layak maju karena selama setahun terakhir, Sandi telah berkeliling Indonesia dan mengunjungi lebih dari 50 desa wisata dan <i>mempromosikan</i> serta memperluas manfaat pariwisata.	MeN-kan
949	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	"Bukti nyatanya program OK OCE yang telah <i>menghasilkan</i> puluhan ribu wirausahawan baru sejak 2017 dan aktif lebih dari 197 komunitas di seluruh Indonesia," katanya.	MeN-kan
950	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Tim seleksi (timsel) KPU-Bawaslu akhirnya <i>menuntaskan</i> tugasnya.	MeN-kan
951	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Kemarin (6/1) timsel telah <i>menyerahkan</i> 24 nama calon kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).	MeN-kan
952	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Ketua Timsel Juri Ardiantoro <i>mengatakan</i> , nama-nama yang disetorkan merupakan sosok terbaik dari berbagai tes yang digelar.	MeN-kan
953	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Terkait proses selanjutnya, Juri <i>menyerahkan</i> penuh kepada presiden.	MeN-kan
954	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengapresiasi kerja timsel yang <i>menuntaskan</i> kerja tepat waktu.	MeN-kan
955	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus <i>menuturkan</i> , calon-calon yang lolos harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang kepemiluan dan kompleksitasnya.	MeN-kan
956	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Ketua DPD Demokrat Provinsi Riau Agung Nugroho <i>menyatakan</i> dukungan penuh kepada Kapolda Riau Mohammad Iqbal.	MeN-kan
957	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Dalam kesempatan tersebut, Agung turut <i>menyatakan</i> dukungan kepada Irjen Iqbal dalam melaksanakan tugas-tugas berat kepolisian.	MeN-kan

958	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Dalam kesempatan tersebut, Agung turut menyatakan dukungan kepada Irjen Iqbal dalam <i>melaksanakan</i> tugas-tugas berat kepolisian.	MeN-kan
959	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Secara menyeluruh ada puluhan ribu kader yang siap <i>menyukseskan</i> kinerja Polda Riau di bawah kepemimpinan Irjen Iqbal.	MeN-kan
960	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Secara menyeluruh ada puluhan ribu kader yang siap menyukseskan kinerja Polda Riau di bawah <i>kepemimpinan</i> Irjen Iqbal.	MeN-kan
961	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	"Kami selaku Wakil Ketua DPRD Riau dan juga Ketua Demokrat Riau yang menaungi 58 anggota DPRD se-Riau siap mendukung dan <i>menyukseskan</i> kerja Kapolda di Bumi Lancang Kuning," tegasnya.	MeN-kan
962	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Hal itu menurut Agung <i>membuktikan</i> Irjen Iqbal sangat paham dengan karakteristik budaya Melayu yang menjunjung tinggi nilai silaturahmi.	MeN-kan
963	07-Jan-22	<b>Komisi II DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni <i>mengatakan</i> OTT terhadap kepala daerah ini menunjukkan bahwa KPK tetap bisa tajam dalam melakukan penangkapan, dan tidak seperti yang ditakutkan berbagai pihak selama ini.	MeN-kan
964	07-Jan-22	<b>Komisi II DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni <i>mengatakan</i> OTT terhadap kepala daerah ini <i>menunjukkan</i> bahwa KPK tetap bisa tajam dalam melakukan penangkapan, dan tidak seperti yang ditakutkan berbagai pihak selama ini.	MeN-kan
965	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni <i>mengatakan</i> OTT terhadap kepala daerah ini menunjukkan bahwa KPK tetap bisa tajam dalam <i>melakukan</i> penangkapan, dan tidak seperti yang ditakutkan berbagai pihak selama ini.	MeN-kan
966	07-Jan-22	<b>Komisi II DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Namun penangkapan ini <i>menunjukkan</i> bahwa berbagai kekhawatiran itu tidak terbukti, dan KPK tetap tajam dalam melakukan penangkapan.	MeN-kan
967	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Namun penangkapan ini menunjukkan bahwa berbagai kekhawatiran itu tidak terbukti, dan KPK tetap tajam dalam <i>melakukan</i> penangkapan.	MeN-kan

968	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Legislator Partai Nasdem ini menyebut bahwa penangkapan ini juga <b>membuktikan</b> kualitas kerja KPK yang baru, di mana mereka bekerja sangat hati-hati.	MeN-kan
969	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Meski banyak yang <b>meragukan</b> , namun lembaga itu tetap berkomitmen dalam memberantas korupsi, dan hal ini dibuktikan melalui kerja nyatanya.	MeN-kan
970	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	KPK <b>melaksanakan</b> OTT terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmad Effendi.	MeN-kan
971	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Apalagi dalam <b>menghadapai</b> Omicron dan varian-varian selanjutnya dari Covid-19.	MeN-i
972	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Bingung fokus ke kesehatan atau ekonomi, ujung-ujungnya dua-duanya berantakan dan <b>mengalami</b> perlambatan," katanya.	MeN-i
973	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Hampir 1,5 tahun rakyat bingung dan <b>menghadapi</b> kesulitan luar biasa, dari terancam nyawa karena Covid-19, dan kemudian karena kondisi ekonomi memburuk.	MeN-i
974	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Misalnya masih ada polemik yang <b>menyertai</b> misalnya tentang kebijakan yang diluncurkan atau dijalankan.	MeN-i
975	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Itu menunjukkan bahwa publik belum <b>memahami</b> , karena masih ada pro dan kontra.	MeN-i
976	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Selain itu juga <b>mengenai</b> transparansi ke publik.	MeN-i
977	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Padahal publik perlu <b>mengetahui</b> mengenai langkah-langkah strategis Kemenhan.	MeN-i
978	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Padahal publik perlu mengetahui <b>mengenai</b> langkah-langkah strategis Kemenhan.	MeN-i

979	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap <i>mengikuti</i> rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta.	MeN-i
980	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Sehingga menurut Fahmi, Prabowo tidak perlu memikirkan <i>mengenai</i> Pilpres 2024.	MeN-i
981	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Kemudian <i>mengenai</i> program <i>Food Estate</i> yang digagas oleh Presiden Jokowi, Fahmi juga berpesan agar Prabowo bertugas sesuai dengan tupoksinya.	MeN-i
982	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Ada beberapa belanja menunjukkan progres <i>mengenai</i> kebutuhan alutsista kita yang sebelumnya tidak berjalan sekarang berjalan.	MeN-i
983	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat <i>menyoroti</i> kinerja DPD yang tidak menyelesaikan Rancangan `Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di tahun 2021 ini.	MeN-i
984	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Hal ini agar masyarakat <i>mempunyai</i> instrumen pelindung bagi para pelaku-pelaku kejahatan seksual.	MeN-i
985	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Secara nalar, lanjutnya, parpol yang <i>mempunyai legal standing</i> untuk mempersoalkan <i>presidential threshold</i> .	MeN-i
986	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	<i>Menanggapi</i> survei tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, temuan tersebut menunjukkan kelembagaan partai yang rentan.	MeN-i
987	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo <i>menanggapi</i> isu terkait penggabungan Polri di bawah kementrian.	MeN-i
988	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Namun dari hasil pengamatan koalisi masyarakat sipil, ada sejumlah tindakan anggota timsel yang berpotensi <i>mencederai</i> upaya menghasilkan penyelenggara yang baik.	MeN-i

989	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	"Jika memang pujian tersebut bagian dari strategi <i>mendalami</i> calon seharusnya juga dilakukan secara merata kepada calon- calon yang lain," ujarnya kemarin (2/1).	MeN-i
990	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Dia berdalih, setiap anggota timsel <i>memiliki</i> cara dan gaya masing-masing dalam menggali informasi, isi pikiran, sikap, dan pandangan setiap bakal calon.	MeN-i
991	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Satu sama lain tidak bisa saling <i>mempengaruhi</i> terhadap pilihan tertentu.	MeN-i
992	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	"Kita ini objektif, setiap anggota timsel itu <i>memiliki</i> hak indenpendensi, setiap anggota timsel itu indenpendensinya sangat tinggi." tegas Bahtiar.	MeN-i
993	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Sebab, pihaknya <i>meyakini</i> , dalam ilmu hukum dikenal prinsip <i>law changes by reasons</i> .	MeN-i
994	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Dari aspek konstitusi, pihaknya <i>meyakini</i> bahwa norma ambang batas pencalonan presiden melanggar ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang memberi hak partai politik mengusung calon presiden.	MeN-i
995	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	<i>Menanggapi</i> hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, itu adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.	MeN-i
996	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Hadirkan tenaga- tenaga terbaik, libatkan Polwan yang <i>memiliki</i> perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan istitusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan.	MeN-i
997	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Politikus PAN itu mengatakan, salah satu tujuan pemindahan IKN adalah <i>menghindari</i> banjir.	MeN-i
998	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Pembahasan RUU IKN kini <i>memasuki</i> tahap inventarisasi masalah.	MeN-i
999	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Estafet kepemimpinan di ibu kota mensyaratkan sosok yang <i>memiliki</i> pemaknaan akan kota dan masyarakat Jakarta agar dapat meneruskan keberhasilan Anies.	MeN-i

1000	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Sebab menurut pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono, sosok yang harusnya pantas menggantikan Anies adalah figur baru harus <i>memahami</i> karakteristik Jakarta secara utuh da menyeluruh agar berkesinambungan dengan pemimpin terdahulu.	MeN-i
1001	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Anies Baswedan sebagai pertahanan <i>memiliki</i> peluang besar dan dapat terpilih kembali. Namun, jalan menuju Calon Presiden (Capres) 2024 menurut saya lebih menarik baginya," kata pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono di Jakarta, Senin (3/1).	MeN-i
1002	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	<i>Menanggapi</i> hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Guspari Gaus meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak mengangkat penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri.	MeN-i
1003	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Apalagi kita akan <i>menghadapi</i> Pilpres Pileg, Pilkada," katanya.	MeN-i
1004	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Syaratnya harus <i>memiliki</i> kualifikasi S-3, sesuai dengan ketentuan riset dunia.	MeN-i
1005	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan menyambut langsung Presiden Jokowi yang telah meminta Gugus Tugas Pemerintah yang <i>menangani</i> RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang disiapkan oleh DPR.	MeN-i
1006	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan meminta pihak pemerintah <i>memiliki</i> komitmen yang sama dengan pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memperhatikan.	MeN-i
1007	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Di samping itu, kepala negara juga telah meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang <i>menangani</i> RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI.	MeN-i
1008	05-Jan-22	<b>Charly S T12 Jadi Kader PAN</b>	Nantinya, Charly akan menjadi caleg di Pileg 2024 dari Dapil Jabar VIII yang <i>meliputi</i> Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.	MeN-i

1009	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Charly <i>mengakui</i> bahwa kepindahannya ke PAN adalah perintah Zulkifli Hasan agar dia bisa menjadi caleg di pileg 2024 mendatang.	MeN-i
1010	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	<i>Menanggapi</i> hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, komitmen Jaksa Agung ini perlu terus didukung dan dimonitor pelaksanaannya.	MeN-i
1011	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Lebih jauh, legislator Partai Nasdem ini menuturkan, dalam melaksanakan penuntasan kasus ini, tentunya Kejaksaan Agung akan <i>menghadapi</i> berbagai tantangan dari banyak pihak.	MeN-i
1012	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru Leonardus Lelo mengajak semua pihak untuk <i>menghormati</i> keputusan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.	MeN-i
1013	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Saya pribadi sangat <i>menghargai</i> pak Jeriko, dan sangat menghormati pencapaian-pencapaian beliau selama ini.	MeN-i
1014	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Saya pribadi sangat menghargai pak Jeriko, dan sangat <i>menghormati</i> pencapaian-pencapaian beliau selama ini.	MeN-i
1015	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Beliau tokoh yang sudah makan asam garam di politik lokal maupun nasional, serta sudah menetapkan standar pencapaian yang tinggi, yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa <i>menyamai</i> nya atau melampauinya," tuturnya.	MeN-i
1016	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Beliau tokoh yang sudah makan asam garam di politik lokal maupun nasional, serta sudah menetapkan standar pencapaian yang tinggi, yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa menyamainya atau <i>melampaui</i> nya," tuturnya.	MeN-i
1017	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Erick juga memastikan, perluasan bisnis Pertamina mampu <i>mengurangi</i> beban Indonesia terhadap baku obat maupun bahan baju-bajuan yang saat ini masih di impor.	MeN-i
1018	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Ketua Komisi VI DPR RI Faizol Riza <i>mengakui</i> Pertamina saat ini memiliki bahan baku yang sangat cukup untuk mengembangkan produk petrochemical, namun perlu ada perhitungan secara cermat.	MeN-i

1019	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Ketua Komisi VI DPR RI Faizol Riza mengakui Pertamina saat ini <i>memiliki</i> bahan baku yang sangat cukup untuk mengembangkan produk petrochemical, namun perlu ada perhitungan secara cermat.	MeN-i
1020	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	<i>Menanggapi</i> rencana Pertamina itu, Ketua Komisi VI DPR RI Faizo Riza mengakui Pertamina saat ini memiliki bahan baku yang sangat cukup untuk mengembangkan produk petro chemical, namun perlu ada perhitungan secara cermat.	MeN-i
1021	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Menanggapi rencana Pertamina itu, Ketua Komisi VI DPR RI Faizo Riza <i>mengakui</i> Pertamina saat ini memiliki bahan baku yang sangat cukup untuk mengembangkan produk petro chemical, namun perlu ada perhitungan secara cermat.	MeN-i
1022	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Menanggapi rencana Pertamina itu, Ketua Komisi VI DPR RI Faizo Riza mengakui Pertamina saat ini <i>memiliki</i> bahan baku yang sangat cukup untuk mengembangkan produk petro chemical, namun perlu ada perhitungan secara cermat.	MeN-i
1023	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Ya memang pertamina <i>memiliki</i> bahan baku yang sangat cukup untuk mengembangkan produk produk petro chemical.	MeN-i
1024	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Terus terang kita perlu melihat keseimbangan dalam bisnis ke depan ekonomi Indonesia kedepan setelah dua tahun lebih kita seluruh bangsa ini <i>mengalami</i> pandemi sektor riil oraktis berhenti dan ada kekhawatiran inflasi akan meningkat," ucapnya.	MeN-i
1025	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Anak buah Muhaimin Iskandar ini <i>menyadari</i> betul, Indonesia masih membutuhkan bahan baku obat karena sejauh ini Indonesia masih bergantung pada impor, dan langkah Erick Thohir untuk mengembangkan petrochemical sangat tepat.	MeN-i
1026	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Bupati Bengkalis dua periode ini menambahkan, Ketum PPP Suharso Monoarfa sendiri memang sempat memberikan lampu hijau bagi kader yang <i>memiliki</i> keinginan maju sebagai kepala daerah.	MeN-i
1027	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Bahkan Suharso juga akan memberikan dukungan penuh kepada kader yang <i>memiliki</i> potensi.	MeN-i

1028	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Ke depan, dirinya akan <i>menjajaki</i> daerah lain khususnya Dapil Riau 2 seperti Kabupaten Pelalawan, Kuansing, Kampar dan Indragiri.	MeN-i
1029	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Hal ini diperuntukan untuk <i>melindungi</i> dari penularan Covid-19.	MeN-i
1030	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Sekolah tatap muka tersebut dilakukan dengan <i>mengikuti</i> aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.	MeN-i
1031	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Bahkan ada SD yang <i>memiliki</i> tempat cuci tangan di setiap depan kelas, namun saat KPAI datang dan duduk di dekat pintu gerbang sekolah, tak ada satu pun peserta didik dan pendidik yang mencuci tangan saat tiba di sekolah.	MeN-i
1032	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Presiden menyatakan <i>mencermati</i> perjalanan RUU TPKS.	MeN-i
1033	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Di samping itu, kepala negara telah meminta kepada gugus tugas pemerintah yang <i>menangani</i> RUU TPKS untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM).	MeN-i
1034	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Kendati demikian, beberapa pihak masih <i>meyakini</i> bahwa Sandi layak ikut bersaing dalam kontestasi tersebut.	MeN-i
1035	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	"Sandiaga Uno diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo karena sangat <i>memahami</i> rakyat Indonesia," karena Mahendra melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (5/1).	MeN-i
1036	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan lain yang membuat Sandiaga Uno layak maju karena selama setahun terakhir, Sandi telah berkeliling Indonesia dan <i>mengunjungi</i> lebih dari 50 desa wisata dan mempromosikan serta memperluas manfaat pariwisata.	MeN-i
1037	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan ketiga adalah Sandi dinilai <i>memiliki</i> sejumlah ide-ide baru program ekonomi yang telah terbukti diterapkannya.	MeN-i
1038	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Terakhir, Sandi dinilai tegas dan cepat dalam <i>menghadapi</i> tantangan.	MeN-i
1039	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Seluruh nama yang terpilih akan diteruskan ke DPR untuk <i>menjalani</i> fit and proper test.	MeN-i

1040	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus menuturkan, calon-calon yang lolos harus <i>mempunyai</i> pengetahuan yang mumpuni tentang kepemiluan dan kompleksitasnya.	MeN-i
1041	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Kata dia, untuk partai Demokrat sendiri <i>memiliki</i> setidaknya 58 anggota DPRD.	MeN-i
1042	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Demokrat Riau, sambungnya, sangat optimis Polri khususnya pola Riau mampu <i>menangani</i> kasus-kasus yang menjadi atensi publik.	MeN-i
1043	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	<i>Menanggapi</i> hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan OTT terhadap kepala daerah ini menunjukkan bahwa KPK tetap bisa tajam dalam melakukan penangkapan, dan tidak seperti yang ditakutkan berbagai pihak selama ini.	MeN-i
1044	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Jangan menunggu korban <i>berjatuhan</i> .	ber-an
1045	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Pasalnya dia menakutkan tugas Prabowo malah akan <i>berbenturan</i> dengan Kementerian Pertanian (Kementan).	ber-an
1046	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	"Langakah itu harus dihormati karena <i>berkenaan</i> dengan hak setiap orang," kata Margarito di Jakarta, Jumat (31/12).	ber-an
1047	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	"Sebab begitu masuk ke Mahkamah Konsitusi maka harus <i>berhadapan</i> dengan masalah teknis maupun konsep," ujar Margarito.	ber-an
1048	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Kalau melihat gejala hari ini, Maragrigo menduga pemohon akan <i>berhadapan</i> dengan masalah teknis maupun konsep.	ber-an
1049	02-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Konsisten kehadiran bisa dilakukan dengan terus menyerap aspirasi hingga aktif melakukan pendidikan politik secara <i>berkelanjutan</i> .	ber-an
1050	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Terkait waktu penyelesaian, Fajar memastikan perkara yang <i>berkaitan</i> langsung dengan agenda ketatanegaraan, seperti tahapan dan jadwal pemilu, akan menjadi perhatian MK.	ber-an

1051	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Terutama <i>berkenaan</i> dengan jumlah saksi dan ahli yang diajukan di persidangan.	ber-an
1052	04-Jan-22	<b>PKS Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Kedua</i> , dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan penghasilan bagi buruh yang tidak <i>berkeadilan</i> serta keselamatan buruh yang semakin terabaikan.	ber-an
1053	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Selain itu, lanjut Guspari, pemindahan IKN <i>bertujuan</i> menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di DKI Jakarta.	ber-an
1054	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Sebab menurut pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono, sosok yang harusnya pantas menggantikan Anies adalah figur baru harus memahami karakteristik Jakarta secara utuh dan menyeluruh agar <i>berkesinambungan</i> dengan pemimpin terdahulu.	ber-an
1055	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	"Saya sangat mengapresiasi komitmen jaksa agung yang <i>bertujuan</i> untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.	ber-an
1056	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Menurut Lelo, AHY <i>berpandangan</i> sudah saatnya Jeriko naik kelas ke panggung politik nasional, dengan melihat prestasi-prestasi politiknya yang panjang selama ini.	ber-an
1057	07-Jan-22	<b>Komisi II DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Penangkapan ini <i>berkaitan</i> dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.	ber-an
1058	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Seperti yang <i>diingatkan</i> berulang kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia.	di-kan
1059	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky juga meminta agar pandemi ini tidak <i>dijadikan</i> ladang bisnis.	di-kan
1060	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, para pejabat terkait sebaiknya menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang <i>dibutuhkan</i> seputar pandemi.	di-kan
1061	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Misalnya masih ada polemik yang menyertai misalnya tentang kebijakan yang <i>diluncurkan</i> atau dijalankan.	di-kan

1062	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Misalnya masih ada polemik yang menyertai misalnya tentang kebijakan yang diluncurkan atau <i>dijalankan</i> .	di-kan
1063	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Kalau ada yang bisa <i>disampaikan</i> ke publik tunjukan.	di-kan
1064	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi juga berpesan agar mantan Danjen Kopassus ini berfokus pada jabatan yang <i>diberikan</i> oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).	di-kan
1065	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Martabat kaum perempuan <i>dilecehkan</i> , " ujar Lestari kepada wartawan, Jumat (31/12).	di-kan
1066	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Menurut Margarito, secara konseptual, UUD 1945 Pasal 6a ayat (2) menyebutkan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden <i>diusulkan</i> oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."	di-kan
1067	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Berdasarkan survei dan riset yang <i>dilakukan</i> The Republic Institute, pemilih cenderung mengutamakan faktor tokoh yang diusung dibandingkan institusi partai itu sendiri.	di-kan
1068	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Berdasarkan survei dan riset yang dilakukan The Republic Institute, pemilih cenderung mengutamakan faktor tokoh yang diusung <i>dibandingkan</i> institusi partai itu sendiri.	di-kan
1069	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Survei The Republic Institute <i>dilakukan</i> dengan kombinasi teknik <i>multistage sampling</i> dan <i>pusposive sampling</i> .	di-kan
1070	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Adapun <i>margin of error</i> penelitian yang <i>dilakukan</i> pada 11- 21 Desember 2021 itu sekitar 3,8 persen.	di-kan
1071	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Hal itu <i>didasarkan</i> pada hasil survei jika dibandingkan dengan data pemilu 2019.	di-kan
1072	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Hal itu didasarkan pada hasil survei jika <i>dibandingkan</i> dengan data pemilu 2019.	di-kan
1073	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Pemilih partai masih lebih tinggi <i>dibandingkan</i> pemilih calegnya.	di-kan

1074	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Konsisten kehadiran bisa <i>dilakukan</i> dengan terus menyerap aspirasi hingga aktif melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan.	di-kan
1075	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Di Sumut misalnya, dalam beberapa kasus, latar belakang tokoh lebih <i>dipertimbangkan</i> dari merek partai.	di-kan
1076	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Makin berpengaruhnya tokoh- tokoh yang diusung jika <i>dibandingkan</i> dengan parpol itu sendiri merupakan dampak pola pemilihan yang berlaku saat ini.	di-kan
1077	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	" Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya <i>diletakkan</i> di bawah salah satu kementrian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional.	di-kan
1078	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Operasional harus <i>dirumuskan</i> di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," papar Agus menjelaskan.	di-kan
1079	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Semua permohonan menjadi prioritas untuk sesegera mungkin <i>diselesaikan</i> ," ujarnya kepada JPG, Senin (3/1).	di-kan
1080	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Tapi juga <i>ditentukan</i> para pemohon.	di-kan
1081	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Terutama berkenaan dengan jumlah saksi dan ahli yang <i>diajukan</i> di persidangan.	di-kan
1082	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Refly Harun, kuasa hukum pemohon, menyatakan, meski gugatan serupa sudah kerap <i>dilakukan</i> dan ditolak, pihaknya tak patah arang.	di-kan
1083	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Dengan ketentuan ambang batas, hak sebagian parpol yang tak memiliki suara atau kursi <i>dipastikan</i> terberangus.	di-kan
1084	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Perpu itu perlu <i>dikeluarkan</i> agar kekacauan yang terjadi selama ini bisa diselesaikan," ujar Syaikhu di Jakarta, Senin (3/1).	di-kan
1085	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Perpu itu perlu dikeluarkan agar kekacauan yang terjadi selama ini bisa <i>diselesaikan</i> ," ujar Syaikhu di Jakarta, Senin (3/1).	di-kan
1086	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Menurut Syaikhu, setelah UU Cipta Kerja <i>disahkan</i> kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), banyak terjadi gejala, terutama kalangan buruh.	di-kan

1087	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Menurut Syaikhu, setelah UU Cipta Kerja disahkan kemudian <i>dinyatakan</i> inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), banyak terjadi gejala, terutama kalangan buruh.	di-kan
1088	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Kedua</i> , dampak <i>disahkannya</i> UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta keselamatan buruh yang semakin terabaikan.	di-kan
1089	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Martri Agoeng menegaskan "Seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab negara yang harus <i>diselesaikan</i> ," ungkapnya.	di-kan
1090	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Keempat</i> , banyaknya permasalahan yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum <i>diselesaikan</i> dengan baik oleh pemerintah.	di-kan
1091	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Martri Agoeng menjelaskan, banyak masyarakat bekerja keluar negeri bukan karena keinginan, tetapi ada keterpaksaan yang <i>disebabkan</i> oleh lapangan pekerjaan di dalam negeri yang sangat sedikit, walaupun ada gaji yang ditawarkan tidak layak.	di-kan
1092	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Martri Agoeng menjelaskan, banyak masyarakat bekerja keluar negeri bukan karena keinginan, tetapi ada keterpaksaan yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan di dalam negeri yang sangat sedikit, walaupun ada gaji yang <i>ditawarkan</i> tidak layak.	di-kan
1093	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, itu adalah terobosan yang penting dan sangat <i>dibutuhkan</i> dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.	di-kan
1094	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Legislator Partai Nasdem menambahkan bahwa dengan adanya Direktorat PPA nanti, <i>diharapkan</i> penanganan kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak bisa lebih maksimal.	di-kan
1095	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Sahroni juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian agar Direktorat ini betul-betul <i>dimanfaatkan</i> secara maksimal demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.	di-kan
1096	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Hadirkan tenaga- tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan istitusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa <i>diberikan</i> .	di-kan

1097	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Jangan sampai tata ruang dan lingkungan menjadi masalah setelah <i>dilakukan</i> pemindahan IKN baru.	di-kan
1098	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Hal itu merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pembahasan yang akan <i>dilakukan</i> pansus.	di-kan
1099	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Menurut dia, banjir di Penajem Paser Utara membuat penetapan IKN baru layak <i>dipertanyakan</i> .	di-kan
1100	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Perlu <i>dipikirkan</i> lokasi yang benar- benar terbebas banjir.	di-kan
1101	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Untuk itu, <i>diperlukan</i> studi komprehensif oleh para ahli, bukan didasarkan pada selera penguasa.	di-kan
1102	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Untuk itu, diperlukan studi komprehensif oleh para ahli, bukan <i>didasarkan</i> pada selera penguasa.	di-kan
1103	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Dia menambahkan, memindahkan IKN itu tidak perlu <i>dilakukan</i> tergesa-gesa.	di-kan
1104	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2024 nanti <i>diperkirakan</i> akan berlangsung dinamis.	di-kan
1105	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Jangan sampai Kemendagri menyeret TNI dan Polri mengisi jabatan yang tidak bisa <i>dilakukan</i> sepenuhnya oleh Kemendagri dari orang dalam," ujar Gusparadi kepada wartawan, Selasa (4/1)	di-kan
1106	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ia menegaskan komitmen DPR bersama-sama pemerintah untuk cepat mengesahkan RUU TPKS yang banyak <i>diharapkan</i> masyarakat itu.	di-kan
1107	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan sendiri sudah berkali-kali menyatakan DPR siap bekerja cepat agar RUU TPKS bisa disahkan.	di-kan
1108	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan <i>dilakukan</i> dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II," katanya.	di-kan

1109	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan menyambut langsung Presiden Jokowi yang telah meminta Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang <i>disiapkan</i> oleh DPR.	di-kan
1110	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar ditindaklanjuti dengan <i>dikirimkan</i> nya Supres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR," ungkapnya.	di-kan
1111	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan meminta pihak pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat <i>dibutuhkan</i> karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memperhatikan.	di-kan
1112	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Hadirnya undang-undang yang berfokus pada korban kekerasan seksual mutlak <i>dibutuhkan</i> ."	di-kan
1113	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Di samping itu, kepala negara juga telah meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah terhadap draf RUU yang sedang <i>disiapkan</i> oleh DPR RI.	di-kan
1114	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Sehingga dia berharap RUU TPKS ini bisa segera <i>disahkan</i> dan dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air.	di-kan
1115	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Apalagi kalau kita lihat dalam gambar besarnya, pak Jeriko sebenarnya tidak <i>dikalahkan</i> , tapi akan diminta untuk memegang amanah jabatan yang lebih terhormat, sebagai penghargaan atas prestasi beliau selama ini," ujarnya.	di-kan
1116	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Saya rasa Ibu Nicke (Direktur Utama), Pertamina sedang <i>ditugaskan</i> ."	di-kan
1117	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Kalau bahan baku obat misalnya memang kita sangat membutuhkan dan itu hanya bisa <i>disediakan</i> selama ini melalui bahan baku impor bisa kita isi, memang akan sangat baik buat produksi dalam negeri," akunya.	di-kan

1118	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Pemilihan kepala daerah serentak baru akan <i>dilaksanakan</i> pada 2024.	di-kan
1119	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	<i>Dikatakan</i> dia, untuk keputusan pemberian dukungan, PPP Riau memang tetap harus mendapat restu DPP terlebih dahulu.	di-kan
1120	06-Jan-22	Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir	Tentunya dalam hal ini yang kami ketahui, bila <i>dimungkinkan</i> ada jaminan kemenangan, beliau (Ketum PPP, <i>red</i> ) memberikan izin," ujar Syamsurizal.	di-kan
1121	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Hal ini <i>diperuntukan</i> untuk melindungi dari penularan Covid-19.	di-kan
1122	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh sudah mulai <i>dilaksanakan</i> pada semester genap tahun akademik 2021/2022, tepatnya mulai Januari 2022 pada wilayah PPKM level 1 sampai 3.	di-kan
1123	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Sekolah tatap muka tersebut <i>dilakukan</i> dengan mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.	di-kan
1124	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Sekolah tatap muka tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah <i>dikeluarkan</i> oleh pemerintah.	di-kan
1125	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	"KPAI mendukung hal tersebut, karena sejak awal pembukaan PTM terbatas, KPAI sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar vaksinasi peserta didik <i>dijadikan</i> persyaratan penyelenggaraan PTM, yaitu minimal 70 persen warga sekolah sudah di vaksin," ujar dia dikutip, Rabu (5/1).	di-kan
1126	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Perhatian selanjutnya adalah pelanggaran protokol kesehatan 3M, seperti masker yang <i>diletakan</i> di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.	di-kan

1127	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Perhatian selanjutnya adalah pelanggaran protokol kesehatan 3M, seperti masker yang diletakan di dagu, masker yang <i>digantungkan</i> di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.	di-kan
1128	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Sejak <i>disiapkan</i> pada 2016, pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) berjalan lambat.	di-kan
1129	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Presiden Joko Widodo pun mendorong adanya percepatan pembahasan sehingga RUU tersebut dapat segera <i>disahkan</i> .	di-kan
1130	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	"Saya harap RUU Tndak Pidana Kekerasan Seksual ini segera <i>disahkan</i> sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air," tegasnya.	di-kan
1131	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	"Sandiaga Uno <i>diharapkan</i> dapat melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo karena sangat memahami rakyat Indonesia," karena Mahendra melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (5/1).	di-kan
1132	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan ketiga adalah Sandi dinilai memiliki sejumlah ide-ide baru program ekonomi yang telah terbukti <i>diterapkan</i> nya.	di-kan
1133	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Seluruh upaya pemerintah <i>ditegaskan</i> nya harus difokuskan pada pemulihan ekonomi.	di-kan
1134	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Ketua Timsel Juri Ardiantoro mengatakan, nama-nama yang <i>disetorkan</i> merupakan sosok terbaik dari berbagai tes yang digelar.	di-kan
1135	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Seluruh nama yang terpilih akan <i>diteruskan</i> ke DPR untuk menjalani fit and proper test.	di-kan
1136	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Sementara itu, dari 24 nama yang <i>disetorkan</i> , setidaknya ada enam pertahanan di level pusat yang lolos.	di-kan
1137	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Hal itu <i>disampaikan</i> Agung usai menerima kunjungan Irjen Iqbal bersama rombongan ke DPRD Riau, Kamis (6/1).	di-kan
1138	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Dirinya juga menyambut baik kunjungan silaturahmi yang <i>dilaksanakan</i> kapolda ke berbagai pihak mulai sejak awal menjabat.	di-kan

1139	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Wali Kota Bekasi Rahmad Effendi terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang <i>dilakukan</i> oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	di-kan
1140	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan OTT terhadap kepala daerah ini menunjukkan bahwa KPK tetap bisa tajam dalam melakukan penangkapan, dan tidak seperti yang <i>ditakutkan</i> berbagai pihak selama ini.	di-kan
1141	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Meski banyak yang meragukan, namun lembaga itu tetap berkomitmen dalam memberantas korupsi, dan hal ini <i>dibuktikan</i> melalui kerja nyatanya.	di-kan
1142	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, pengajuan permohonan judicial review (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konsitusi (MK) oleh individu dan sekelompok orang harus dihormati.	di-i
1143	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	"Langkah itu harus <i>dihormati</i> karena berkenaan dengan hak setiap orang," kata Margarito di Jakarta, Jumat (31/12).	di-i
1144	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan, menguatnya personal branding tidak bisa <i>dihindari</i> dalam sistem politik saat ini.	di-i
1145	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Semua permohonan akan <i>ditangani</i> secepat mungkin.	di-i
1146	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Hal ini, <i>ditandai</i> dengan jaminan dengan jaminan keselamatan kerja bagi buruh yang semain tidak jelas, bahkan PHK terjadi di mana-mana.	di-i
1147	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Tidak hanya dari internal PKS, diskusi akhir tahun tersebut, juga <i>dihadiri</i> oleh beberapa tokoh dan pimpinan buruh yaitu Vice Presiden FSPMI dan KSPI Iswan Abdulah, Ketua umum SP TSK SPSI Roy Jinto, Ketua SP LEM SPSI Arif Winardi, dan Ketua SPN Djoko Heriyono.	di-i

1148	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sudah mendesak untuk segera <i>ditangani</i> dengan hadirnya RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR," ujar Puan kepada wartawan, Selasa (4/1).	di-i
1149	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke pemerintah sehingga dapat <i>ditindaklanjuti</i> pada pembahasan tingkat II," katanya.	di-i
1150	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Tak hanya itu, mereka juga melihat sosok Yusril sebagai seorang tokoh negarawan yang <i>dimiliki</i> Indonesia saat ini.	di-i
1151	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Walaupun saya dengar, karena prestasinya selama ini, pak Jericho akan <i>ditawari</i> posisi terpandang di DPP," katanya.	di-i
1152	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Tentunya, keputusan tersebut <i>dibarengi</i> dengan pertimbangan matang.	di-i
1153	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Adapun aturan yang perlu <i>diikuti</i> adalah terkait dengan pencapaian vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta masyarakat lanjut usia sebagai persyaratan PTM.	di-i
1154	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Saat <i>diwawancarai</i> , anak-anak mengatakan mereka memakai masker saat diperjalanan pergi dan pulang sekolah. Ada pemahaman yang salah terkait fungsi masker yang disamakan dengan helm.	di-i
1155	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	"Beberapa waktu belakangan, kita dengar banyak sekali keraguan-keraguan terhadap kinerja KPK karena berbagai isu yang tengah <i>dihadapinya</i> ."	di-i
1156	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Artinya belum <i>terjelaskan</i> dengan baik," ujar Fahmi, Jumat (31/12).	ter-kan
1157	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Mungkin niatnya baik tapi tidak <i>terjelaskan</i> dengan baik yang kemudian jadi polemik, jadi pro dan kontra.	ter-kan

1158	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Ini menunjukkan hal-hal ini belum <i>terjelaskan</i> dengan baik," tambahnya.	ter-kan
1159	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Kedua</i> , dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta keselamatan buruh yang semakin <i>terabaikan</i> .	ter-kan
1160	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	"Tidak perlu gaduh, cukup dalam senyap, yang penting duit rakyat <i>terselamatkan</i> ," katanya.	ter-kan
1161	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Sebagai manusia biasa, wajar jika kesal atau marah saat harapannya tidak <i>terpenuhi</i> .	ter-i
1162	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	<i>Penanganan</i> Omicron seharusnya tidak seperti penanganan Delta yang sangat telat dan lambat antisipsinya," ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (31/12)	PeN-an
1163	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Penanganan Omicron seharusnya tidak seperti <i>penanganan</i> Delta yang sangat telat dan lambat antisipsinya," ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (31/12)	PeN-an
1164	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	semua elemen bangsa ini, baik di dalam maupun di luar <i>pemerintahan</i> , punya tujuan yang sama.	PeN-an
1165	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky berujar, seharusnya dampak pandemi Covid-19 ini bisa kita lebih minimalisir, jika pemerintah sejak awal terbuka dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar <i>pemerintahan</i> .	PeN-an
1166	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, para pejabat terkait sebaiknya menjauh dari <i>pengadaan</i> peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi.	PeN-an
1167	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi berujar, sudah berjalannya <i>pengadaan</i> alat utama sistem persenjataan atau alutsista.	PeN-an
1168	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	"Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan adalah <i>penyerangan</i> terhadap martabat manusia.	PeN-an

1169	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, pengajuan permohonan judicial review (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh individu dan sekelompok orang harus dihormati.	PeN-an
1170	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Karena dirinya tidak menemukan <i>penalaran</i> yang cukup logis untuk menyerupakan manusia dengan parpol.	PeN-an
1171	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR- Presidential Threshold Nol Persen</b>	Menurut Margarito, secara konseptual, UUD 1945 Pasal 6a ayat (2) menyebutkan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan <i>pemilihan</i> umum."	PeN-an
1172	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Posisi partai politik sebagai basis utama pertimbangan pemilih dalam <i>pemilihan</i> umum legislatif (pileg) kian redup.	PeN-an
1173	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Adapun <i>margin of error penelitian</i> yang dilakukan pada 11- 21 Desember 2021 itu sekitar 3,8 persen.	PeN-an
1174	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Direktur Eksekutif The Republic Institute Sufy Sufyanto mengatakan, sikap pemilih dengan memilih tokoh menunjukkan <i>peningkatan</i> .	PeN-an
1175	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	<i>Penguatan</i> basis kelembagaan partai bisa ditemput, misalnya, dengan konsisten hadir ditengah masyarakat.	PeN-an
1176	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Konsisten kehadiran bisa dilakukan dengan terus menyerap aspirasi hingga aktif melakukan <i>pendidikan</i> politik secara berkelanjutan.	PeN-an
1177	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Makin berpengaruhnya tokoh- tokoh yang diusung jika dibandingkan dengan parpol itu sendiri merupakan dampak pola <i>pemilihan</i> yang berlaku saat ini.	PeN-an
1178	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Misalnya, karena memilih partai yang tidak sesuai dengan situasi politik di daerah <i>pemilihan</i> nya.	PeN-an
1179	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menanggapi isu terkait <i>penggabungan</i> Polri di bawah kementrian.	PeN-an
1180	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Politikus PDI perjuangan ini menegaskan sampai saat ini tidak ada rencana penggabungan Polri di bawah kementrian.	PeN-an

1181	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	" Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada <i>penegakan</i> hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementrian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional.	PeN-an
1182	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Namun dari hasil <i>pengamatan</i> koalisi masyarakat sipil, ada sejumlah tindakan anggota timsel yang berpotensi mencederai upaya menghasilkan penyelenggara yang baik.	PeN-an
1183	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Arus gugatan terhadap norma <i>presidential threshold</i> atau ambang batas <i>pencalonan</i> presiden terus mengalir.	PeN-an
1184	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Terkait waktu <i>penyelesaian</i> , Fajar memastikan perkara yang berkaitan langsung dengan agenda ketatanegaraan, seperti tahapan dan jadwal pemilu, akan menjadi perhatian MK.	PeN-an
1185	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Namun, Fajar mengingatkan, kecepatan <i>penyelesaian</i> perkara tidak hanya bergantung kepada MK.	PeN-an
1186	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Dari aspek konstitusi, pihaknya meyakini bahwa norma ambang batas <i>pencalonan</i> presiden melanggar ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang memberi hak partai politik mengusung calon presiden.	PeN-an
1187	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	" <i>Penggunaan</i> ambang batas untuk mengajukan calon presiden potensial mengampustasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin," ujar pakar hukum tata negara itu.	PeN-an
1188	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Dan dampaknya sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara, karena hal itu berdampak pada <i>pendapatan</i> dan pertumbuhan ekonomi," kata Martri.	PeN-an
1189	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Kedua</i> , dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan <i>penghasilan</i> bagi buruh yang tidak berkeadilan serta keselamatan buruh yang semakin terabaikan.	PeN-an
1190	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Ketiga</i> , terjadinya <i>penurunan</i> kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan disisi lain PHK terjadi dimana-mana serta berdampak pada naiknya angka kemiskinan.	PeN-an

1191	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Harus ada regulasi UU yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI meliputi dari sebelum keberangkatan, ketika <i>penempatan</i> dan kemudian saat kembali lagi ke tanah air, sehingga PMI merasa tenang dalam bekerja," tuturnya.	PeN-an
1192	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya akan melakukan <i>pengembangan</i> organisasi, di mana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat sendiri di Mabes Polri.	PeN-an
1193	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, itu adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam <i>penanganan</i> kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.	PeN-an
1194	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Legislator Partai Nasdem menambahkan bahwa dengan adanya Direktorat PPA nanti, diharapkan <i>penanganan</i> kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak bisa lebih maksimal.	PeN-an
1195	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal <i>pemulihan</i> mentalnya.	PeN-an
1196	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Hadirkan tenaga-tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan istitusi lain agar kebutuhan <i>pemulihan</i> lainnya kepada korban bisa diberikan.	PeN-an
1197	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan dalam rangka meningkatkan <i>pelayanan</i> pada korban, maka Polri akan melakukan pengembangan organisasi, di mana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat sendiri di Mabes Polri.	PeN-an
1198	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada korban, maka Polri akan melakukan <i>pengembangan</i> organisasi, di mana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan menjadi direktorat sendiri di Mabes Polri.	PeN-an
1199	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Dewan meminta <i>penataan</i> ruang harus jadi perhatian serius dalam pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN).	PeN-an
1200	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Dewan meminta penataan ruang harus jadi perhatian serius dalam <i>pembahasan</i> RUU Ibu Kota Negara (IKN).	PeN-an

1201	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Jangan sampai tata ruang dan lingkungan menjadi masalah setelah dilakukan <i>pemindahan</i> IKN baru.	PeN-an
1202	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Sebab, ada sejumlah isu yang menjadi tantangan terkait <i>penataan</i> ruang IKN baru.	PeN-an
1203	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Politikus PAN itu mengatakan, salah satu tujuan <i>pemindahan</i> IKN adalah menghindari banjir.	PeN-an
1204	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	"Jadi, jangan sampai setelah <i>pemindahan</i> , ibu kota baru malah kebanjiran," ujarnya kemarin (3/1).	PeN-an
1205	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Selain banjir, ada masalah kemacetan, <i>pemerataan</i> pembangunan, dan isu penataan ruang lainnya.	PeN-an
1206	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Selain banjir, ada masalah kemacetan, pemerataan <i>pembangunan</i> , dan isu penataan ruang lainnya.	PeN-an
1207	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Selain banjir, ada masalah kemacetan, pemerataan pembangunan, dan isu <i>penataan</i> ruang lainnya.	PeN-an
1208	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Menurut anggota Komisi II DPR tersebut, semua indikator itu menunjukkan bahwa <i>penataan</i> ruang merupakan isu yang sangat penting.	PeN-an
1209	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	<i>Pembahasan</i> RUU IKN kini memasuki tahap inventarisasi masalah.	PeN-an
1210	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Hal itu merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas terhadap <i>pembahasan</i> yang akan dilakukan pansus.	PeN-an
1211	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Menurut dia, banjir di Penajem Paser Utara membuat <i>penetapan</i> IKN baru layak dipertanyakan.	PeN-an
1212	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	<i>Penetapan</i> lokasi IKN terkesan di putus dengan serampangan.	PeN-an
1213	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	<i>Pemilihan</i> Gubernur (Pilgub) DKI pada 2024 nanti diperkirakan akan berlangsung dinamis.	PeN-an
1214	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Estafet kepemimpinan di ibu kota mensyaratkan sosok yang memiliki <i>pemaknaan</i> akan kota dan masyarakat Jakarta agar dapat meneruskan keberhasilan Anies.	PeN-an

1215	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Caranya untuk <i>pengisian</i> itu harus sesuai ketentuan peraturan dan berlaku.	PeN-an
1216	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Yang penting adalah hasil <i>penelitian</i> nya sesuai target.	PeN-an
1217	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Jadi, BRIN secara kelembagaan hanya akan menanyakan proyek <i>penelitian</i> pada awal tahun, kemudian menagih capaiannya pada akhir tahun seperti apa.	PeN-an
1218	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Selain itu, Handoko menyampaikan, di LBME ada kegiatan-kegiatan <i>penelitian</i> di luar ketentuan.	PeN-an
1219	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ketua DPR RI Puan Maharani merespons keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong percepatan <i>pengesahan</i> RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).	PeN-an
1220	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Baleg DPR RI sudah merampungkan <i>pembahasan</i> RUU TPKS.	PeN-an
1221	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	<i>Pengesahan</i> RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II," katanya.	PeN-an
1222	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada <i>pembahasan</i> tingkat II," katanya.	PeN-an
1223	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	DPR RI memastikan siap bekerja optimal dalam <i>pembahasan</i> RUU TPKS bersama pemerintah ke depan.	PeN-an
1224	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan meminta pihak pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan <i>pelaksanaan</i> pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memperhatikan.	PeN-an
1225	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan meminta pihak pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan pelaksanaan <i>pembahasan</i> mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memperhatikan.	PeN-an

1226	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami berharap adanya <i>pembahasan</i> yang progresif dari perwakilan pemerintah bersama DPR, agar pengesahan RUU TPKS bisa kita kebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tutur mantan Menko PMK tersebut.	PeN-an
1227	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami berharap adanya pembahasan yang progresif dari perwakilan pemerintah bersama DPR, agar <i>pengesahan</i> RUU TPKS bisa kita kebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tutur mantan Menko PMK tersebut.	PeN-an
1228	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Dengan adanya UU TPKS nanti, kita harapkan kasus-kasus kekerasan seksual tak terjadi lagi dan negara bisa memberikan perlindungan dan <i>pelayanan</i> terhadap warganya lebih maksimal khususnya kaum perempuan dan anak," tuturnya.	PeN-an
1229	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong langkah-langkah percepatan <i>pengesahan</i> RUU TPKS yang hingga kini masih berproses.	PeN-an
1230	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Dengan demikian, proses <i>pembahasan</i> bersama nanti lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.	PeN-an
1231	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Jaksa Agung ST Burhanudin menyampaikan janjinya pada tahun 2022 yang akan menuntaskan kasus <i>pelanggaran</i> Hak Asasi Manusia (HAM) berat.	PeN-an
1232	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, komitmen Jaksa Agung ini perlu terus didukung dan dimonitor <i>pelaksanaannya</i> .	PeN-an
1233	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Pasalnya ini adalah yang ditunggu-tunggu keluarga korban <i>pelanggaran</i> HAM.	PeN-an
1234	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	"Saya sangat mengapresiasi komitmen jaksa agung yang bertujuan untuk menuntaskan kasus <i>pelanggaran</i> HAM berat.	PeN-an
1235	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Kita juga wajib memonitor terus langkah-langkah <i>penyelesaian</i> yang diambil, agar kita tahu progresnya," ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (4/1).	PeN-an

1236	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Lebih jauh, legislator Partai Nasdem ini menuturkan, dalam melaksanakan <i>penuntasan</i> kasus ini, tentunya Kejaksaan Agung akan menghadapi berbagai tantangan dari banyak pihak.	PeN-an
1237	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanudin menyampaikan janjinya pada tahun 2022 yang akan menuntaskan kasus <i>pelanggaran</i> HAM berat.	PeN-an
1238	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	<i>Penuntasan</i> HAM berat menjadi salah satu dari sembilan rencana program prioritas Kejaksaan di 2022.	PeN-an
1239	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Terkait insiden <i>pembakaran</i> atribut Parta Demokrat, Lelo mengungkapkan bahwa pelakunya bukan kader partai.	PeN-an
1240	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Beliau tokoh yang sudah makan asam garam di politik lokal maupun nasional, serta sudah menetapkan standar <i>pencapaian</i> yang tinggi, yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa menyamainya atau melampauinya," tuturnya.	PeN-an
1241	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Apalagi kalau kita lihat dalam gambar besarnya, pak Jeriko sebenarnya tidak dikalahkan, tapi akan diminta untuk memegang amanah jabatan yang lebih terhormat, sebagai <i>penghargaan</i> atas prestasi beliau selama ini," ujarnya.	PeN-an
1242	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	<i>Pemilihan</i> kepala daerah serentak baru akan dilaksanakan pada 2024.	PeN-an
1243	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Dikatakan dia, untuk keputusan <i>pemberian</i> dukungan, PPP Riau memang tetap harus mendapat restu DPP terlebih dahulu.	PeN-an
1244	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Seperti kitanan massal, donor darah dan <i>pemberian</i> santunan.	PeN-an
1245	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta aturan <i>penyelenggaraan</i> pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen bisa dievaluasi.	PeN-an

1246	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta aturan penyelenggaraan <i>pembelajaran</i> tatap muka (PTM) 100 persen bisa dievaluasi.	PeN-an
1247	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Hal ini diperuntukan untuk melindungi dari <i>penularan</i> Covid-19.	PeN-an
1248	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Adapun aturan yang perlu diikuti adalah terkait dengan <i>pencapaian</i> vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta masyarakat lanjut usia sebagai persyaratan PTM.	PeN-an
1249	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	"KPAI mendukung hal tersebut, karena sejak awal <i>pembukaan</i> PTM terbatas, KPAI sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar vaksinasi peserta didik dijadikan persyaratan penyelenggaraan PTM, yaitu minimal 70 persen warga sekolah sudah di vaksin," ujar dia dikutip, Rabu (5/1).	PeN-an
1250	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	"KPAI mendukung hal tersebut, karena sejak awal pembukaan PTM terbatas, KPAI sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar vaksinasi peserta didik dijadikan persyaratan <i>penyelenggaraan</i> PTM, yaitu minimal 70 persen warga sekolah sudah di vaksin," ujar dia dikutip, Rabu (5/1).	PeN-an
1251	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Adapun soal PTM terbatas yang telah dimulai sejak Januari 2021 ini, KPAI juga telah melakukan <i>pemantauan</i> di sejumlah sekolah pada 8 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat , Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.	PeN-an
1252	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	" <i>Pengawasan</i> PTM ini dilakukan dalam upaya memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak-anak di masa pandemi Covid-19.	PeN-an
1253	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	"Pengawasan PTM ini dilakukan dalam upaya memastikan perlindungan dan <i>pemenuhan</i> hak-hak anak-anak di masa pandemi Covid-19.	PeN-an
1254	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Khususnya di kluster <i>pendidikan</i> , " jelas dia.	PeN-an
1255	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	Perubahan perilaku dalam disiplin 3M yang masih belum maksimal, dan <i>pencapaian</i> vaksinasi anak yang masih rendah harus menjadi perhatian.	PeN-an

1256	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Perhatian selanjutnya adalah <b>pelanggaran</b> protokol kesehatan 3M, seperti masker yang diletakan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.	PeN-an
1257	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Saat diwawancarai, anak-anak mengatakan mereka memakai masker saat diperjalanan pergi dan pulang sekolah. Ada <b>pemahaman</b> yang salah terkait fungsi masker yang disamakan dengan helm.	PeN-an
1258	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Sejak disiapkan pada 2016, <b>pembahasan</b> Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) berjalan lambat.	PeN-an
1259	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Presiden Joko Widodo pun mendorong adanya percepatan <b>pembahasan</b> sehingga RUU tersebut dapat segera disahkan.	PeN-an
1260	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	"Sejak dalam <b>pembentukan</b> pada 2016, hingga saat ini masih berproses di DPR," lanjutnya.	PeN-an
1261	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Jokowi ingin langkah cepat dalam <b>pengesahan</b> RUU tersebut.	PeN-an
1262	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Dengan demikian, proses <b>pembahasan</b> bersama nanti bisa lebih cepat.	PeN-an
1263	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Jokowi ingin <b>pembahasan</b> langsung masuk pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum.	PeN-an
1264	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Langkah selanjutnya adalah <b>pengesahan</b> di rapat paripurna untuk menetapkan sebagai RUU inisiatif DPR.	PeN-an
1265	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Alasan lainnya adalah Sandi merupakan orang yang berorientasi pada <b>pemulihan</b> ekonomi nasional.	PeN-an
1266	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Seluruh upaya pemerintah ditegaskannya harus difokuskan pada <b>pemulihan</b> ekonomi.	PeN-an
1267	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Kemudian, berdasar latar belakang <b>pendidikan</b> , ada berbagai ahli seperti ahli ilmu politik, hukum, hingga kependidikan.	PeN-an
1268	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus menuturkan, calon-calon yang lolos harus mempunyai <b>pengetahuan</b> yang mumpuni tentang kepemiluan dan kompleksitasnya.	PeN-an

1269	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	OTT itu terkait <i>pengadaan</i> barang dan jasa serta jual beli jabatan.	PeN-an
1270	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan OTT terhadap kepala daerah ini menunjukkan bahwa KPK tetap bisa tajam dalam melakukan <i>penangkapan</i> , dan tidak seperti yang ditakutkan berbagai pihak selama ini.	PeN-an
1271	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Namun <i>penangkapan</i> ini menunjukkan bahwa berbagai kekhawatiran itu tidak terbukti, dan KPK tetap tajam dalam melakukan penangkapan.	PeN-an
1272	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Legislator Partai Nasdem ini menyebut bahwa <i>penangkapan</i> ini juga membuktikan kualitas kerja KPK yang baru, di mana mereka bekerja sangat hati-hati.	PeN-an
1273	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	<i>Penangkapan</i> ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.	PeN-an
1274	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, banyak <i>pelajaran</i> berharga yang bisa dipetik dari pandemi selama dua tahun ini.	Per-an
1275	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Bingung fokus ke kesehatan atau ekonomi, ujung-ujungnya dua-duanya berantakan dan mengalami <i>perlambatan</i> , " katanya.	Per-an
1276	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, para pejabat terkait sebaiknya menjauh dari pengadaan <i>peralatan</i> maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi.	Per-an
1277	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Kalau kita catat ada beberapa hal penting pertama terealisasinya konsep Sistem <i>Pertahanan</i> Rakyat semesta sudah mulai terlihat," ungkapnya.	Per-an
1278	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Fahmi berujar, sudah berjalannya pengadaan alat utama sistem <i>persenjataan</i> atau alutsista.	Per-an
1279	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	Misalnya ada beberapa kontrak baru di pesawat, kapal laut dan <i>perlengkapan</i> di darat dan alutsista," pungkasnya.	Per-an

1280	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen	Per-an
1281	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, pengajuan permohonan judicial review (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh individu dan sekelompok orang harus dihormati.	Per-an
1282	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Meski begitu, Margarito menilai, <i>permohonan judicial review presidential threshold</i> nol persen tersebut cukup rumit, baik secara teknis maupun konseptual.	Per-an
1283	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	"Saya pikir akan ada kesulitan bagaimana hakim MK menerima gugatan dari <i>perseorangan</i> ."	Per-an
1284	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Posisi partai politik sebagai basis utama <i>pertimbangan</i> pemilih dalam pemilihan umum legislatif (pileg) kian redup.	Per-an
1285	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sufy menjelaskan, menguatkan ketokohan dalam <i>pertimbangan</i> pemilih menunjukkan institut partai politik tidak cukup kuat.	Per-an
1286	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Untuk itu, dia menduga <i>perebutan</i> tokoh menjelang pileg akan krusial.	Per-an
1287	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Ketua Bawaslu Sumatera Utara Safrida Rasahan menambahkan, faktor personal calon memang mendominasi <i>pertimbangan</i> pemilih.	Per-an
1288	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Kadang faktor etnisitas dan kesamaan marga justru yang muncul ( <i>pertimbangan</i> pemilih, <i>red</i> )," tegasnya.	Per-an
1289	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo dalam <i>pernyataan</i> akhir tahun 2021 mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk.	Per-an
1290	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ <i>perumusan</i> kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," papar Agus menjelaskan.	Per-an
1291	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, <i>pertahanan</i> oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," papar Agus menjelaskan.	Per-an

1292	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	" Apalagi terdapat <i>pernyataan</i> dapat tidak mengucurkan dana pemilu.	Per-an
1293	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Hingga kemarin (3/1), tercatat ada enam <i>permohonan</i> yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).	Per-an
1294	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, banyaknya gugatan yang datang bukan <i>persoalan</i> .	Per-an
1295	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Semua <i>permohonan</i> akan ditangani secepat mungkin.	Per-an
1296	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Semua <i>permohonan</i> menjadi prioritas untuk sesegera mungkin diselesaikan," ujarnya kepada JPG, Senin (3/1).	Per-an
1297	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Sesuai dan berdasar hukum acara, sesuai dengan dinamika <i>persidangan</i> dan kebutuhan informasi <i>persidangan</i> ," imbuhnya.	Per-an
1298	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Sesuai dan berdasar hukum acara, sesuai dengan dinamika persidangan dan kebutuhan informasi <i>persidangan</i> ," imbuhnya.	Per-an
1299	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Terutama berkenaan dengan jumlah saksi dan ahli yang diajukan di <i>persidangan</i> .	Per-an
1300	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Sementara itu, dalam <i>permohonan</i> nya, 27 WNI menyampaikan sejumlah dalil.	Per-an
1301	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Dan dampaknya sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara, karena hal itu berdampak pada pendapatan dan <i>pertumbuhan</i> ekonomi," kata Martri.	Per-an
1302	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	<i>Keempat</i> , banyaknya <i>permasalahan</i> yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.	Per-an
1303	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Harus ada regulasi UU yang mampu memberikan <i>perlindungan</i> secara menyeluruh kepada PMI meliputi dari sebelum keberangkatan, ketika penempatan dan kemudian saat kembali lagi ke tanah air, sehingga PMI merasa tenang dalam bekerja," tuturnya.	Per-an
1304	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Mereka tidak hanya mendapatkan <i>perlindungan</i> , tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya.	Per-an

1305	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	"Setelah Pak Kapolri membentuk wadahnya, saya minta kepada seluruh kepolisian agar betul-betul bekerja memaksimalkan <i>perlindungan</i> terhadap perempuan dan anak.	Per-an
1306	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Anies Baswedan sebagai <i>pertahanan</i> memiliki peluang besar dan dapat terpilih kembali. Namun, jalan menuju Calon Presiden (Capres) 2024 menurut saya lebih menarik baginya," kata pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono di Jakarta, Senin (3/1).	Per-an
1307	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	"Bagi calon-calon yang berasal di luar Jakarta pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan seluk beluk Jakarta, dan tak jarang melahirkan pandangan yang kurang tepat yang berimbas pada <i>perlambatan</i> kinerja" ujarnya.	Per-an
1308	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Caranya untuk pengisian itu harus sesuai ketentuan <i>peraturan</i> dan berlaku.	Per-an
1309	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	"(khawatir, <i>red</i> ) ternyata nanti ada (urusan) birokrasi," katanya dalam <i>pertemuan</i> dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Jakarta kemarin (4/1) malam.	Per-an
1310	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TEKS</b>	Ketua DPR RI Puan Maharani merespons keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong <i>percepatan</i> pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).	Per-an
1311	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang menegaskan <i>perlindungan</i> terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sudah mendesak untuk segera ditangani dengan hadirnya RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR," ujar Puan kepada wartawan, Selasa (4/1).	Per-an
1312	05-Jan-22		"Kami berharap adanya pembahasan yang progresif dari <i>perwakilan</i> pemerintah bersama DPR, agar pengesahan RUU TPKS bisa kita kebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tutur mantan Menko PMK tersebut.	Per-an
1313	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TEKS</b>	Ia pun berharap dukungan dari semua elemen bangsa terhadap RUU TPKS agar korban-korban kekerasan seksual dapat lebih mendapatkan jaminan <i>perlindungan</i> sosial dan hukum.	Per-an

1314	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Dengan adanya UU TPKS nanti, kita harapkan kasus-kasus kekerasan seksual tak terjadi lagi dan negara bisa memberikan <i>perlindungan</i> dan pelayanan terhadap warganya lebih maksimal khususnya kaum perempuan dan anak," tuturnya.	Per-an
1315	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong langkah-langkah <i>percepatan</i> pengesahan RUU TPKS yang hingga kini masih berproses.	Per-an
1316	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Dengan demikian, proses pembahasan bersama nanti lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum, serta menjamin <i>perlindungan</i> bagi korban kekerasan seksual.	Per-an
1317	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Sehingga dia berharap RUU TPKS ini bisa segera disahkan dan dapat memberikan <i>perlindungan</i> secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air.	Per-an
1318	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Ketum AHY pasti sudah mengambil berbagai <i>pertimbangan</i> dan masukan sebelum mengambil keputusan.	Per-an
1319	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Erick juga memastikan, <i>perluasan</i> bisnis Pertamina mampu mengurangi beban Indonesia terhadap baku obat maupun bahan baju-bajuan yang saat ini masih di impor.	Per-an
1320	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Ketua Komisi VI DPR RI Faizol Riza mengakui Pertamina saat ini memiliki bahan baku yang sangat cukup untuk mengembangkan produk petrochemical, namun perlu ada <i>perhitungan</i> secara cermat.	Per-an
1321	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Hal ini diungkapkan langsung Ketua DPW PPP Riau Syamsurizal dalam acara <i>peringatan</i> hari lahir PPP di Pekanbaru, Rabu (5/1).	Per-an
1322	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Tentunya, keputusan tersebut dibarengi dengan <i>pertimbangan</i> matang.	Per-an
1323	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Adapun aturan yang perlu diikuti adalah terkait dengan pencapaian vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta masyarakat lanjut usia sebagai <i>persyaratan</i> PTM.	Per-an

1324	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	"KPAI mendukung hal tersebut, karena sejak awal pembukaan PTM terbatas, KPAI sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar vaksinasi peserta didik dijadikan <i>persyaratan</i> penyelenggaraan PTM, yaitu minimal 70 persen warga sekolah sudah di vaksin," ujar dia dikutip, Rabu (5/1).	Per-an
1325	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	"Pengawasan PTM ini dilakukan dalam upaya memastikan <i>perlindungan</i> dan pemenuhan hak-hak anak-anak di masa pandemi Covid-19.	Per-an
1326	06-Jan-22	KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan	<i>Perubahan</i> perilaku dalam disiplin 3M yang masih belum maksimal, dan pencapaian vaksinasi anak yang masih rendah harus menjadi perhatian.	Per-an
1327	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Banyak tarik ulur dan <i>perdebatan</i> .	Per-an
1328	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Presiden Joko Widodo pun mendorong adanya <i>percepatan</i> pembahasan sehingga RUU tersebut dapat segera disahkan.	Per-an
1329	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	" <i>Perlindungan</i> terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, utamanya kekerasan seksual pada perempuan," tegas Jokowi kemarin (4/1).	Per-an
1330	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Presiden menyatakan mencermati <i>perjalanan</i> RUU TPKS.	Per-an
1331	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	"Saya harap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan <i>perlindungan</i> secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air," tegasnya.	Per-an
1332	06-Jan-22	Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA	Terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya menyambut baik <i>pernyataan</i> Presiden Jokowi tersebut.	Per-an
1333	07-Jan-22	Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel	Sementara itu, dari 24 nama yang disetorkan, setidaknya ada enam <i>pertahanan</i> di level pusat yang lolos.	Per-an
1334	07-Jan-22	Demokrat Siap Dukong Kerja Kapolda Riau	Seperti <i>persoalan illegal logging</i> , narkoba, kebakaran hutan dan lahan dan beberapa kasus lainnya.	Per-an
1335	07-Jan-22	Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel	Pihaknya berharap siapa pun yang terpilih bisa membawa <i>perbaikan</i> kualitas pemilu ke depan.	Per-an
1336	07-Jan-22	Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel	"Ini menjadi modal untuk <i>perbaikan</i> KPU dan Bawaslu ke depan ujarnya.	Per-an

1337	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky menambahkan, selama pandemi, pemerintah seharusnya fokus pada upaya di bidang <i>kesehatan</i> .	Ke-an
1338	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	"Jangan kemudian membuat <i>kebijakan</i> serba tanggung.	Ke-an
1339	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Bingung fokus ke <i>kesehatan</i> atau ekonomi, ujung-ujungnya dua-duanya berantakan dan mengalami perlambatan," katanya.	Ke-an
1340	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Hampir 1,5 tahun rakyat bingung dan menghadapi <i>kesulitan</i> luar biasa, dari terancam nyawa karena Covid-19, dan kemudian karena kondisi ekonomi memburuk.	Ke-an
1341	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky menuturkan agar pemerintah lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritikan terkait <i>kebijakan</i> yang diambil.	Ke-an
1342	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Akan timbul <i>ketidakpercayaan</i> publik yang diambil, karena ada satu dua pejabat publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi.	Ke-an
1343	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Misalnya masih ada polemik yang menyertai misalnya tentang <i>kebijakan</i> yang diluncurkan atau dijalankan.	Ke-an
1344	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Ada beberapa belanja menunjukkan progres mengenai <i>kebutuhan</i> alutsista kita yang sebelumnya tidak berjalan sekarang berjalan.	Ke-an
1345	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Pasalnya saat ini sangat marak adanya <i>kejahatan</i> seksual.	Ke-an
1346	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Prinsip moral kini tidak lagi bertaring atas kejahatan dan <i>kebaikan</i> jadi kabur.	Ke-an
1347	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Hal ini agar masyarakat mempunyai instrumen pelindung bagi para pelaku-pelaku <i>kejahatan</i> seksual.	Ke-an
1348	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	" <i>Kekerasan</i> seksual terhadap anak-anak dan perempuan adalah penyerangan terhadap martabat manusia.	Ke-an
1349	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Maka <i>kekerasan</i> seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang dikutuk oleh prinsip moral agama,kepercayaan, dan ideologi manapun.	Ke-an
1350	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Maka kekerasan seksual adalah <i>kejahatan</i> kemanusiaan yang dikutuk oleh prinsip moral agama,kepercayaan, dan ideologi manapun.	Ke-an

1351	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Maka kekerasan seksual adalah kejahatan <i>kemanusiaan</i> yang dikutuk oleh prinsip moral agama, kepercayaan, dan ideologi manapun.	Ke-an
1352	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Mengesahkan RUU TPKS adalah tindakan memihak korban, mewujudkan <i>keadilan</i> dan kebenaran,"ungkapnya.	Ke-an
1353	01-Jan-22	<b>Lestari Sebut Pimpinan DPR Buta Nurani</b>	Mengesahkan RUU TPKS adalah tindakan memihak korban, mewujudkan keadilan dan <i>kebenaran</i> , "ungkapnya.	Ke-an
1354	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	Namun, <i>kenyataan</i> nya sekarang yang mengajukan adalah individu/kelompok.	Ke-an
1355	01-Jan-22	<b>Margarito Soroti Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen</b>	"Saya pikir akan ada <i>kesulitan</i> bagaimana hakim MK menerima gugatan dari perseorangan.	Ke-an
1356	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sufy menjelaskan, menguatkan <i>ketokohan</i> dalam pertimbangan pemilih menunjukkan institut partai politik tidak cukup kuat.	Ke-an
1357	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Menanggapi survei tersebut, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, temuan tersebut menunjukkan <i>kelembagaan</i> partai yang rentan.	Ke-an
1358	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Sehingga apabila <i>kehilangan</i> tokoh, itu tidak berdampak signifikan terhadap masa depan partai.	Ke-an
1359	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Penguatan basis <i>kelembagaan</i> partai bisa ditemput, misalnya, dengan konsisten hadir ditengah masyarakat.	Ke-an
1360	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Konsisten <i>kehadiran</i> bisa dilakukan dengan terus menyerap aspirasi hingga aktif melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan.	Ke-an
1361	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	"Kadang faktor etnisitas dan <i>kesamaan</i> marga justru yang muncul (pertimbangan pemilih, <i>red</i> )," tegasnya.	Ke-an
1362	03-Jan-22	<b>Tokoh Cenderung Lebih Kuat</b>	Faktanya, kata pria yang akrab disapa Awiek tersebut, ada banyak orang yang punya <i>ketokohan</i> , tetapi gagal lolos.	Ke-an
1363	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menanggapi isu terkait penggabungan Polri di bawah <i>kementrian</i> .	Ke-an

1364	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Politikus PDI perjuangan ini menegaskan sampai saat ini tidak ada rencana penggabungan Polri di bawah kementrian.	Ke-an
1365	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	"Yang saya pahami memang tidak ada rencana Polri di bawah <i>kementrian</i> ," ucap Tjahjo.	Ke-an
1366	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Nantinya lanjut Agus, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah <i>kementrian</i> tersebut.	Ke-an
1367	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	" Untuk mewujudkan <i>keamanan</i> dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementrian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional.	Ke-an
1368	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	" Untuk mewujudkan keamanan dan <i>ketertiban</i> perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementrian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional.	Ke-an
1369	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	" Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu <i>kementrian</i> , dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional.	Ke-an
1370	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan <i>kebijakan</i> dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," papar Agus menjelaskan.	Ke-an
1371	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan <i>keamanan</i> ketertiban oleh Polri," papar Agus menjelaskan.	Ke-an
1372	03-Jan-22	<b>Tidak Ada Wacana Polri di Bawah Kementrian</b>	Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan <i>ketertiban</i> oleh Polri," papar Agus menjelaskan.	Ke-an
1373	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama mengatakan, <i>kebijakan</i> timsel menyiarkan secara umum proses tes wawancara sebagai hal positif.	Ke-an
1374	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	Sementara itu, Bahtiar membantah tuduhan <i>keberpihakan</i> .	Ke-an

1375	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Terkait waktu penyelesaian, Fajar memastikan perkara yang berkaitan langsung dengan agenda <i>ketatanegaraan</i> , seperti tahapan dan jadwal pemilu, akan menjadi perhatian MK.	Ke-an
1376	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Sesuai dan berdasar hukum acara, sesuai dengan dinamika persidangan dan <i>kebutuhan</i> informasi persidangan," imbuhnya.	Ke-an
1377	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Namun, Fajar mengingatkan, <i>kecepatan</i> penyelesaian perkara tidak hanya bergantung kepada MK.	Ke-an
1378	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Baik oleh pemohon, pemberi <i>keterangan</i> , atau jika ada pihak terkait," tegasnya.	Ke-an
1379	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	"Jadi, <i>ketentuan</i> hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah," ujar dia.	Ke-an
1380	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Dari aspek konstitusi, pihaknya meyakini bahwa norma ambang batas pencalonan presiden melanggar <i>ketentuan</i> pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang memberi hak partai politik mengusung calon presiden.	Ke-an
1381	04-Jan-22	<b>MK Bakal Pantau Jadwal Pemilu 2024</b>	Dengan <i>ketentuan</i> ambang batas, hak sebagian parpol yang tak memiliki suara atau kursi dipastikan terberangus.	Ke-an
1382	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan catatan akhir tahun pada bidang <i>ketenagakerjaan</i> .	Ke-an
1383	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Perpu itu perlu dikeluarkan agar <i>kekacauan</i> yang terjadi selama ini bisa diselesaikan," ujar Syaikh di Jakarta, Senin (3/1).	Ke-an
1384	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Martri Agoeng memberikan beberapa catatan penting di akhir tahun 2021, khususnya bidang <i>ketenagakerjaan</i> .	Ke-an
1385	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Hal ini, ditandai dengan jaminan dengan jaminan <i>keselamatan</i> kerja bagi buruh yang semain tidak jels, bahkan PHK terjadi di mana-mana.	Ke-an
1386	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Dan dampaknya sangat berpengaruh dalam <i>kehidupan</i> bernegara, karena hal itu berdampak pada pendapatan dan pertumbuhan ekonomi," kata Martri.	Ke-an
1387	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Kedua, dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta <i>keselamatan</i> buruh yang semakin terabaikan.	Ke-an

1388	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Ketiga,terjadinya penurunan <i>kepesertaan</i> BPJS Ketenagakerjaan, dan disisi lain PHK terjadi dimana-mana serta berdampak pada naiknya angka kemiskinan.	Ke-an
1389	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Ketiga,terjadinya penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan disisi lain PHK terjadi dimana-mana serta berdampak pada naiknya angka <i>kemiskinan</i> .	Ke-an
1390	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Martri Agoeng menjelaskan, banyak masyarakat bekerja keluar negeri bukan karena keinginan, tetapi ada <i>keterpaksaan</i> yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan di dalam negeri yang sangat sedikit, walaupun ada gaji yang ditawarkan tidak layak.	Ke-an
1391	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	"Harus ada regulasi UU yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI meliputi dari sebelum <i>keberangkatan</i> , ketika penempatan dan kemudian saat kembali lagi ke tanah air, sehingga PMI merasa tenang dalam bekerja," tuturnya.	Ke-an
1392	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Ini momentum yang sangat progresif di mana polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan terbentuknya direktorat khusus yang memang menangani bidang ini, dan memang sudah sangat urgent sekali barang ini," ujar Sahroni dalam <i>keterangan</i> nya, Senin (3/1).	Ke-an
1393	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Legislator Partai Nasdem menambahkan bahwa dengan adanya Direktorat PPA nanti, diharapkan penanganan kasus hukum terkait <i>kekerasan</i> pada perempuan dan anak bisa lebih maksimal.	Ke-an
1394	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Sahroni juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian agar Direktorat ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal demi menekan angka <i>kekerasan</i> terhadap perempuan dan anak.	Ke-an
1395	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	"Setelah Pak Kapolri membentuk wadahnya, saya minta kepada seluruh <i>kepolisian</i> agar betul-betul bekerja memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Ke-an
1396	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Hadirkan tenaga- tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan istitusi lain agar <i>kebutuhan</i> pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan.	Ke-an

1397	04-Jan-22	<b>Polri Akan Bentuk Direktorat Khusus Perempuan dan Anak</b>	Kita harapkan , 2022 Indonesia bisa bebas <i>kekerasan</i> pada perempuan dan anak," ungkapnya.	Ke-an
1398	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	"Jadi, jangan sampai setelah pemindahan, ibu kota baru malah <i>kebanjiran</i> ," ujarnya kemarin (3/1).	Ke-an
1399	04-Jan-22	<b>Penataan Ruang IKN Harus Jadi Prioritas</b>	Selain banjir, ada masalah <i>kemacetan</i> , pemerataan pembangunan, dan isu penataan ruang lainnya.	Ke-an
1400	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Estafet <i>kepemimpinan</i> di ibu kota mensyaratkan sosok yang memiliki pemaknaan akan kota dan masyarakat Jakarta agar dapat meneruskan keberhasilan Anies.	Ke-an
1401	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Estafet kepemimpinan di ibu kota mensyaratkan sosok yang memiliki pemaknaan akan kota dan masyarakat Jakarta agar dapat meneruskan <i>keberhasilan</i> Anies.	Ke-an
1402	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Dia melihat, sebaiknya warga Jakarta memberi <i>kepercayaan</i> pada tokoh lokal, sebab kompleksitas Ibu Kota membutuhkan sosok yang langsung <i>running</i> setelah terpilih.	Ke-an
1403	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sehingga <i>kekosongan</i> jabatan itu harus diisi oleh penjabat gubernur atau bupati dan wali kota hingga 2024.	Ke-an
1404	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar Kemendagri mengisi <i>kekosongan</i> kepala daerah diisi oleh aparatur sipil negara (ASN).	Ke-an
1405	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Caranya untuk pengisian itu harus sesuai <i>ketentuan</i> peraturan dan berlaku.	Ke-an
1406	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	<i>Ketentuan</i> itu harus dari ASN, dari Dirjen," ungkapnya.	Ke-an
1407	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	<i>Kekosongan</i> kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal diisi oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.	Ke-an
1408	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Kekosongan <i>kepemimpinan</i> pemerintah daerah itu, nantinya bakal diisi oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.	Ke-an
1409	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	Sementara pada ayat (11) dijelaskan untuk mengisi <i>kekosongan</i> bupati/wali kota diangkat penjabat bupati/wali kota dari jabatan pimpinan tinggi pratama.	Ke-an

1410	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Dia mengatakan, memang ada peneliti honorer Eijkman yang <i>keberatan</i> , bahkan tidak mau bergabung dengan BRIN.	Ke-an
1411	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Jadi, BRIN secara <i>kelembagaan</i> hanya akan menanyakan proyek penelitian pada awal tahun, kemudian menagih capaiannya pada akhir tahun seperti apa.	Ke-an
1412	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Selain itu, Handoko menyampaikan, di LBME ada kegiatan-kegiatan penelitian di luar <i>ketentuan</i> .	Ke-an
1413	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Padahal, ketika eijkman selama ini menggunakan anggaran dari APBN, seluruh kegiatannya harus sesuai dengan ketentuan keuangan negara.	Ke-an
1414	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Padahal, ketika eijkman selama ini menggunakan anggaran dari APBN, seluruh kegiatannya harus sesuai dengan ketentuan keuangan negara.	Ke-an
1415	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Dia menyebut BRIN sudah memberikan kesempatan kepada para periset honorer eijkman untuk masuk ke BRIN.	Ke-an
1416	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Syaratnya harus memiliki kualifikasi S-3, sesuai dengan <i>ketentuan</i> riset dunia.	Ke-an
1417	05-Jan-22	<b>Periset Khawatir Terjebak Budaya Birokrasi</b>	Yang belum S-3 bisa diberi <i>kesempatan</i> untuk kuliah dahulu.	Ke-an
1418	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ketua DPR RI Puan Maharani merespons <i>keinginan</i> Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong percepatan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).	Ke-an
1419	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang menegaskan perlindungan terhadap korban <i>kekerasan</i> seksual, khususnya perempuan, sudah mendesak untuk segera ditangani dengan hadirnya RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR," ujar Puan kepada wartawan, Selasa (4/1).	Ke-an
1420	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan meminta pihak pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus <i>kekerasan</i> seksual di Indonesia sudah sangat memperhatikan.	Ke-an
1421	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Puan mengingatkan kasus-kasus <i>kekerasan</i> seksual di Indonesia sudah sangat darurat.	Ke-an

1422	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Ia pun berharap dukungan dari semua elemen bangsa terhadap RUU TPKS agar korban-korban <b>kekerasan</b> seksual dapat lebih mendapatkan jaminan perlindungan sosial dan hukum.	Ke-an
1423	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	"Hadirnya undang-undang yang berfokus pada korban <b>kekerasan</b> seksual mutlak dibutuhkan.	Ke-an
1424	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Dengan adanya UU TPKS nanti, kita harapkan kasus-kasus <b>kekerasan</b> seksual tak terjadi lagi dan negara bisa memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap warganya lebih maksimal khususnya kaum perempuan dan anak," tuturnya.	Ke-an
1425	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Dengan demikian, proses pembahasan bersama nanti lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan <b>kepastian</b> hukum, serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.	Ke-an
1426	05-Jan-22	<b>Puan Janji DPR Proses Cepat RUU TPKS</b>	Sehingga dia berharap RUU TPKS ini bisa segera disahkan dan dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban <b>kekerasan</b> seksual di tanah air.	Ke-an
1427	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Charly mengakui bahwa <b>kepindahan</b> nya ke PAN adalah perintah Zulkifli Hasan agar dia bisa menjadi caleg di pileg 2024 mendatang.	Ke-an
1428	05-Jan-22	<b>Charly ST12 Jadi Kader PAN</b>	Saya siap berupaya maksimal," ujar Charly dalam <b>keterannngan</b> nya, Selasa (4/1).	Ke-an
1429	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Karenanya, Sahroni mendorong terbentuknya kerja sama antara <b>kejaksanaan</b> dan lembaga HAM lainnya.	Ke-an
1430	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Jadi saya dorong <b>kejaksanaan</b> agar koordinasi dengan lembaga lain seperti Komnas HAM dan lain-lain agar mereka bisa bekerja sama dengan maksimal.	Ke-an
1431	05-Jan-22	<b>DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus HAM</b>	Penuntasan HAM berat menjadi salah satu dari sembilan rencana program prioritas <b>Kejaksanaan</b> di 2022.	Ke-an
1432	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Lelo sebut AHY sudah ambil <b>Keputusan</b> terbaik	Ke-an
1433	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru Leonardus Lelo mengajak semua pihak untuk menghormati <b>keputusan</b> ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.	Ke-an

1434	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Ketum AHY pasti sudah mengambil berbagai pertimbangan dan masukan sebelum mengambil <i>keputusan</i> .	Ke-an
1435	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Saya yakin beliau mengambil <i>keputusan</i> terbaik bagi masa depan Demokrat di NTT," ujar Lelo dalam keterangannya, Selasa (4/1).	Ke-an
1436	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	Saya yakin beliau mengambil keputusan terbaik bagi masa depan Demokrat di NTT," ujar Lelo dalam <i>keterangan</i> nya, Selasa (4/1).	Ke-an
1437	05-Jan-22	<b>Lelo Sebut AHY Sudah Ambil Keputusan Terbaik</b>	"Saya pasti akan tempatkan pak Jericho pada posisi yang terhormat dalam <i>kepengurusan</i> DPD yang baru.	Ke-an
1438	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Adalah membangun petrochemical yang selama ini Indonesia gak punya, itu Thailand punya, Singapura punya, Malaysia punya," ujar Erick dalam satu <i>kesempatan</i> .	Ke-an
1439	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Tetapi mungkin perlu dihitung secara cermat apakah produk produk itu sekarang kita impor banyak salah satunya metanol itu dibutuhkan industri dalam negeri kita atau memungkinkan untuk memasok pasar luar" kata Faizol Riza dalam <i>keterangan</i> nya, Rabu (5/1).	Ke-an
1440	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Menurut politikus PKB itu, langkah Pertamina ini sangat baik, namun perlu melihat <i>keseimbangan</i> dalam bisnis ke depan, karena ekonomi bangsa sat ini terpukul dengan pandemi Covid-19, hingga ada kekhawatiran inflasi akan meningkat.	Ke-an
1441	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Menurut politikus PKB itu, langkah Pertamina ini sangat baik, namun perlu melihat keseimbangan dalam bisnis ke depan, karena ekonomi bangsa sat ini terpukul dengan pandemi Covid-19, hingga ada <i>kekhawatiran</i> inflasi akan meningkat.	Ke-an
1442	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Terus terang kita perlu melihat <i>keseimbangan</i> dalam bisnis ke depan ekonomi Indonesia kedepan setelah dua tahun lebih kita seluruh bangsa ini mengalami pandemi sektor riil oraktis berhenti dan ada kekhawatiran inflasi akan meningkat," ucapnya.	Ke-an
1443	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Terus terang kita perlu melihat keseimbangan dalam bisnis ke depan ekonomi Indonesia kedepan setelah dua tahun lebih kita seluruh bangsa ini mengalami pandemi sektor riil oraktis berhenti dan ada <i>kekhawatiran</i> inflasi akan meningkat," ucapnya.	Ke-an

1444	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Nah kalau misalnya produk-produk itu yang disebut sebagai <i>kelanjutan</i> dari bahan baku petrochemical tadi, apakah tepat untuk diproduksi hari ini," tambahnya.	Ke-an
1445	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Namun, lanjut Faizol, langkah Pertamina mengembangkan petrochemical ini akan berjalan baik jika bahan baku produk Pertamina sendiri bisa disimpan dan bisa dimonotaise, hingga tidak mengakibatkan <i>kerugian</i> karena tidak terserap oleh pasar.	Ke-an
1446	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	"Kecuali ada strategi lain di mana produksi bahan baku yang merupakan <i>kelanjutan</i> dari bahan baku produk produk Pertamina ini bisa disimpan dan bisa di monotaise.	Ke-an
1447	06-Jan-22	<b>Ketua Komisi VI Apresiasi Bisnis Pertamina</b>	Sehingga tidak mengakibatkan <i>kerugian</i> akibat dari produksi yang tidak terserap oleh pasar," jelasnya.	Ke-an
1448	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Dikatakan dia, untuk <i>keputusan</i> pemberian dukungan, PPP Riau memang tetap harus mendapat restu DPP terlebih dahulu.	Ke-an
1449	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Tentunya, <i>keputusan</i> tersebut dibarengi dengan pertimbangan matang.	Ke-an
1450	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Tentunya dalam hal ini yang kami ketahui, bila dimungkinkan ada jaminan <i>kemenangan</i> , beliau (Ketum PPP, <i>red</i> ) memberikan izin," ujar Syamsurizal.	Ke-an
1451	06-Jan-22	<b>Syamsurizal Klaim Dapat Dukungan Masyarakat Riau Pesisir</b>	Bupati Bengkalis dua periode ini menambahkan, Ketum PPP Suharso Monoarfa sendiri memang sempat memberikan lampu hijau bagi kader yang memiliki <i>keinginan</i> maju sebagai kepala daerah.	Ke-an
1452	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Adapun aturan yang perlu diikuti adalah terkait dengan pencapaian vaksinasi bagi pendidik dan tenaga <i>kependidikan</i> , peserta didik serta masyarakat lanjut usia sebagai persyaratan PTM.	Ke-an
1453	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Untuk indikator <i>kesiapan</i> sekolah yang sudah menyelenggarakan PTM terbatas dengan kategori cukup, baik dan sangat baik mencapai 79,17 persen.	Ke-an

1454	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Meskipun <i>ketidaksiapan</i> itu diantaranya adalah belum dibuatnya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam berbagai layanan saat PTM terbatas.	Ke-an
1455	06-Jan-22	<b>KPI Setuju Pelaksanaan PTM dengan Catatan</b>	Perhatian selanjutnya adalah pelanggaran protokol <i>kesehatan</i> 3M, seperti masker yang diletakan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.	Ke-an
1456	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	"Perlindungan terhadap korban <i>kekerasan</i> seksual perlu menjadi perhatian bersama, utamanya kekerasan seksual pada perempuan," tegas Jokowi kemarin (4/1).	Ke-an
1457	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	Jokowi ingin pembahasan langsung masuk pokok-pokok substansi untuk memberikan <i>kepastian</i> hukum.	Ke-an
1458	06-Jan-22	<b>Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA</b>	"Saya harap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban <i>kekerasan</i> seksual di tanah air," tegasnya.	Ke-an
1459	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno beberapa waktu lalu pernah menyatakan <i>keengganan</i> nya untuk ikut maju dalam bursa calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.	Ke-an
1460	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	"Sandiaga Uno diharapkan dapat melanjutkan <i>kepemimpinan</i> Joko Widodo karena sangat memahami rakyat Indonesia," karena Mahendra melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (5/1).	Ke-an
1461	06-Jan-22	<b>Sandiaga Uno Tetap Dinilai Layak Maju</b>	"Sandiaga Uno diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo karena sangat memahami rakyat Indonesia," karena Mahendra melalui <i>keterangan</i> tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (5/1).	Ke-an
1462	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Mulai tes tertulis, makalah, psikotes, wawancara, hingga tes <i>kesehatan</i> .	Ke-an
1463	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	"Kami berharap nama-nama ini jika dipilih akan memperkuat <i>kelembagaan</i> KPU dan Bawaslu," imbuhnya.	Ke-an

1464	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Terkait nama-nama yang dipilih, dia menyebut itu <i>kewenangan</i> timsel.	Ke-an
1465	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Ada yang berlatar belakang sebagai penyelenggara pemilu, akademisi, hingga penggiat <i>kepemiluan</i> .	Ke-an
1466	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Kemudian, berdasar latar belakang pendidikan, ada berbagai ahli seperti ahli ilmu politik, hukum, hingga <i>kependidikan</i> .	Ke-an
1467	07-Jan-22	<b>Enam Petahana Lolos Seleksi Timsel</b>	Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus menuturkan, calon-calon yang lolos harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang <i>kepemiluan</i> dan kompleksitasnya.	Ke-an
1468	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Saat itu, Agung sebagai Wakil Ketua DPRD Riau turut menyambut <i>kedatangan</i> Iqbal bersama pimpinan DPRD Riau lainnya.	Ke-an
1469	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Kami tentu turut bangga atas <i>kesuksesan</i> karier beliau," ujar Agung kepada wartawan.	Ke-an
1470	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Dalam <i>kesempatan</i> tersebut, Agung turut menyatakan dukungan kepada Irjen Iqbal dalam melaksanakan tugas-tugas berat kepolisian.	Ke-an
1471	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Dalam kesempatan tersebut, Agung turut menyatakan dukungan kepada Irjen Iqbal dalam melaksanakan tugas-tugas berat <i>kepolisian</i> .	Ke-an
1472	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Secara menyeluruh ada puluhan ribu kader yang siap menyukseskan kinerja Polda Riau di bawah <i>kepemimpinan</i> Irjen Iqbal.	Ke-an
1473	07-Jan-22	<b>Demokrat Siap Dukung Kerja Kapolda Riau</b>	Seperti persoalan <i>illegal logging</i> , narkoba, <i>kebakaran</i> hutan dan lahan dan beberapa kasus lainnya.	Ke-an
1474	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Namun penangkapan ini menunjukkan bahwa berbagai <i>kekhawatiran</i> itu tidak terbukti, dan KPK tetap tajam dalam melakukan penangkapan.	Ke-an
1475	07-Jan-22	<b>Komisi III DPR Apresiasi KPK Sukses OTT Wali Kota Bekasi</b>	Mereka menjawab <i>keraguan</i> dengan prestasi," ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (6/).	Ke-an
1476	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Apa yang terjadi di negara lain, <i>seharusnya</i> diantisipasi dengan cepat dan serius.	se-nya

1477	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Penanganan Omicron <i>seharusnya</i> tidak seperti penanganan Delta yang sangat telat dan lambat antisipsinya," ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (31/12)	se-nya
1478	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky menambahkan, selama pandemi, pemerintah <i>seharusnya</i> fokus pada upaya di bidang kesehatan.	se-nya
1479	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	<i>Seharusnya</i> pemerintah berfokus pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa terhindar dari bencana Covid-19.	se-nya
1480	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Herzaky berujar, <i>seharusnya</i> dampak pandemi Covid-19 ini bisa kita lebih minimalisir, jika pemerintah sejak awal terbuka dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan.	se-nya
1481	01-Jan-22	<b>Pandemi Jangan Jadi Ajang Bisnis Pejabat</b>	Menurut Herzaky, para pejabat terkait <i>sebaiknya</i> menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi.	se-nya
1482	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	" <i>Sebenarnya</i> kita tidak ingin tahu banyak dan terlalu detail tapi setidaknya tidak berarti kemudian semuanya dilakukan dengan tertutup.	se-nya
1483	01-Jan-22	<b>ISESS Ungkap Beberapa Kekurangan Kinerja Prabowo di Kemenhan</b>	"Sebenarnya kita tidak ingin tahu banyak dan terlalu detail tapi <i>setidaknya</i> tidak berarti kemudian semuanya dilakukan dengan tertutup.	se-nya
1484	03-Jan-22	<b>Ingatkan Pentingnya Independensi Timsel</b>	"Jika memang pujian tersebut bagian dari strategi mendalami calon <i>seharusnya</i> juga dilakukan secara merata kepada calon- calon yang lain," ujarnya kemarin (2/1).	se-nya
1485	04-Jan-22	<b>PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh</b>	Matri Agoeng menegaskan " <i>Seharusnya</i> hal ini menjadi tanggung jawab negara yang harus diselesaikan," ungkapnya.	se-nya
1486	04-Jan-22	<b>Sejumlah Nama Bisa Gantikan Anies di Pilgub Jakarta</b>	Dia melihat, <i>sebaiknya</i> warga Jakarta memberi kepercayaan pada tokoh lokal, sebab kompleksitas Ibu Kota membutuhkan sosok yang langsung <i>running</i> setelah terpilih.	se-nya
1487	05-Jan-22	<b>DPR Usul Penjabat Kepala Daerah Tidak Dari TNI/Polri</b>	"Jangan sampai Kemendagri menyeret TNI dan Polri mengisi jabatan yang tidak bisa dilakukan <i>sepenuhnya</i> oleh Kemendagri dari orang dalam," ujar Gusparidi kepada wartawan, Selasa (4/1)	se-nya



## BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA KELAS X SEMESTER 1 KD.3.2

K.D. 3.2 : Mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis.

### Aspek Kebahasaan Teks Laporan Observasi

#### A. Pengertian Afiksasi

Sebelum memahami pengertian afiksasi, alangkah baiknya untuk memahami pengertian afiks terlebih dahulu. Berikut ini pengertian afiks menurut para ahli.

1. Menurut Ramlan (2001: 55) Afiks adalah suatu gramatikal terikat yang di dalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata atau pokok kata baru.
2. Kridalaksana dalam N.M. Dhanawaty et al (2017: 58) juga berpendapat bahwa afiks merupakan bentuk terikat yang bila ditambahkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya.

Jadi afiks merupakan bentuk morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah kata dasar sehingga membentuk kata yang memiliki makna gramatikal berbeda. Proses pengimbuhan pada suatu kata dasar dapat dilakukan diawal, ditengah, diakhir serta diawal dan diakhir kata yang diimbuhkan.

Setelah memahami pengertian afiks, berikut beberapa pengertian afiksasi menurut para ahli.

1. Menurut Chaer (2014: 177) afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Afiksasi adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem terikat, yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Afiksasi menurut N.M. Dhanawaty et al (2017: 58) adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar.
3. Alek (2018: 63) afiksasi adalah proses penambahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkan. Proses ini dapat bersifat inflektif dan dapat pula bersifat derivatif. Bersifat inflektif apabila afiksasi ini tidak mengubah kelas kata. Sebaliknya bersifat derivatif apabila hasil afiksasi mengubah kelas kata.

Jadi afiksasi merupakan suatu proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks atau morfem terikat pada sebuah kata dasar sehingga makna gramatikal dari kata tersebut mengalami perubahan.

**B. Jenis dan fungsi afiks**

Afiks memiliki beberapa jenis dan fungsi sebagai berikut.

**1. Prefiks**

Prefiks merupakan pembubuhan afiks di awal bentuk dasar. Prefiks dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

**a. Prefiks *meN-***

Prefiks *meN-* merupakan jenis afiks yang dibubuhkan di awal bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata kerja/verba. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi prefiks *meN-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja aktif dan transitif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh prefiks *meN-*. Sehingga jenis prefiks *meN-* berfungsi sebagai pembentuk kata verba dan verba transitif.

Contoh:

Fahmi *menilai* Kemenhan di bawah Prabowo Subianto masih belum transparan ke publik. (sumber: Riau Pos, edisi 01-Jan-22)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kalimat di atas dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *menilai*. Kata *menilai* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *nilai* + prefiks-*me-*. Prefiks *me-* ini wajib hadir karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang berobjek. Kata *menilai* pada kalimat tersebut menyatakan makna “melakukan/memberikan penilaian”.

**b. Prefiks *ber-***

Prefiks *ber-* merupakan jenis afiks yang dibubuhkan di awal bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata kerja/verba. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi prefiks *ber-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh prefiks *ber-*. Sehingga jenis prefiks *ber-* berfungsi sebagai pembentuk kata verba.

Contoh:

Seharusnya pemerintah *berfokus* pada upaya-upaya bagaimana agar rakyat bisa terhindar dari bencana Covid-19. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)

Pada kalimat di atas dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata *berfokus*. Kata *berfokus* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *fokus* + prefiks *ber-*.

**c. Prefiks *di-***

Prefiks *di-* merupakan jenis afiks yang dibubuhkan di awal bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi prefiks *di-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja pasif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja aktif yang dibubuhi oleh prefiks *di-*. Sehingga jenis prefiks *di-* berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif.

Contoh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paparan survei The Republic Institute tidak **dibantah** partai politik (parpol). (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)

Pada kalimat di atas dapat dilihat bahwa fungsi P diisi oleh kata **dibantah**. Kata **dibantah** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *bantah* + prefiks *di-*.

**d. Prefiks ter-**

Prefiks *ter-* merupakan jenis afiks yang dibubuhkan di awal bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata verba dan adjektiva. Ketika bentuk dasar yang bukan kata verba dan adjektiva dibubuhi prefiks *ter-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata verba dan adjektiva. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata verba dan adjektiva yang dibubuhi oleh prefiks *ter-*. Sehingga jenis prefiks *ter-* berfungsi sebagai pembentuk kata verba dan adjektiva.

Contoh:

Sebab, sistem politik Indonesia menggunakan model suara **terbanyak**. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)

Kata **terbanyak** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *banyak* + prefiks *ter-*. Kata **terbanyak** menyatakan “makna paling”.

**e. Prefiks pe-**

Prefiks *pe-* merupakan jenis afiks yang dibubuhkan di awal bentuk dasar dan memiliki fungsi sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi prefiks *pe-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh prefiks *pe-*. Sehingga jenis prefiks *pe-* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina.

Contoh:

**Periset** itu meminta supaya bisa menjadi ASN penuh. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *periset* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *riset* + prefiks *pe-*. Kata *periset* menyatakan “orang yang melakukan riset”.

**f. Prefiks *peN-***

Prefiks *peN-* merupakan jenis afiks yang dibubuhkan di awal bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi prefiks *peN-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh prefiks *peN-*. Sehingga jenis prefiks *peN-* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina.

Contoh:

Sehingga kekosongan jabatan itu harus diisi oleh *penjabat* gubernur atau bupati dan wali kota hingga 2024. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)

Kata *penjabat* dalam kalimat merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jabat* + prefiks *peN-*. Kata *penjabat* menyatakan “orang yang memegang jabatan sementara”.

**g. Prefiks *ke-***

Prefiks *ke-* merupakan jenis afiks yang dibubuhkan di awal bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata numeralia bertingkat dan kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata numeralia bertingkat atau kata nomina dibubuhi prefiks *ke-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata numeralia bertingkat atau kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata numeralia bertingkat atau kata nomina yang dibubuhi oleh prefiks *ke-*. Sehingga jenis prefiks *ke-* berfungsi sebagai pembentuk kata numeralia bertingkat dan kata nomina.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

**Kedua**, dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta keselamatan buruh yang semakin terabaikan. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)

Kata **kedua** dalam kalimat merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *dua* + prefiks *ke-*. Kata **kedua** menyatakan makna “urutan/tingkatan dua”.

#### h. Prefiks *se-*

Prefiks *se-* merupakan jenis afiks yang dibubuhkan di awal bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi prefiks *se-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh prefiks *se-*. Sehingga jenis prefiks *se-* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina.

Contoh:

Gejala **serupa** juga terjadi di partai-partai lainnya. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)

Kata **serupa** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *rupa* + prefiks *se-*. Kata **serupa** menyatakan makna “sama rupa”.

#### i. Prefiks *para-*

Prefiks *para-* merupakan jenis afiks yang dibubuhkan di awal bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi prefiks *para-* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh prefiks *para-*. Sehingga jenis prefiks *para-* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina dan menyatakan makna banyak.

Contoh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu, diperlukan studi komprehensif oleh *para ahli*, bukan didasarkan pada selera penguasa. (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)

Kata *para ahli* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *ahli* + prefiks *para-*. Makna yang dinyatakan kata *para ahli* adalah “ahli-ahli”.

## 2. Sufiks

Sufiks merupakan jenis afiks yang diimbuhkan di akhir bentuk dasar. Prefiks memiliki beberapa jenis sebagai berikut.

### a. Sufiks *-an*

Sufiks *-an* merupakan jenis afiks yang dibubuhkan di akhir bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi sufiks *-an* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh sufiks *-an*. Sehingga jenis sufiks *-an* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina.

Contoh:

Tentu ini adalah *jawaban* yang ditunggu-tunggu oleh segenap korban maupun keluarganya, dan kita semua. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)

Kata *jawaban* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jawab* + sufiks *-an*. Makna dari kata *jawaban* adalah “hasil menjawab”.

### b. Sufiks *-wan*

Sufiks *-wan* merupakan afiks yang dibubuhkan di akhir bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan kata nomina dibubuhi sufiks *-wan* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sufiks *-wan*. Sufiks *-wan* Sehingga jenis sufiks *-wan* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina.

Contoh:

Tak hanya itu, mereka juga melihat sosok Yusril sebagai seorang tokoh *negarawan* yang dimiliki Indonesia saat ini. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)

Kata *negarawan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *negara* + sufiks *-wan*. Makna dari kata *negarawan* adalah “Orang yang ahli dalam kenegaraan”.

### 3. Konfiks

Konfiks merupakan pembubuhan afiks di akhir bentuk dasar. Konfiks dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

#### a. Konfiks *meN-kan*

Konfiks *meN-kan* merupakan afiks yang dibubuhkan di awal dan di akhir bentuk dasar dan memiliki fungsi sebagai pembentuk kata verba transitif. Verba transitif merupakan kata kerja yang diikuti/memiliki objek dalam kalimat. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *meN-kan* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja aktif dan transitif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh konfiks *meN-kan*. Sehingga jenis konfiks *meN-kan* berfungsi sebagai pembentuk kata verba dan verba transitif.

Contoh:

Politikus PDI perjuangan ini *menegaskan* sampai saat ini tidak ada rencana penggabungan Polri di bawah kementerian. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)

Kata *menegaskan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tegas* + konfiks *meN-kan*. Makna dari kata *menegaskan* adalah “Memberikan penegasan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Konfiks *MeN-i***

Konfiks *meN-i* merupakan afiks yang dibubuhkan di awal dan di akhir bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata verba transitif. Verba transitif merupakan kata kerja yang diikuti/memiliki objek dalam kalimat. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *meN-i* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja aktif dan transitif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh konfiks *meN-i*. Sehingga jenis konfiks *meN-i* berfungsi sebagai pembentuk kata verba dan verba transitif.

Contoh:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo **menanggapi** isu terkait penggabungan Polri di bawah kementerian. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)

Kata **menanggapi** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tanggap* + konfiks *meN-i*. Makna dari kata **menanggapi** adalah “Memberikan tanggapan”.

**c. Konfiks *Ber-an***

Konfiks *ber-an* merupakan afiks yang dibubuhkan di awal dan di akhir bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata verba. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *ber-an* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata verba. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata verba yang dibubuhi oleh konfiks *ber-an*. Sehingga jenis konfiks *ber-an* berfungsi sebagai pembentuk verba.

Contoh:

Penangkapan ini **berkaitan** dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan. (Riau Pos, edisi 07-Jan-22)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata **berkaitan** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *kait* + konfiks *ber-an*. Makna dari kata **berkaitan** adalah “memiliki kaitan/saling mengait”.

**d. Konfiks Di-kan**

Konfiks *di-kan* merupakan afiks yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar dan memiliki fungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *di-kan* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja pasif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja aktif yang dibubuhi oleh konfiks *di-kan*. Sehingga jenis konfiks *di-kan* berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif.

Contoh:

Meski banyak yang meragukan, namun lembaga itu tetap berkomitmen dalam memberantas korupsi, dan hal ini **dibuktikan** melalui kerja nyatanya. (Riau Pos, edisi 07-Jan-22)

Kata **dibuktikan** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *bukti* + konfiks *di-kan*. Makna dari kata **dibuktikan** adalah “dilakukan pembuktian”.

**e. Konfiks Di-i**

Konfiks *di-i* merupakan afiks yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *di-i* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja pasif. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja aktif yang dibubuhi oleh konfiks *di-i*. Sehingga jenis konfiks *di-i* berfungsi sebagai pembentuk kata kerja pasif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan, menguatnya personal branding tidak bisa **dihindari** dalam sistem politik saat ini. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)

Kata **dihindari** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *hindar* + konfiks *di-i*. Makna dari kata **dihindari** adalah “dilakukan penghindaran”.

**f. Konfiks *ter-kan***

Konfiks *ter-kan* merupakan afiks yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata kerja. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *ter-kan* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh konfiks *ter-kan*. Sehingga jenis konfiks *ter-kan* berfungsi sebagai pembentuk kata kerja.

Contoh:

Mungkin niatnya baik tapi tidak **terjelaskan** dengan baik yang kemudian jadi polemik, jadi pro dan kontra. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)

Kata **terjelaskan** merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *jelas* + konfiks *ter-kan*. Makna dari kata **terjelaskan** adalah “dapat dijelaskan”.

**g. Konfiks *ter-i***

Konfiks *ter-i* merupakan afiks yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata kerja. Ketika bentuk dasar yang bukan kata kerja dibubuhi konfiks *ter-i* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata kerja. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata kerja yang dibubuhi oleh konfiks *ter-i*. Sehingga jenis konfiks *ter-i* berfungsi sebagai pembentuk kata kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

Sebagai manusia biasa, wajar jika kesal atau marah saat harapannya tidak *terpenuhi*. (Riau Pos, edisi 05-Jan-22)

Kata *terpenuhi* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *penuh* + konfiks *ter-i*. Makna dari kata *terpenuhi* adalah “dapat dipenuhi”.

**h. Konfiks *peN-an***

Konfiks *peN-an* merupakan afiks yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan nomina dibubuhi konfiks *peN-an* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh konfiks *peN-an*. Sehingga jenis konfiks *peN-an* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina.

Contoh:

Direktur Eksekutif The Republic Institute Sufy Sufyanto menyatakan, sikap pemilih dengan memilih tokoh menunjukkan *peningkatan*. (Riau Pos, edisi 03-Jan-22)

Kata *peningkatan* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *tingkat* + konfiks *peN-an*. Makna dari kata *peningkatan* adalah “hal meningkat”.

**i. Konfiks *per-an***

Konfiks *per-an* merupakan afiks yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata nomina. Ketika bentuk dasar yang bukan nomina dibubuhi konfiks *per-an* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina yang dibubuhi oleh konfiks *per-an*. Sehingga jenis konfiks *per-an* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

Menurut Herzaky, banyak *pelajaran* berharga yang bisa dipetik dari pandemi selama dua tahun ini. (Riau Pos, edisi 01-Jan-22)

Kata *pelajaran* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *ajar* + konfiks *per-an*. Makna dari kata *pelajaran* adalah “hal yang dipelajari”.

**j. Konfiks *ke-an***

Konfiks *ke-an* merupakan afiks yang dibubuhkan di awal dan akhir bentuk dasar dan berfungsi sebagai pembentuk kata nomina dan verba. Ketika bentuk dasar yang bukan nomina dibubuhi konfiks *ke-an* maka bentuk dasar tersebut akan menjadi kata nomina dan verba. Begitu juga dengan bentuk dasar yang berupa kata nomina dan verba yang dibubuhi oleh konfiks *ke-an*. Sehingga jenis konfiks *ke-an* berfungsi sebagai pembentuk kata nomina dan verba.

Contoh:

"Jadi, jangan sampai setelah pemindahan, ibu kota baru malah *kebanjiran*," ujarnya kemarin (3/1). (Riau Pos, edisi 04-Jan-22)

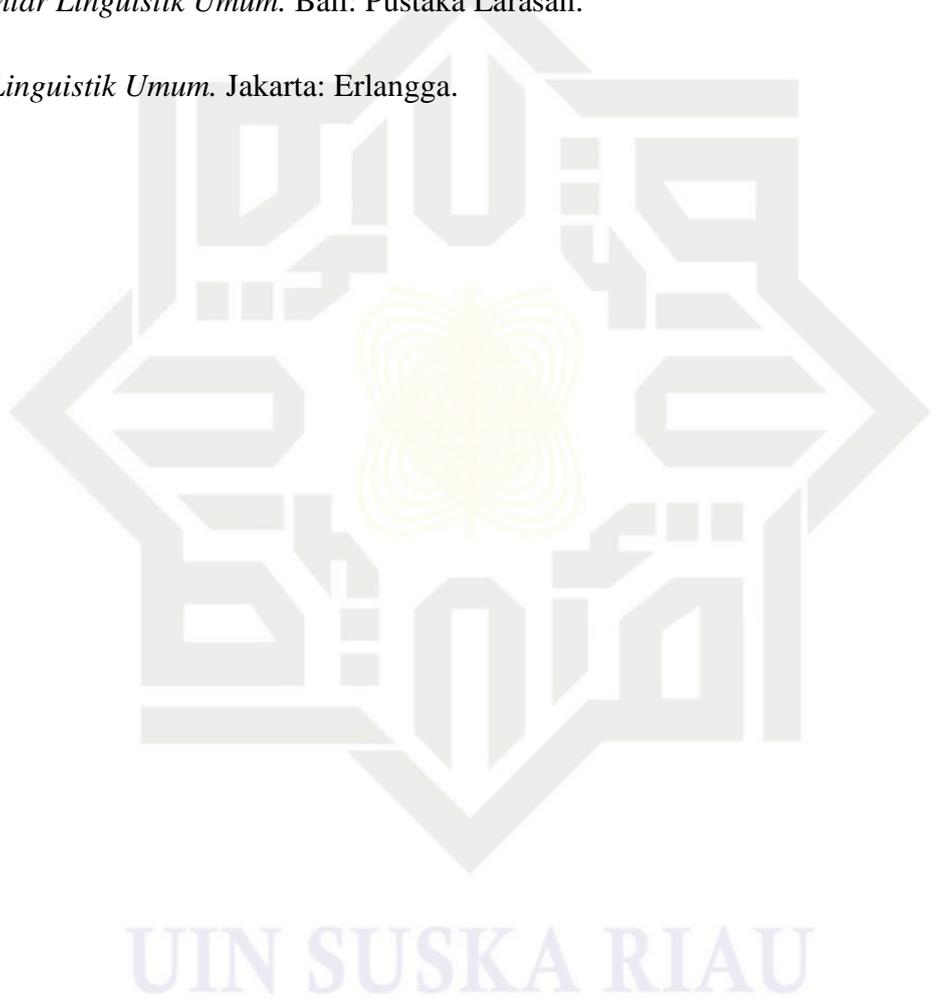
Kata *kebanjiran* merupakan kata yang dibentuk oleh kata dasar *banjir* + konfiks *ke-an*. Makna dari kata *kebanjiran* adalah “diserang banjir”.

Referensi:

- Ramlan, M. (2001). *Ilmu Bahasa Indonesia Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: C.V. Karyono
- Chaer, Abdul. (2014). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dhanawaty, Ni Made, Made Sri Satyawati, dan Ni Putu N. Widarsini. (2017). *Pengantar Linguistik Umum*. Bali: Pustaka Larasan.
- Alek. (2018). *Linguistik Umum*. Jakarta: Erlangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
كلية التربية والتعليم  
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING  
Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km. 18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647  
Fax (0761) 561647 Web www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak\_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/13189/2021

Pekanbaru, 28 September 2021

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : *Pembimbing Skripsi*

Kepada  
Yth. Dr. Martius, M.Hum.

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : MAIMUNAH  
NIM : 11811123593  
Jurusan : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Judul : Afiksasi Pada Kumpulan Puisi "Buku Latihan Tidur" Karya Joko Pinurbo  
Serta Pemanfaatannya Sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia Di SMA  
Kelas X (Kajian Fungsi dan Makna)  
Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia Redaksi dan teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zarkasih, M.Ag.  
NIP. 19721017199703 1 004

Tembusan :  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
كلية التربية والتعليم  
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 561647  
Fax. (0761) 561647 Web: www.uinsuska.ac.id, E-mail: effah\_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/4842/2022 Pekanbaru, 28 Maret 2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi (Perpanjangan)*

Kepada  
Yth. Dr. Martius, M.Hum.

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : MAIMUNAH  
NIM : 11811123593  
Jurusan : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Judul : Afiikasi dalam Wacana Politik pada Koran "Riau Pos" serta Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA Kelas X (Kajian Fungsi dan Makna)  
Waktu : 3 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia dan dengan Redaksi dan Teknik Penulisan Skripsi sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terima kasih.

Wassalam

an. Dekan

Wakil Dekan I



Zarkasih, M.Ag.

NP. 19721017 199703 1 004

Tembusan :  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau



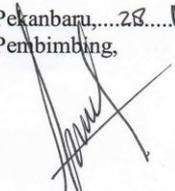
KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**FAKULTAS TARBIAH DAN KEGURUAN**  
 كلية التربية والتعليم  
**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING**  
 Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA  
 SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing :
  - a. Seminar usul Penelitian :
  - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Dr. Martius, M.Hum.
  - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 196601041993031004
3. Nama Mahasiswa : Maimunah
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11811123593
5. Kegiatan : Proposal

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	29/9-2021	Konsultasi Sinopsis		
2.	24/10-2021	Konsultasi latar belakang, rumusan masalah		
3.	28/11-2021	Konsultasi teori, metode penelitian		

Pekanbaru, 28 Maret 2022  
 Pembimbing,

  
 Dr. Martius, M.Hum.  
 NIP. 196601041993031004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**  
كلية التربية والتعليم  
**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING**  
Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA  
SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing :
  - a. Seminar usul Penelitian :
  - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Dr. Martius, M.Hum.
  - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 196601041993031004
3. Nama Mahasiswa : Maimunah
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11811123593
5. Kegiatan : Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	19/01-2022	Konsultasi subjeke penelitian		
2.	15/02-2022	Konsultasi metode penelitian		
3.	8/03-2022	Konsultasi analisis data		
4.	15/03-2022	Konsultasi Format/rencana penyajian analisis data		
5.	21/03-2022	Konsultasi Abstrak, Penyajian data		
6.	24/03-2022	Konsultasi Penyempurnaan skripsi		
7.	28/03-2022	ACC		

Pekanbaru, 28 Maret .....2022  
Pembimbing,

Dr. Martius, M.Hum.  
NIP. 196601041993031004



Lampiran 5: Surat Balasan Pra-Riset



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

مكتبة الجامعة

UNIVERSITY LIBRARY

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-7077837  
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1496/Un.04/UPT.I/HM.02.1/02/2022

Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

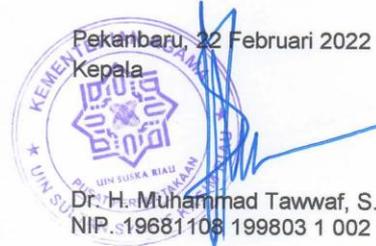
**N a m a** : Maimunah  
**NIM** : 11811123593  
**Fakultas** : Tarbiyah dan Keguruan  
**Program Studi** : Pendidikan Bahasa Indonesia

Memberi izin untuk melakukan Prariset / Penelitian pada Perpustakaan UIN Suska Riau terhitung mulai tanggal 22 Februari 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Februari 2022

Kepala



Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP, M.Si.  
NIP. 19681108 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
كلية التربية والتعليم  
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING  
Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647  
Fax. (0761) 561647 Web. www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak\_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2785/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

Pekanbaru, 02 Maret 2022 M

Kepada  
Yth. Gubernur Riau  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : MAIMUNAH  
NIM : 11811123593  
Semester/Tahun : VIII (Delapan)/ 2022  
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Afiksasi dalam Kolom Politika di Koran Riau Pos Edisi 1-7 Januari 2022 Serta Pemanfaatannya Sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA Kelas X (Kajian Fungsi dan Makna)

Lokasi Penelitian : Perpustakaan UIN Suska Riau

Waktu Penelitian : 3 Bulan (02 Maret 2022 s.d 02 Juni 2022)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. H. Kadar, M.Ag.   
NIP.19650521 199402 1001

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45701  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2785/2022 Tanggal 2 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

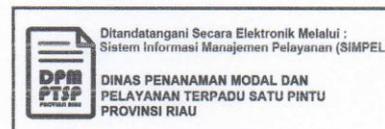
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MAIMUNAH   |
| 2. NIM / KTP         | : 118111235930   |
| 3. Program Studi     | : PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : AFIKSASI DALAM KOLOM POLITIKA DI KORAN RIAU POS EDISI 1-7 JANUARI 2022 SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA DI SMA KELAS X (KAJIAN FUNGSI DAN MAKNA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Maret 2022



### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Maimunah lahir di Sungai Tarab tanggal 29 Maret 1999, anak ketiga dari tiga bersaudara dari Bapak Maiyustal dan Ibu Meilan. Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 33 Salimpaung sampai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Lawang Mandahiling hingga tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2015 ke

SMA Negeri 1 Salimpaung dan tamat pada tahun 2018. Alhamdulillah, pada tahun 2018 diterima menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Pekanbaru Kelurahan Perhentian Marpoyan RW 10 dan PPL di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Pada tahun 2021 penulis memulai penelitian dengan judul “Afiksasi dalam Wacana Politik Koran *Riau Pos* dan Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA Kelas X (Kajian Fungsi dan Makna)”. Adapun dosen pembimbing Bapak Dr. Martius, M.Hum.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.